PERTUMBUHAN PERKEMBANGAN dan KEJATUHAN LEKRA DI INDONESIA

YAHAYA ISMAIL

Hadiah
buat
Bapak Dick Hartoko
dari
[illegible] Ismail
Nov 73.

djogja fights back

Pertumbuhan, Perkembangan dan
Kejatuhan Lekra di Indonesia

Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia

(*satu tinjauan dari aspek sosio-budaya*)

oleh

Yahaya Ismail

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR
1972

RALAT

Halaman	Para/baris	Salah	Betul
xi	para 2 baris 14	senapan	senapang
7	para 1 baris 10	organisasi-oranisasi	organisasi-organisasi
16	para 1 baris 6	yeaajurit	perajurit
16	para 1 baris 10	perjaurit	perajurit
19	para 3 baris 8	menyebebkan	menyebabkan
21	para 1 baris 2	karanganya	karangannya
24	para 1 baris 11	penuls-penulis	penulis-penulis
30	para 2 baris 7	propanda	propaganda
44	para 1 baris 1-2	Pramoedya Ananta Toe	Pramoedya Ananta Toer
95	para 1 baris 4-5	menyemarakan	menyemarakkan
113	para 2 baris 9-11	Jassin masukan beberapa karangan pengarang-pengarang yang jelas mendukung Bung Karno Jassin ia berkata:	Jassin masukkan beberapa karangan pengarang-pengarang yang jelas mendukung Bung Karno. Jassin berkata:
113	para 3 baris 3	keluargan	keluaran
114	para 2 baris 6	anggtoa	anggota
126	para 4 baris 7	prinsipiil	prinsipil
141	baris 9	Toer, Pramoedy Ananata. "Korps pengarang dikuras	———. "Korps pengarang dikuras
142	para 1 baris 1	30 April 1960	30 April 1940
142	para 4 baris 7	harian .dan juga dalam buku.	harian dan juga dalam bentuk buku.
143	para 1 baris 4	*Bimbingan Sastra Melayu. Lama* Kuala Lumpur:	*Bimbingan Sastra Melayu Lama*. Kuala Lumpur.
145	baris 9	AJDEB, JOEBAAR,	AJOEB, JOEBAAR,

Bagi kami kebudajaan adalah perdjoangan untuk menjempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudajaan di atas sektor kebudajaan jang lain. Setiap sektor berdjoang bersama-sama untuk kebudajaan itu sesuai dengan kodratnja.
Dalam melaksanakan kebudajaan Nasional kami berusaha mentjipta dengan kesungguhan jang sedjudjur-djudjurnja sebagai perdjoangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa. PANTJASILA adalah falsafah kebudajaan kami.

Manifes Kebudajaan

Kaum Komunis mendjundjung kemanusiaan, jaitu kemanusiaan proletariat, kemanusiaan massa Rakjat, sedangkan kaum imperialis dan tuantanah mendjundjung kemanusiaan burdjuis dan kemanusiaan feodal. Dan bila diteliti lebih djauh, kemanusiaan jang di djadja2kan kaum reaksioner itu tidaklah lain daripada akal busuk untuk memperpandjang umur sistim penghisapannja. Oleh karena itu, humanisme kita harus mendidik Rakjat tidak hanja untuk mentjintai, tapi djuga sekaligus untuk membentji, jaitu mentjintai sesama massa Rakjat dan sebaliknja membentji kaum imperialis, kaum tuantanah dan kaum reaksioner lainnja, mentjintai perdjuangan revolusioner untuk merampungkan tugas2 Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar2nja dalam perdjuangan menudju ke Sosialisme dan sebaliknja membentji kaum kotra-revolusioner jang menghalang-halangi terlaksananja tugas tersebut serta berkehendak mempertahankan sistim penghisapan imperialis dan feodal jang ada.

D.N. AIDIT

KATA PENGANTAR

Tatkala pada permulaan tahun 1968 Saudara Yahaya Ismail dalam rangka studinya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia menyatakan keinginannya untuk menulis sebuah skripsi tentang Lekra atau Lembaga Kedudayaan Rakyat, saya menyambut gembira maksudnya itu. Sebab satu studi khusus mengenai organisasi itu belum ada, pada hal ia penting dalam sejarah kesusastraan Indonesia.

Didirikan tahun 1950 Lembaga Kebudayaan Rakyat dari tahun ke tahun tumbuh jadi satu organisasi kebudayaan yang agresif sebagai alat Partai Komunis Indonesia, di samping organisasi-organisasi lainnya yang berafiliasi dengan partai itu. Ini lah alat PKI untuk menguasai lapangan kebudayaan dan kesusastraan dalam usahanya merebut kekuasaan di Indonesia.

Semboyannya "Politik adalah Panglima" dirasakan oleh seniman dan cendekiawan merdeka sebagai ancaman terhadap kebebasan mencipta dan kebebasan berpikir dan ini lah salah satu sebab yang penting maka dicetuskan Manifes Kebudayaan dalam tahun 1963.

Di dalam skripsinya ini Saudara Yahaya Ismail dengan jelas menggambarkan pertumbuhan Lekra dalam hubungannya dengan taktik dan strategi PKI, serta dengan pengaruh pikiran-pikiran pemimpin-pemimpin Komunis RRC dan Soviet Rusia. Ia secara historis membicarakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh Lekra dalam kebudayaan dan kesusastraan, mulai dari tuduhan-tuduhan terhadap seniman-seniman merdeka, melalui berbagai issue plagiat dan heboh-heboh hadiah Sastra, sampai kepada serangan frontal terhadap Manifes Kebudayaan.

Telah beberapa buku terbit mengenai komunisme di Indonesia, antara lain karangan Brackman, Hindley, Kahin, tapi mereka sama sekali tidak menyinggung peranannya di lapangan kebudayaan. Syukurlah skripsi ini sekarang sudah dapat terbit di Malaysia. Mudah-mudahan menjadi cermin, jangan sampai apa yang pernah dialami di Indonesia berulang pula di Malaysia.

H.B. JASSIN

Jakarta, 17 Agustus 1970

PRAKATA

Kesusastraan Indonesia bukanlah kesusastraan yang asing bagi kebanyakan orang di Malaysia. Ia pernah mempengaruhi kesusastraan Melayu sejak tahun tigapuluhan, dan banyak majalah-majalah seperti *Pandji Pustaka* dan roman-roman yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dibaca oleh siswa-siswa di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Dapat dikatakan bahwa perkembangan puisi Melayu sedikit banyak dipengaruhi oleh puisi-puisi Indonesia dewasa itu.

Perjuangan politik bangsa Indonesia diikuti juga oleh pemuda-pemuda Melayu dari Malaya. Bahan-bahan bacaan dari Indonesia yang mengalir ke Malaya memberi semangat yang bukan sedikit kepada setengah dari mereka. Tidak kurang pula kekaguman mereka terhadap perjuangan kemerdekaan yang gigih dan berani dari Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta hingga ada antara para siswa dari Maktab tersebut dan juga dari Maktab Teknik di Kuala Lumpur yang menjadi anggota Partai Nasional Indonesia. Malah waktu pihak Belanda melancarkan aksi-aksi militernya terhadap Republik Indonesia yang baru berdiri pada tahun 1945–1949 beberapa orang sastrawan Melayu mencipta drama, puisi dan cerpen yang menunjukkan perhubungan persaudaraan yang erat dan akrab dan rasa simpati terhadap perjuangan yang suci itu. Ada pula yang dibakar semangat perjuangan itu hingga menyeberang Selat Melaka untuk memanggul senapan berjuang bersama-sama patriot bangsa Indonesia.

Skripsi ini hanya sebagai penyambung minat dari seorang anak Melayu terhadap kesusastraan Indonesia. Pada kami kesusastraan Indonesia dan kesusastraan Melayu adalah sama dan tidak harus dipisahkan. Nasib politik, keadaan geografis dan nasib ekonomi kedua bangsa Indonesia dan Melayu membuat kita lebih erat dan saling bantu membantu karena semangat yang terkandung dalam sanubari kita adalah tetap sama, dan kita merasakan tali persaudaraan kebangsaan itu.

Sudah pasti banyak golongan yang membantu kami untuk menyelesaikan penelitian ini dan studi kami di sini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan rasa terimakasih kami yang besar kapada Bapak Drs. H.B. Jassin yang sudi menjadi pembimbing kami hingga dapat kami menyelesaikan studi ini. Di samping itu beliau memberi kepada kami kebebasan yang sepenuhnya dan seluas-luasnya menggunakan dokumentasi kesusastraannya yang sangat berharga itu hingga kami dapat menyelesaikan studi kami. Kami juga berterimakasih kepada Bapak Anton Muljono, S.S. M.A., yang sebagai Ketua Biro Mahasiswa Asing,

Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, banyak memberi nasihat dan petunjuk tentang studi kami di sini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Lembaga Pengelola, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, khasnya kepada Tuan Syed Nasir Ismail, yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendalami kesusastraan Indonesia moden di Universitas Indonesia. Kepada Asia Foundation kami tidak lupa untuk menyatakan terimakasih kami karena memberikan "fellowship" untuk studi kami. Kepada Kepala Lembaga Bahasa Nasional, Dra Nj. S.W. Rudjiati Muljadi, kami mengucapkan berbanyak terimakasih atas kesudian beliau memberikan fasilitas-fasilitas perpustakaan dan lain-lain di Lembaga tersebut. Kepada Heart Sudarmadji kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kami kerana minatnya terhadap penyelidikan ini.

Banyak lagi orang perseorangan yang memberikan pikiran dan bantuan dalam berbagai rupa dan bentuk kepada kami. Kami tidak dapat menyebut nama mereka satu demi satu. Kepada mereka itu kami mengucapkan juga terimakasih kami.

Wassalam.

YAHAYA ISMAIL

Jakarta, 14 Februari 1970.

Singkatan-singkatan yang digunakan dalam Skripsi ini

AMPAI	American Motion Pictures Association
BTI	Barisan Tani Indonesia
BMKI	Badan Musjawarah Kebudajaan Islam
BAKOKSI	Badan Ko-ordinator Ketoprak Seluruh Indonesia
CGMI	Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
GMD	Gerakan Mahasiswa Djakarta
Germindo	Gerakan Mahasiswa Indonesia
GMNI	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GMM	Gerakan Mahasiswa Murba
Gema '45	Gerakan Mahasiswa '45
HSI	Himpunan Sardjana Indonesia
HSBI	Himpunan Seni Budaja Indonesia
HIMPI	Himpunan Pengarang Indonesia
IKAT	Ikatan Kekeluargaan Anggauta Tentera
KSSR	Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner
KKPI	Konferensi Karyawan Pengarang2 seIndonesia
KK–PSI	Konferensi Karyawan Partai Sosialis Indonesia (konotasi politis yang digunakan oleh PKI/Lekra terhadap KKPI)
KPAA	Konferensi Pengarang2 Asia-Afrika
Lekra	Lembaga Kebudajaan Rakjat
Lekkrindo	Lembaga Kebudajaan Kristen Indonesia
LKN	Lembaga Kebudajaan Nasional
Manipol	Manifesto Politik
Nasakom	Nasionalis, Agama dan Komunis
NU	Nahdatul Ulama
OPI	Organisasi Pengarang Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
Perhimi	Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSII	Partai Serikat Islam Indonesia
PKPI	Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia
PTIP	Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Tulisan ini cuba membicarakan beberapa peristiwa penting dalam perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Indonesia moden. Gejala-gejala jang ditimbulkan oleh Lekra dalam sejarah kebudayaan dan kesusastraan Indonesia tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sepanjang pengetahuan kami belum ada lagi suatu penelitian yang mendalam tentang peranan Lekra dalam perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Indonesia. Mengingatkan itulah maka kami cuba membuat suatu penelitian permulaan terhadap organisasi tersebut.

Oleh karena aktivitas Lekra banyak berpusat pada kegiatan politik di mana konsep yang ditrapkan oleh pemimpin-pemimpin dan para pengarang dan pengikutnya ialah "Politik adalah Panglima", maka dalam penelitian ini perkembangan politik Indonesia sejak tahun 1945 akan disinggung di sana sini, di mana dianggap "relevant" dalam pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan politik PKI. Hal ini akan kami ikuti hingga meletusnya Gestapu 30 September 1965 yang lalu.

Di samping itu akan dibicarakan secara mendalam pertumbuhan Lekra sebagai organisasi kebudayaan, dan aktivitas-aktivitas organisasi ini di tengah-tengah perkembangan dan kepesatan kebudayaan dan kesusastraan Indonesia dalam periode itu. Karena Lekra menganut konsep "Politik adalah Panglima" dalam aktivitas budaya dan sastra, maka faktor-faktor politik itulah yang di tekankan dalam penelitian ini. Karangan-karangan kreatif hanya akan dibicarakan sekiranya ia bisa dijadikan contoh untuk lebih memperjelaskan konsep tersebut.

Niat kami yang pertama ialah untuk mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh PKI, Lekra dan LKN agar supaya kami bisa mendapat gambaran-gambaran kulturil dan politik yang mendalam dari kacamata mereka. Sayang sekali niat kami itu terpaksa kami pendamkan saja mengingatkan situasi politik dewasa ini yang tidak memungkinkan kami bertemu dengan mereka. Dengan demikian kami hanya meneliti tulisan-tulisan mereka yang pernah dimuat dalam harian-harian, majalah-majalah dan juga referat-referat mereka yang diterbitkan secara stensilan ataupun dalam bentuk buku.

Karangan ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pelengkap syarat untuk memperoleh "Diploma in Indonesian Studies" (yang disamakan dengan ijazah Sarjana Sastra) pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Kami bagi skripsi ini kepada sepuluh bab. Bab pertama tentang sejarah timbulnja PKI sebagai sebuah partai politik yang sah setelah

Peristiwa Madiun (1948). Bab kedua, tentang lahirnya organisasi kebudayaan Lekra. Bab ketiga, tentang sikap Lekra dalam bidang kulturil yang dihubungkan dengan Revolusi 45, tentang "humanisme universil" dan "seni untuk rakyat" yang menjadi perbincangan hangat antara tokoh-tokoh Lekra dengan sastrawan-sastrawan dan budayawan-budayawan yang non-Lekra. Bab keempat, agitasi Lekra dalam bidang kebudayaan dan kesusastraan. Bab kelima ialah suatu pembicaraan tentang konsep realisme sosialis secara umum, dan bab keenam berkenaan dengan penerapan realisme-sosialis oleh pengarang-pengarang Lekra dalam kesusastraan dan kebudayaan. Oleh sebab terdapat ciri-ciri persamaan di dalam konsep kulturil dari sastrawan Sitor Situmorang, maka pada bab ketujuh dibicarakan pula konsep Manipol yang ditrapkan Sitor Situmorang di dalam kesusastraan. Dalam bab kedelapan dibicarakan reaksi kulturil dari seniman-seniman dan cendekiawan-cendekiawan Indonesia terhadap konsep realisme-sosialis Lekra itu, dan dalam bab ini dibicarakan secara khusus konsep kulturil mereka yang dikenal dengan nama *Manifes Kebudayaan* itu. Dekrit Presiden 8 Mei 1964 dan kesannya dalam bidang kebudayaan dibicarakan pada bab kesembilan. Bab kesepuluh merupakan suatu epiloog.

Oleh karena terdapat berbagai ejaan untuk nama-nama orang dalam bahan-bahan dokumentasi yang diteliti, maka penulis mengambil kebijaksanaan dengan menggunakan satu macam ejaan saja bagi nama-nama yang diperkatakan itu. Misalnya, terdapat berbagai ejaan tentang nama Pramoedya Ananta Toer, dan juga tentang Boejoeng Saleh. Penulis menggunakan ejaan di atas untuk kedua pengarang tersebut.

Kami berharap dengan pembicaraan secara historis seperti yang terkandung pada bab-bab di atas akan dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang pengaruh, peranan, taktik dan filsafat yang menggerakkan Lekra itu.

BAB PERTAMA

PKI SETELAH PERISTIWA MADIUN, 1948

Beberapa waktu setelah Republik Indonesia diproklamirkan, partai-partai politik pun menjalankan kegiatan mereka guna mencari pengaruh di kalangan massa rakyat. Walaupun pada prinsipnya semua golongan cintakan kemerdekaan tanahair, namun kelihatan juga tanda-tanda ketidakpuasan di kalangan politikus-politikus kiri seperti Amir Sjarifuddin yang mendirikan Front Demokrasi Rakjat, satu pecahan dari Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Dalam masa ketegangan antara Republik Indonesia yang masih muda itu dengan pemerintah kolonial Belanda inilah datangnya seorang tokoh komunis veteran dari Uni Soviet. Tokoh tersebut ialah Musso, seorang komunis yang lama bermukim di Moskwa selama 20 tahun. Bila ia kembali ke Indonesia ia dengan segera diterima sebagai tokoh dan pemimpin PKI.[1] Bersama-sama dengan Amir Sjarifuddin dan pengikut-pengikut komunis yang lain mereka mengadakan suatu pemberontakan berdarah di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Dalam pemberontakan yang gagal ini Musso terbunuh, dan Amir Sjarifuddin bersama dengan sembilan tokoh komunis yang tertangkap dihukum mati di desa Ngalihan, dalam kelurahan Lalung dalam wilayah kabupaten Solo.[2]

Peristiwa Madiun itu meninggalkan imej yang buruk terhadap PKI.

---

1. Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951–1963*, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1964, hal. 20.
2. Lihat Lt. Col. Sunardi L.D.M. *Lecture on The September 30 Movement, The Indonesian Communist Party and the Elimination of the Communists in Indonesia*. Djakarta: Departmen Penerangan R.I. 26 April 1969, stensilan, h. 15.

Tapi imej yang buruk itu tidak lama mendekap pada ingatan kebanyakan rakyat bila timbul pucuk pimpinan PKI yang muda, terdiri dari tiga tokoh terkenal—Dipo Nusantara Aidit, Lukman dan Njoto. D.N. Aidit yang melarikan diri keluar negeri setelah kegagalan pemberontakan Madiun, kembali ke tanahair dan sejak tahun 1951 dilantik sebagai sekretaris-jeneral PKI. Dalam pembentukan Politbureau ini D.N. Aidit duduk sebagai ketua, dan diikuti oleh wakil ketua I dan II oleh Lukman dan Njoto. Dalam Comite Central PKI terdapat susunan seperti berikut: D.N. Aidit sebagai ketua, dan anggota-anggota lain terdiri dari Lukman, Njoto dan Sudirman. Di samping sebagai anggota Comite Central Njoto juga menjadi ketua dalam bidang "agitprop" atau propaganda.[3] Aidit menyadari bahwa pemberontakan bersenjata saja tidak mungkin membawa kemenangan kepada PKI. Taktik baru yang diambilnya ialah "agitasi, organisasi dan mobilisasi massa".[4]

Berkat ketekunan dan dedikasi dari pucuk pimpinan PKI yang baru, partai tersebut dapat meluas dan menyibarkan pengaruhnya dalam masa kabinet Ali Sastroamidjojo (Juli 1953–Juli 1955). Pada waktu itu PKI dapat pula menguasai BTI yang mempunyai anggota sebanyak 200,000 orang di samping mendapat dukungan dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. SOBSI yang di bawah pimpinan Njoto dengan sendirinya menjadi organisasi buruh yang kuat bagi PKI.

Menurut statistik PKI anggotanya berjumlah 7,910 pada bulan Maret 1952, dan angka ini bertambah menjadi 100,000 pada bulan September 1952. Angka ini meningkat lagi dari bulan Maret hingga bulan November 1954 yaitu dari 165,206 menjadi 500,000 orang. Waktu D.N. Aidit menghadhiri Kongres Partai Komunis Uni-Soviet yang keduapuluh pada tahun 1956, ia dengan bangga berucap "atas nama sejuta anggota komunis".[5]

Sebagai taktik politik PKI dalam percaturan politik Indonesia Aidit ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa PKI berjuang atas garis perlembagaan negara, dan "menggunakan djalan2 damai dan demokratis"[6] dalam tindaktanduk politiknya. Dengan demikian PKI sanggup menerima Undang-undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai falsafah negara, di mana 'sila' yang pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa.

---

3. *Ibid.*, h. 17.
4. Lihat Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism. A History*. New York: Frederick A. Praeger, 1965, h. 207–214.
5. Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press. 1962, h. 407–408.
6. Lihat *Almanak Lembaga2 Negara dan Kepartaian*. Djakarta: Departemen Penerangan, 1961, h. 461.

Kabinet Ali Sastroamidjojo lebih menekankan aspek-aspek politik dari aspek-aspek ekonomi dan administrasi seperti mana yang menjadi dasar kabinet Hatta. Ini disebabkan karena PNI berorientasi kepada politik Soekarno.[7] PKI mempergunakan kesempatan dalam periode kabinet Ali Sastroamidjojo untuk mengeksploitirkan gagasan-gagasan politik Soekarno bagi kepentingan PKI sendiri. Tambahan pula PNI melanjutkan ajaran-ajaran "marhaenisme" dari Soekarno itu. Justru itu segala usaha pemerintah seperti meningkatkan aksi-aksi politiknya untuk membebaskan Irian Barat, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing, mengambil garis politik kiri anti-Amerika dan imperialisme dan kolonialisme disokong dan didukung dengan penuh semangat oleh PKI. PKI menyokong segala usaha-usaha demikian karena aksi-aksi itu bersesuaian dengan konsep perjuangannya seperti yang ditegaskan di sini.

> "Seluruh pekerdjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme dan bertudjuan dalam tingkat sekarang mentjapai Sistim Demokrasi Rakjat di Indonesia. Sedangkan tudjuannja jang lebih landjut ialah mengudjudkan masjarakat Sosialis dan masjarakat Komunis di Indonesia. Sistim Demokrasi Rakjat ialah sistim Pemerintahan gotong-rojong dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat, sedangkan masjarakat Sosialis ialah masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia jang disesuaikan dengan kondisi2 Indonesia dan masjarakat Komunis ialah masjarakat adil dan makmur sebagai tingkatan jang lebih tinggi daripada masjarakat Sosialis".[8]

Melalui "agitasi, organisasi dan mobilisasi massa" pengaruh PKI dalam arena politik Indonesia menjadi semakin menanjak. Pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan di Sulawesi serta pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan di Aceh memberi "issue-issue" baru pada PKI untuk tampil kemuka sebagai partai politik yang radikal, dan secara licik menyingkirkan saingannya yaitu PSI dan Masjumi yang dituduh sebagai pendalang-pendalang pemberontakan-pemberontakan tersebut. Kegagalan pemberontakan PRRI/Permesta dan Darul Islam melenyapkan PSI dan Partai Masjumi dari gelanggang politik nasional. Demikianlah PKI menjadi partai politik yang terkemuka dan revolusioner selepas pembubaran PSI dan Masjumi.

---

7. Lihat Gerald S. Maryanov, *Politics in Indonesia, An Interpretation.* (Papers on South East Asian Subjects, no. 7). Kuala Lumpur: University of Malaya, 1966, h. 17.

8. Lihat *Almanak Lembaga2 Negara dan Kepartaian*, h. 461.

Memang PKI adalah partai politik yang terbesar dan berpengaruh. Di Jawa Tengah banyak sekali terdapat anggota-anggota dan pengikut-pengikut PKI.[9] Sebagai partai politik yang baik disiplinnya PKI bisa melancarkan segala macam tindakan politik, ekonomi dan sosial untuk melaksanakan tujuan-tujuan partai. Tambahan pula diwaktu itu keadaan politik dan ekonomi di Indonesia paling tidak stabil. Dalam masa 15 tahun dari 1945 hingga dengan 1959, Indonesia mengalami 18 perubahan kabinet.[10] Akhirnya Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan melaksanakan "demokrasi terpimpin" seperti yang dipidatokannya pada 17 Agustus 1959. Pidato negara 17 Agustus 1959 ini membuka sejarah baru bagi politik Indonesia yang berdasarkan Manipol-Usdek.[11] Konsep pemerintahan yang berdasarkan Dekrit Presiden didukung oleh PKI karena PKI melihat lebih banyak kesempatan-kesempatan baginya untuk mendominisir politik nasional. Sejak 1959 hingga meletusnya Gestapu 30 September 1965 PKI merupakan partai politik yang terkuat di Indonesia.

Oleh karena ide-ide politik yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato-pidatonya menjadi bahan indoktrinasi negara, maka PKI memperalatkan konsep Manipol-Usdek Soekarno itu untuk dilaksanakan kabinet Nasakom. Segala yang bersumber pada barat khasnya Amerika dan Belanda dianggap unsur-unsur "imperialisme dan neo-kolonialisme". Dalam bidang kebudayaan PKI/Lekra mendesak supaya kembali kepada kepribadian nasional seperti mana yang diucapkan oleh Soekarno. Dalam bidang ekonomi terpimpin PKI mendesak dijalankan land-reform dan membarui undang-undang agraria yang mengutamakan kaum tani yang tidak bertanah. Sokoguru utama PKI ialah kaum tani dan kaum buruh.[12] Inilah garis perjuangan PKI yang mendapat sokongan kuat dari anggota-anggota dan simpatisan-simpatisannya.

Selepas tahun 1959 Soekarno lebih condong kekiri dalam tindakan-tindakan politiknya. D.N. Aidit, Lukman dan beberapa orang tokoh

---

9. Lihat John Hughes, *Indonesian Upheavals*. New York: David McKay Co., Inc., 1967, h. 85.
10. Lihat S.M. Amin, *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Djakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 53.
11. Literatur tentang Manipol-Usdek banyak sekali diterbitkan, baik oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia maupun oleh penerbit-penerbit swasta. Untuk keterangan lanjut bacalah *Bahan2 Pokok Indoktrinasi*. Cetakan ke 2. Djakarta: Jajasan Prapantja, 1964, h. 97–155.
12. Lihat D.N. Aidit, *Revolusi Indonesia: Latarbelakang Sedjarah dan Haridepannja*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan", 1964, h. 69.

PKI yang terkemuka diajak masuk ke dalam kabinet sebagai menteri. PKI menyokong penuh indoktrinasi ajaran-ajaran Soekarno dibidang pendidikan dan lain-lain bidang kehidupan bangsa seperti yang pernah diucapkan Soekarno dalam pidatonya "Djalannja Revolusi Kita" (Djarek) yang berbunyi: "...Saja komandokan kepada semua sekolah-sekolah dan Universitas-universitas, supaja semua murid mahasiswa di-USDEK-kan dan di Manipolkan!"[13] Menurut Lt. Col Sunardi sejak tahun 1951 hingga dengan 1965, PKI telah sukses membuat infiltrasi dan penetrasi ke dalam 133 institusi-institusi resmi dan tidak resmi, dan di dalam organisasi-oranisasi pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.[14] Periode ini memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang menjurus ke dalam kamp komunis. Klimak dari tindakan politik Soekarno ialah direalisirkannya gagasan politik kiri Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Udara mendung dan terror menguasai suasana alam Indonesia.

13. Lihat *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, hl. 298.
14. Sunardi, *op. cit.*, hl. 53.

bab I: 1. kegagalan Madium menyebabkan mereka mencari jalan lain.
2. udara kabinet Ali (yg. pentingkan politik) dan politik Sukarno diterima dg. hangat oleh PKI dibawah Aidit (gagasan: Nasakom, manipol, Demokrasi Terpimpin)
cf. h. 37-38

BAB KEDUA

TIMBULNYA LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)

Sebagai sebuah organisasi yang didalangi oleh sebuah partai politik kiri seperti PKI, maka organisasi tersebut harus memiliki suatu konsep perjuangan yang selaras pula dengan cita-cita partai. Lekra juga mempunyai konsep perjuangan yang diberi nama "Mukaddimah". Kalimat pertama dalam "Mukaddimah" tersebut menjelaskan maksud eksistensi Lekra itu. Ia menjelaskan bahwa "...Rakjat adalah satu2nja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh Rakjat, maka pada 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat". (Lihat lampiran A tentang "Mukaddimah" ini).

Menurut sumber Lekra, Lekra didirikan setelah kurang lebih 15 orang peminat-peminat dan pekerja kebudayaan di Jakarta menerima baik "Mukaddimah" dan konsepi Lembaga Kebudayaan Rakyat.[1] Bahwa PKI mempunyai rencana politik kulturil yang paling sistimatis dan terorganisasir baik dapat dibuktikan dari partisipasi D.N. Aidit dan Njoto pada pembentukan Lekra. Menurut Joebaar Ajoeb sebagai Sekretaris Umum Lekra dalam lapuran umum Pengurus Pusat Lekra kepada Kongres Nasional ke I Lekra di Solo (dari 22–28 Januari 1959) Lekra didirikan "atas inisiatif kawan2 D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta dan Njoto."[2] Ini tidaklah menghairankan kita karena dasar PKI

---

1. Lihat *Lekra dalam menjambut Kongres Kebudajaan Bandung, 6–11 Oktober 1951*. (Sebuah pamplet kecil), 48 halaman.
2. Lihat *Laporan Kebudajaan Rakjat (I)*. Djakarta: Lekra, 1959, h. 13.

di bawah pimpinan Aidit ialah melaksanakan "agitasi, organisasi dan mobilisasi massa".

Aktivitasnya sebagai organisasi politik kulturil dapat kita lihat dari pesatnya kader-kader kebudayaan Lekra mendirikan cabang-cabang Lekra. Pada tahun 1951 saja cabang-cabang Lekra dapat didirikan di Surabaja, Medan, Jogjakarta, Solo, Bogor, Subang, Bandung, Tjiribon, Semarang, Klaten, Pati, Pekalongan, Tuban, Malang, Purwokerto, Bukittinggi, Palembang, Menado, Tjomal dan Balik Papan. Pusat adalah di Djakarta.[3]

Pada permulaannya Sekretaris Pusat Lekra terdiri dari A.S. Dharta, M.S. Ashar, dan Herman Arjuno (masing-masing sekretaris I, II dan III). Henk Ngantung, Njoto dan Joebaar Ajoeb menjadi anggota pada Sekretariat Pusat ini. Aktivitas-aktivitas kebudayaannya terdiri dari seksi-seksi sastra, senirupa, senisuara, senidrama, filem, filsafat dan olahraga. Untuk memperlicinkan perjalanan organisasi setiap cabang Lekra mempunyai seorang wakil duduk dalam Pimpinan Pusat. Majalah Lekra diterbitkan tiap minggu sebagai lampiran pada *Zaman Baru* dan *Republik* (keduanya diterbitkan di Surabaja) dalam *Harian Rakjat* (Djakarta), *Sunday Courier* (Djakarta) dan *Rakjat* (Medan). Sebagai redaksi pada ruangan Lekra ini ialah Iramani, Klara Akustia dan M.S. Ashar.[4]

Adalah menjadi cita-cita PKI untuk menarik sebanyak-banyak kaum seniman, pengarang dan cendekiawan ke dalam kelompoknya. Sekiranya PKI bisa mempengaruhi banyak seniman-seniman dan budayawan-budayawan yang terkenal kemungkinan besar propagandanya dapat diperkembangkan dengan lebih baik lagi. Pada waktu pembentukan Lekra seniman-seniman yang non-Lekra seperti H.B. Jassin dan Achdiat Kartamihardja juga diundang sebagai pemerhati.[5]

Memang kalau dipandang sepintas lalu orang tidak akan menyangka bahwa Lekra adalah organisasi kulturil di bawah arahan PKI. Beberapa tahun setelah pembentukan Lekra para pendukungannya tidak pernah mengungkapkan bahwa Lekra di bawah PKI, walaupun nada dan konsep perjuangan kulturilnya mirip dengan konsep perjuangan PKI. Tapi bila PKI menjadi partai politik yang terkuat dan berpengaruh selepas tahun 1959, Aidit, dalam pidatonya pada malam resepsi pembukaan

---

3. *Lekra dalam menjambut Kongres Kebudajaan, op., cit.*
4. *Ibid.*
5. Keterangan ini didapati dari Ajip Rosidi yang memberikan perasarannya dalam sebuah foram berjudul "Catatan2 mengenai perkembangan sastra moderen Indonesia selama 40 tahun" yang diadakan di Taman Ismail Marzuki, Djakarta, pada tanggal 14 November 1968.

KSSR yang dihadhiri juga Presiden Soekarno, membuka keduk PKI dengan berkata:

"KSSR ini baru pertama kalinja diselenggarakan oleh PKI. Tapi dengan ini tidak berarti bahwa PKI baru meletakkan dasar2 bagi pekerdjaan dibidang sastra dan seni. Dengan berdirinja Lekra 14 tahun jang lalu mulailah dengan sedar PKI mengibarkan tinggi pandji2nja "Seni untuk Rakjat" atau "Seni untuk Revolusi" seperti jang djuga mendjadi gagasan Bung Karno. Dan sedjak itu offensif kebudajaan Rakjat dilantjarkan dengan lebih terpimpin, sehingga makin hari makin besar djumlah kubu pertahanan kebudajaan musuh jang diserbu dan ada jang sudah dapat dihantjurkan".[6]

Dapat kita gambarkan betapa agresifnya pekerjaan kebudayaan PKI melalui Lekra. Tidak ada kompromi dengan unsur-unsur kebudayaan lain atau dengan cita-cita kebudayaan yang tidak berporoskan kaum tani dan kaum buruh. Setiap unsur kebudayaan yang dianggap menentang cita-cita partai harus dibasmikan. Kemenangan kulturil adalah juga sebahagian dari kemenangan partai. Demikianlah dalam suatu risalah PKI dinyatakan tentang kebudayaan seperti berikut.

"Pekerdjaan dibidang kebudajaan djuga telah mentjapai sukses2 besar. Lekra, organisasi kebudajaan revolusioner jang didirikan pada tahun 1950, telah membuka front perdjuangan baru di bidang kebudajaan dalam rangka perdjuangan melawan imperialisme dan feodalisme, sebagai sjarat untuk membangun kebudajaan".[7]

Ideologi komunis dalam Lekra — Tidak bisa kita membicarakan aktivitas-aktivitas kulturil Lekra tanpa membicarakan juga ideoloji politik komunisme. Pada golongan komunis segala aktivitas-aktivitas itu harus memancarkan politik ideoloji partai. Beriringan dengan konsep partai komunis internasional di mana *Manifesto Komunis* beserta dengan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme menjadi pegangan dalam perjuangan mereka, maka dalam bidang kebudayaan kaum komunis juga mempunyai konsep perjuangan. Lekra mempertengahkan konsep perjuangan kulturilnya dalam "Mukaddimah" yang mempunyai garis-garis politik kiri, di mana antara lain dinyatakan:

"Revolusi Agustus 45 membuktikan bahwa pahlawan2 di dalam peristiwa bersedjarah ini, seperti halnja di dalam seluruh sedjarah bangsa kita, tiada lain adalah rakjat. Rakjat Indonesia dewasa ini

---

6. Lihat Dipa Nusantara Aidit, "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bina kebudajaan jang berkepribadian Nasional," *Zaman Baru* (Disember 1964), h. 1–3.
7. Lihat *Tesis 45 Tahun PKI*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan", 1965, h. 12.

adalah semua golongan di dalam masjarakat jang menentang pendjadjahan. Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri rakjat Indonesia dari pendjadjahan dan peperangan, pendjadjahan serta penindasan feodal."[8]

Sudah jelas bahwa aspek-aspek politik itulah yang lebih ditekankan dalam aktivitas-aktivitas kulturil Lekra. "Mukaddimah" serta Konsep Kebudayaan Rakyat yang menjadi pedoman dalam kegiatan kulturil itu merupakan manifestasi dari ideoloji komunisme tersebut.

Njoto dalam pidato sambutannya yang berjudul "Revolusi Adalah Api Kembang" berpendapat bahwa hanya ada dua pertentangan antara dua asas besar: "kebudajaan Rakjat dan kebudajaan bukan Rakjat. Djalan ketiga tidak ada."[9] Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa:

"Tidak bisa pandji kebudajaan Rakjat berkibar dengan megah djika tidak terlebih dahulu dirobek2 pandji2 kebudajaan bukan Rakjat. Ini harus senantiasa mendjadi kejakinan kita dan kejakinan jang mentulangsumsum. Laginja kebudajaan bukan Rakjat itu sebenarnja bukan kebudajaan. Lebih2 lagi kebudajaan bukan Rakjat itu sekaligus anti-keduaanja: Anti-Rakjat dan anti-kebudajaan".[10]

Sebagai seorang anggota Comite Central PKI kita tidak heran sekiranya Njoto mempunyai sikap kulturil yang demikian. Rakyat, pada pengertian komunis, ialah golongan-golongan manusia tertindas dan terhisap yaitu kaum buruh dan tani. Njoto melihat problim kulturil Indonesia dari aspek Marxisme yang berdasar pada tiori "pertentangan kelas". Justru itu sebagai seorang komunis yang konsekwen ia tidak bisa menerima struktur kulturil yang tidak menggambarkan "kemenangan" kulturil golongan-golongan yang terhisap dan tertindas itu.

Njoto lebih lanjut lagi menjelaskan pengertian kebudayaan rakyat demikian:

"Soal jang sangat menggembirakan dari kongres kita ini adalah bahwa masalah hubungan antara politik dan kebudajaan, antara perdjuangan politik dan perdjuangan kebudajaan, diletakkan pada tempatnja jang semestinja. Ini sangat penting. Tepat benar jang dinjatakan oleh Laporan Umum bahwa politik tanpa kebudajaan masih bisa djalan, tapi kebudajaan tanpa politik tidak. Dalam segala kegiatan sembojan kita haruslah "Politik adalah Panglima"."[11]

pengertian rakyat bg. komunis

kebudayaan politik

---

8. Lihat "Mukaddimah" Lekra dalam *Laporan Kebudajaan Rakjat (I)*, h. 67.
9. *Ibid.*, h. 54.
10. *Ibid.*, h. 55.
11. *Ibid.*, h. 56.

Konsep "Politik adalah Panglima" dilaksanakan dalam segala aspek penciptaan dan persoalan kebudayaan. Politik adalah induk segala-galanya. Nugroho Notosusanto, seorang ahli sejarah Indonesia, dalam menanggapi arti "Politik adalah Panglima" berkata:

> "Kiranja kita tahu, bahwa jang dimaksudkan oleh kaum komunis (termasuk LEKRA) dengan sembojan "Politik adalah Panglima" ialah, bahwa kegiatan tjipta dibidang seni, sastra, falsafah, dll., harus tunduk kepada petundjuk2, ketentuan2 dan larangan2 Partai, jakni Partai Komunis. Apa jang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan garis Partai, dengan serta merta dilarang dan ditumpas."[12]

Sebagai suatu komando dari PKI kita melihat perkembangan pentrapan konsep "Politik adalah Panglima" dalam aktivitas-aktivitas Lekra. Resolusi-resolusi yang diluluskan dalam Kongres Nasional Pertama, Lembaga Kebudajaan Rakjat yang bersidang di Sriwedari, Solo, pada tanggal 28 Januari 1959, menjelaskan lagi konsep politik Lekra itu. Antara lain dinyatakan:

> "Pengalaman2 selama ini membuktikan, bahwa arah kegiatan jang satu2nja azas jang tepat dan bahwa mendjundjung tinggi azas ini mengandung keharusan untuk senantiasa lebih hebat memerangi kebudajaan bukan-Rakjat, terutama "kebudajaan" imperialis dan feodal....
>
> Kongres membenarkan bahwa pekerdja2 kesenian Lekra harus terus-menerus meningkatkan mutu ideologi dan mutu artistiknja, dan bahwa perkerdja2 ilmu Lekra harus terus-menerus meningkatkan mutu ideologi dan mutu kedjuruannja.... Kongres membenarkan bahwa politik dan kebudajaan tidak mungkin dipisahkan, melainkan diperpadukan, dan bahwa patriotisme dan internasionalisme tidak harus dipisahkan, melainkan diperpadukan".[13]

Orang-orang dari partai komunis, di sini PKI, tidak bisa semuanya mengambil bagian yang aktif dalam bidang kebudayaan. Sebagai wadah komunis Lekra dipergiatkan untuk merangkum kaum intelektuil Indonesia yang bersimpati dengan perjuangan PKI. Dalam organisasi Lekra terdapat sarjana-sarjana, sastrawan-sastrawan dan wartawan-wartawan yang bisa dianggap sebagai "promoters" gagasan pikiran dan cita-cita PKI. Tapi mempunyai kaum cendekiawan saja tidak mencukupi. Ide-ide komunis harus pula meresap sampai kedaerah-daerah, ke-

---

12. Lihat Nugroho Notosusanto, *Bidang Sosial-Budjaa dalam rangka Ketahanan Nasional*. Djakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Lembaga Sedjarah Hankam, 1968, h. 12.
13. *Laporan Kebudajaan Rakjat* (*I*) *op. cit.*, h. 69.

desa-desa lewat drama-drama tradisionil dan perwayangan. Justru itu Lekra menampung juga anggota-anggota pewayangan dan pedalangan. Di samping itu Lekra juga menampung kaum seniman dan pelukis karena golongan ini pun bisa memancarkan cita-cita komunisme dalam lukisan-lukisan dan poster-poster mereka. Dengan lain perkataan, PKI melalui front kebudayaannya, Lekra, memberi penampungan kepada segenap golongan pencipta kebudayaan dan golongan intelektuil dari peminat drama tradisionil sampailah kepada golongan sarjana. Apa yang diidam-idamkan PKI ialah anggota-anggota Lekra dan simpatisan-simpatisannya bisa menggerakkan lewat kegiatan kebudayaan mereka ide-ide yang dapat memperdekatkan lagi komunisme kepada rakyat.

Taktik politik yang sama lebih dahulu dilakukan oleh pemimpin komunis Republik Rakyat Tiongkok, Mao Tse-tung dalam pidatonya di Forum Yenan atas Hal Seni dan Kesusastraan pada tahun 1942. Di situ Mao menegaskan bahwa seni dan sastra harus mencerminkan perjuangan kaum buruh, tani dan prajurit. Dengan panjang lebar Mao menjelaskan bahwa empat golongan masyarakat harus diungkapkan dalam penciptaan seni dan sastra—pertama-tama kaum buruh, kedua kaum tani, ketiga kaum prajurit dan keempat kaum inteligensia kecil yang menyokong perjuangan komunis.[14]

Penyair dan politikus Mao Tse-tung bukan hanya memberikan konsep penciptaan seni dan sastra yang berlandaskan filsafat komunisme tapi ia juga memberikan instruksi kepada pekerja-pekerja kebudayaan Cina tentang pentrapan konsep itu supaya dipahami, dipelajari oleh golongan buruh, tani dan prajurit. Menyedari bahwa tingkat penciptaan dan apresiasi golongan buruh, tani dan perajurit itu tidak begitu tinggi, maka Mao menggesa kaum seniman dan sastrawan turun ke bawah (turba) menghayati segala unsur-unsur penciptaan agar kreasi-kreasi mereka itu berfaedah dan dapat dipahami oleh golongan proletar tersebut. Yang penting, Mao menegaskan, setiap seniman harus mempunyai ideologi yang betul, dan melihat segala-galanya dari kepentingan kaum proletar dalam karya-karya mereka. Mereka harus mendedahkan watak-watak yang buruk dalam penciptaan mereka, dan menurut pengertian Mao, watak-watak yang buruk itu adalah terdiri dari kaum penghisap, agresor-agresor dan bukan dari golongan proletar. Seterusnya Mao berkata, "Segala gejala buruk yang membahayakan massa rakyat hendaklah didedahkan, dan segala perjuangan revolusioner dari massa

14. Lihat Anne Fremantle, *Mao Tse-tung: An Anthology of His Writings*. 2nd print. A Mentor Book, 1963 p. 242–263.

rakyat hendaklah dipuji. Inilah tugas utama bagi seniman dan pengarang-pengarang yang revolusioner.[15] Dengan lain perkataan, Mao menganggap kesusastraan hidup hanya untuk politik, ditafsirkan dari "class politics and mass-politics" dan bukan untuk hiburan.[16]

Ide kulturil yang senada dengan Mao Tse-tung juga pernah diungkapkan oleh Fidel Castro, Perdana Menteri Cuba. Dalam menanggapi seorang revolusioner, Castro antara lain berkata:

> ...seorang revolusioner menempatkan sesuatu di atas segala soal lainnja; seorang jang revolusioner menempatkan sesuatu bahkan di atas semangat mentjiptanja sendiri; seorang seniman jang sangat revolusioner ialah seorang jang bersedia mengorbankan panggilan seninja untuk Revolusi."[17]

Sependapat dengan Mao, Castro juga mengungkapkan bahwa rakyat jelata harus dipentingkan dan diperjuangkan. Castro berkata:

> "Kalau seseorang tidak berpikir tentang rakjat dan untuk rakjat, jakni kalau seseorang tidak berpikir dan bertindak untuk segolongan besar massa rakjat jang dihisap, untuk massa rakjat jang hendak kita selamatkan, maka orang seperti itu tidak mempunjai sikap jang revolusioner."[18]

Tokoh komunis Indonesia, D.N. Aidit juga tidak ketinggalan memberikan pedoman-pedoman dan instruksi-instruksi kepada kader-kader komunis dan perkerja-pekerja kebudayaan di dalam Lekra seperti mana yang dilakukan oleh Mao dan Castro. Dalam pidatonya pada KSSR atas prakarsa PKI pada tanggal 28 Agustus 1964 di Djakarta, D.N. Aidit berkata:

> "Kaum Komunis mendjundjung kemanusiaan, jaitu kemanusiaan proletariat, kemanusiaan massa Rakjat, sedangkan kaum imperialis dan tuan tanah mendjundjung kemanusiaan burdjuis dan kemanusiaan feodal. Dan bila diteliti lebih djauh, kemanusiaan jang didjadjakan kaum reaksioner itu tidaklah lain daripada akal busuk untuk memperpandjang umur sistim penghisapannja. Oleh karena itu, humanisme kita harus mendidik Rakjat tidak hanja untuk mentjintai, tetapi djuga sekaligus untuk membentji, jaitu mentjintai sesama massa Rakjat dan sebaliknja membentji kaum imperialis,

---

15. Anne Fremantle, *ibid.*, p. 260.
16. Lihat Stuart R. Schram, *The Political Thoughts of Mao Tse-tung*. 2nd print. New York: Frederick A. Praeger, 1964, p. 212.
17. Lihat Fidel Castro, *Revolusi dan Masalah Kebudajaan*. Terdjemahan Saini K.M. dan Toto S. Bachtiar. Bandung: Penerbit Pertiwi, 1963, h. 13.
18. Fidel Castro, *ibid.*, h. 15.

kaum tuantanah dan kaum reaksioner lainnja, mentjintai perdjuangan revolusioner untuk merampungkan tugas2 Revolusi Agustus 1945 sampai keakar2nja dalam perdjuangan menudju ke Sosialisme dan sebaliknja membentji kaum kotra-revolusioner jang menghalang-halangi terlaksananja tugas tersebut serta berkehendak mempertahankan sistim penghisapan imperialis dan feodal jang ada."[19]

Sebagai usaha untuk menyelaraskan perjuangan kaum komunis dengan Manipol-Usdek Presiden Soekarno yang menggesa kembali kepada "kepribadian nasional dalam kebudajaan", Aidit menegaskan dalam pidatonya bahwa:

"Sastra dan seni jang berkepribadian pada hakekatnja adalah perwudjudan patriotisme di bidang sastra dan seni. Dan patriotisme kita adalah patriotisme proletar, patriotisme sosialis atau patriotisme progresif, jaitu *patriotisme jang mentjintai tanahair dan di atas segala-galanja mentjintai Rakjat Indonesia serta membela kepentingan2 mereka terhadap kaum penghisap*."[20]

Sejiwa dengan Mao Tse-tung, Aidit tidak melupai satu golongan rakyat lagi yang menurut pendapatnya adalah dari golongan terhisap juga. Golongan ini ialah golongan perajurit. Tentang peranan perajurit ini, Aidit berkata:

"...selama ini masih ada segolongan Rakjat jang belum di perhatikan dan belum kita djadikan objek karja2 sastra dan seni, jaitu *massa pradjurit*. Pada hal setjara politik bagi kita sudah tidak ada soal lagi, mereka pada umumnja adalah Rakjat pekerdja jang memanggul senapan, sebab mereka pada umumnja berasal dari buruh, tani dan Rakjat pekerdja lainnja."[21]

Dengan dimasukkan golongan perajurit sebagai tambahan pada sokoguru PKI yaitu tani dan buruh, kita melihat suatu perkembangan dalam "approach" politik PKI untuk "memikat" perajurit bagi kepentingan politik PKI. Ini mengingatkan kita kepada pidato Mao Tsetung di Yenan pada tahun 1942 yang lalu di mana Mao menjadikan perajurit sebagai salah satu sokoguru perjuangan komunisme. Aidit menyedari bahwa suatu revolusi sosial dan politik tidak bisa sukses tanpa diikutsertakan golongan perajurit di dalamnya. Mengingatkan bahwa

19. Lihat D.N. Aidit, *Dengan Sastra dan Seni jang Berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit.* Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1964, h. 17.
20. D.N. Aidit, *ibid.*, h. 27
21. D.N. Aidit, *ibid.*, h. 30

saingan politik yang hebat terhadap PKI diwaktu rejim Soekarno itu ialah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khasnya Angkatan Darat, maka PKI secara diam-diam menyusup masuk ke dalam tubuh ABRI, membina perwira-perwira tinggi untuk bersimpati dengan perjuangan PKI. Pidato Aidit pada KSSR dapat dikatakan sebagai suatu "umpan" untuk memancing simpati dari yeaajurit untuk menyebelahi perjuangan PKI. Keadaan ekonomi yang gawat, suasana politik yang menjurus kepada blok komunisme, dan berbagai macam penyelewengan yang berlaku dewasa itu membantu PKI untuk menjadi "juruselamat" bagi rakyat kecil yang juga termasuk golongan perjaurit.

Sebagai catatan dapat dikatakan bahwa taktik-taktik PKI dewasa ini menjadi lebih agresif lantaran ia mengetahui bahwa pengaruhnya mudah menjalar luas diberbagai pelosok kepulauan Indonesia. Sebagai partai komunis yang ketiga besarnya di dunia di samping Uni-Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, PKI mendapat perhatian yang istimewa dari kedua "gergasi" itu. Melihat bahwa keadaan sudah matang untuk meningkatkan aksi-aksi yang militan, maka PKI mengambil jalan politik Mao Tse-tung yang agresif itu, dan menolak konsep "co existence" komunis Uni-Soviet.

Referat D.N. Aidit pada KSSR merupakan sebagai petunjuk jalan kepada kader-kader komunis dan pekerja-pekerja kebudayaan dalam Lekra untuk mempengaruhi rakyat dan menyibarkan konsep komunisme ditengah-tengah rakyat. Aidit menganggap Lekra sebagai organisasi kebudayaan "di bawah pimpinan partai telah berdiri dibarisan paling depan dalam menegakkan prinsip mulia ini (jaitu "berkepribadian dalam kebudajaan") dan dalam mengganjang kebudajaan dekaden imperialis dan feodal."[22]

Sekarang terserahlah kepada para cendekiawan dan sastrawan-sastrawan dan pekerja-pekerja kebudayaan dalam Lekra untuk melaksanakan cita-cita "suci" partai itu. Segala-galanya telah diarah, ditunjuk, diajar oleh ketua partai agar para anggota Lekra tidak tergelincir dari perjuangan PKI tersebut.

Kaum intelek dan pengarang dalam Lekra—V.I. Lenin dalam karangannya *What Is To Be Done* berpendapat bahwa pembentukan tiori dan teknik perjuangan komunisme bermula dari golongan intelektuil dan tidak dilahirkan secara spontan di kalangan massa rakyat.[23] Ini tidaklah

22. Lihat D.N. Aidit, "Kobarkan Ofensif Revolusioner di bidang Kebudajaan". *Zaman Baru*, no. 5, (Mei 1965), h. 1–3.
23. V.I. Lenin, *What Is To Be Done*, Translated by V and Patricia Utechin, Edited, introduced with notes by S.V. Utechin. London: O.U.P. 1963, p. 17

bermakna bahwa kaum buruh dan kaum proletar yang lain tidak bisa mengambil bagian dalam perkembangan tiori sosialis. Mereka bisa mengembangkan tiori-tiori tersebut bilamana tingkat pengetahuan mereka menyamai kaum intelektuil karena rata-rata kaum proletar sangat rendah pengetahuannya. Lebih jauh lagi Lenin menegaskan bahwa partai harus merupakan sebagai "pimpinan politik kaum proletar", dan juga sebagai "guiding force" dalam pergerakan yang menyatu dan mengarahkan perjuangan kaum proletar.[24]

Peranan kaum intelektuil ini juga dipandang penting dalam perjuangan menyibar dan menanamkan pahaman komunisme oleh tokoh komunis Mao Tse-tung. Mao menggalakkan kaum intelektuil supaya turun dari "menara gading" mereka dan mengadakan pengintegrasian dengan kaum buruh, tani dan perajurit. Seorang intelektuil, menurut pendapat Mao, ialah seorang yang bukan saja menelaah buku-buku ilmu pengetahuan, tapi juga aktif dalam kerja-kerja yang praktis seperti yang dilakukan oleh pekerja-pekerja lain. Mereka yang membuat kerja-kerja tiori harus pula aktif dalam penyelidikan-penyelidikan yang praktis. Dengan demikian seorang intelektuil menjadi seorang komunis dan pekerja kebudayaan yang berfaedah dan baik.[25]

Golongan intelektuil didaratan Cina Komunis telah diarah oleh Partai untuk mematuhi cita-cita Partai dan sekaligus mengintergrasikan golongan tersebut dengan kaum buruh, tani, dan perajurit. Mereka diarah untuk mempelajari perkembangan masyarakat menurut metode "dialectical dan historical materialism", dan mempelajari konsep bahwa "sejarah adalah ciptaan buruh". Di samping itu kaum intelektuil disuruh mempelajari tiori-tiori pertentangan kelas, di samping ajaran untuk mengenali tiga musuh besar Partai, yaitu imperialisme, feodalisme dan berokratis imperialisme. Untuk ahli-ahli sejarah mereka diwajib pula mempelajari karangan-karangan Mao seperti "Tentang Praktek" (On Practice), "Tentang Kontradiksi" (On Contradiction), dan "Lapuran tentang satu penelitian Pergerakan Kaum Tani di Hunan" (Report of an Investigation into the Peasant Novement in Hunan) dan lain-lain bahan klasik Marxisme.[26]

Apakah PKI tidak melakukan tindakan yang sama terhadap kaum intelektuil dan pengarang-pengarang serta sarjana-sarjana yang tergolong dalam Lekra, HSI dan CGMI dan sebagainya? Memang ada

---

24. V.I. Lenin, *ibid.*, p. 2.
25. Stuart R. Scharm, *ibid.*, p. 115–120
26. Lihat James P. Harrison, "The Ideological Training of Intellectuals in Communist China", *Asian Survey*, no. 10 (Oktober 1965), p. 491–502.

usaha-usaha PKI untuk menginstruksikan serta meminta kaum intelektuil yang bergabung dalam organisasi-oraganisasi di bawah PKI untuk melaksanakan cita-cita PKI itu. Namun demikian masih kelihatan satu sikap tolak ansur di kalangan Comite Central PKI tentang seniman-seniman dan sastrawan-sastrawan PKI yang kena penyakit "ngeloni ideologi burdjuis ketjil".[27] Tentang sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman yang bersikap demikian, Aidit berkata:

> "Mereka mentjintai kaum buruh dan kaum tani bukan karena mereka sudah sungguh2 mendjadi bagian dari Rakjat pekerdja, tapi karena didorong oleh rasa belas kasihan intelektuil melihat penderitaan kaum buruh dan kaum tani. Titik-tolak mereka2 dalam memandang sesuatu adalah titik-tolak burdjuis ketjil. Tjiptaan merekapun, sekalipun mereka menulis tentang kaum buruh, buruhtani atau tanimiskin, pada hakikatnja, ditudjukan untuk memenuhi selera burdjuis ketjil. Ketika sedang mentjipta mereka diliputi oleh kekuatiran kalau2 si Anu dan si Pulan, maksudnja si Anu dan si Pulan burdjuis ketjil, tidak senang dengan buah tjiptaannja. Orientasi mereka belum orientasi proletariat. Kawan2 yang demikian masih ada dan dalam waktu jang pandjang terus akan ada di dalam Partai kita, karena pintu Partai kita akan terus terbuka bagi mereka jang bukan berasal dari proletariat, termasuk sastrawan dan senimannja."[28]

Sungguhpun terdapat sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman dalam PKI/Lekra yang dianggap "burdjuis ketjil" namun Aidit tidak bisa memusuhi mereka. Hal ini bisa dimengerti bahwa Indonesia dalam kegawatan politik dan ekonomi masih belum dikuasai sepenuhnya oleh PKI. Tindakan-tindakan yang agresif dan militan terhadap kaum intelektuil, pengarang dan seniman seperti yang dilakukan di Uni-Soviet dan di Republik Rakyat Tiongkok itu bisa berlaku karena partai komunis telah berkuasa penuh di sana. Sebab itu PKI sangat hati-hati bila "mengkritik" tindak tanduk golongan intelektuil dan sastrawan di dalam PKI/Lekra. PKI tidak mampu pada waktu itu untuk memusuhi golongan tersebut karena peranan golongan intelektuil di dalam organisasi-organisasi PKI sangat diperlukan pada waktu itu. Sebab itu secara diplomatis Aidit berkata, "Pada umumnja kader2 sastrawan dan seniman kita sudah melalui fase tjinta jang dangkal kepada kaum buruh, tani, pradjurit dan Rakjat pekerdja lainnja."[29]

---

27. D.N. Aidit, *Tentang Sastra dan Seni...*, h. 47.
28. D.N. Aidit, *ibid.*, h. 47.
29. Aidit, *loc. cit.*

Tapi sebagai usaha untuk menunjukkan garis ideologi yang betul kepada kaum seniman dan sastrawan di dalam Lekra, PKI menempatkan Njoto, seorang tokoh komunis yang berstatus wakil ketua II dalam Politbureau PKI yang juga menjadi anggota dalam Comite Central di samping memegang jawatan sebagai ketua propaganda (agitprop) PKI. didalam Lekra.[30] Setiap aktivitas Lekra mendapat perhatian dan petunjuk dari pimpinan PKI dan tokoh-tokoh komunis yang terkemuka. Dengan jalan demikian kewaspadaan terhadap setiap "penyelewengan" dari ajaran-ajaran komunisme bisa dielakkan.

Melihat dari jumlah para pengarang, sastrawan dan para cendekiawan yang menjadi anggota-anggota Lekra atau HSI, maka kami berpendapat bahwa PKI mendapat sukses dalam penggembelengan kaum pengarang, sastrawan dan cendekiawan. Misalnya nama-nama tokoh kesusastraan dan kebudayaan seperti Hr. Bandaharo, Bakri Siregar, Boejoeng Saleh, Utuy Tatang Sontani, Rivai Apin, Agam Wispi, Sobron Aidit, Pramoedya Ananta Toer, S. Rukiah adalah di antara beberapa nama yang terkenal dalam perkembangan kesusastraan Indonesia moden. Di samping itu terdapat Sitor Situmorang seorang penyair Indonesia yang terkemuka, yang pada waktu tersebut menjadi ketua LKN. Dalam HSI terdapat pula seorang tokoh linguistik Indonesia, T.W. Kamil, dan seorang sarjana Jawa Kuno yang kawakan yaitu Prof. Tjan Tjoe Siem.

Memang banyak anggota-anggota Lekra yang terkemuka yang memberi "impact" kepada persoalan-persoalan kesusastraan dan kebudayaan diwaktu itu. Agak sukar bagi kita untuk membicarakan mengapakah setengah dari sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman Indonesia yang terkenal memasuki kamp Lekra.[31] Sekiranya kita meninjau dari segi sosial-politik mungkin kita bisa membuat ramalan-ramalan tentang hal tersebut. Oleh karena keadaan sosio-ekonomik-politik yang parah menyebebkan setengah dari sastrawan dan seniman-seniman itu mencari "perlindungan" dalam organisasi-organisasi di bawah sayap partai politik yang revolusioner diwaktu itu. PKI melalui ormas-ormasnya memberi semangat dan bantuan yang diperlukan malah memberi ke-

---

30. Sunardi, *op. cit.*, h. 17
31. Untuk mengetahui nama-nama anggota Lekra yang duduk dalam Pimpinan Pusat Lekra dan dalam Sekretariat Pimpinan Pusat Lekra sila lihat lampiran-lampiran diakhir penelitian ini. Juga lihat *Laporan Kebudajaan Rakjat* (*I*), h. 85. Juga lihat *Mingguan Api*, th. I, no. 30, tgl. 14 No. 1965 yang memberikan nama-nama anggota Lekra yang hadir dalam KSSR. Juga lihat *Sinar Harapan*, th. VII, no. 2240, tgl. 2 Nov. 1967, yang memberikan nama-nama anggota Lekra yang masih belum diamankan diwaktu itu.

sempatan-kesempatan pada setengah dari mereka untuk naik ke atas.

Apakah semua anggota Lekra itu menjadi anggota-anggota PKI juga? Agak sukar bagi kita untuk menentukannya karena keanggotaan dalam PKI sangat dirahsiakan sekali, apalagi bagi tokoh-tokoh yang terkemuka. Kita hanya bisa mengetahui bilamana sekali sekala timbul masalah keanggotaan dalam PKI yang diucapkan oleh tokoh-tokoh PKI sendiri ataupun oleh sastrawan-sastrawan yang berkepentingan. Tabir kerahsiaan ini adalah satu taktik komunis dalam perjuangannya diarena politik. Demikianlah rakyat Indonesia dikejutkan oleh hasil pengadilan Mahmillub bahwa Jusuf Muda Dalam adalah anggota PKI.[32]

Menurut Njoto bahwa Joebar Ajoeb, Sekretaris Umum Lekra pada tahun 1959, Henk Ngantung dan Sudharsono bukan anggota PKI.[33] Pramoedya Ananta Toer dalam salah satu tulisannya berkata bahwa dia bukan anggota PKI.[34] Walaupun bukti-bukti yang nyata tidak bisa kita perolehi, namun dari tulisan-tulisan dan pidato-pidato yang pernah dibuat oleh tokoh-tokoh Lekra, dapat memberi kesan kepada kita tentang masalah keanggotaan dalam PKI itu. Sekiranya mereka bukan anggota PKI namun dari tindak tanduk mereka kita bisa menganggap bahwa mereka bersimpati dengan PKI dan perjuangannya. Sloganisme-sloganisme politik yang digunakan PKI dan aksi-aksi politik yang digunakan PKI sering mendapat dukungan dari Lekra. Sekiranya PKI menyebut-nyebut tentang "revolusi", tentang "nasakom", tentang "manipol", tentang "land-reform" dan sebagainya, maka tokoh-tokoh Lekra juga membuat imitasi yang sama yang disalurkan lewat tulisan-tulisan, pidato-pidato dan juga karya-karya mereka.

Demikianlah jurubicara Lekra, Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah tulisannya berjudul "Jang harus dibabat dan harus dibangun" (bagian ketiga) dalam menanggapi Manipol antara lain ditulisnya:

> "Di dalam alam Manipol, sastra Indonesia harus berani untuk membebaskan matjam kritik jang menilai sastra dari perspektif ketukangannja. Kritik sastra Indonesia dalam alam Manipol harus bisa memaafkan kekurangan2 jang terdapat didalam ketukangan, bahkan harus mengisi kelemahannja, tapi basis politik, basis ideologi sama sekali tidak boleh meleset....[35]

---

32. Lihat *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam*. Djakarta: Penerbitan Kedjaksaan Agung Bidang Chusus, 1967
33. Lihat *Laporan Kebudajaan Rakjat (II)*. Djakarta: Lekra, 1962 h. 52
34. Lihat Pramoedya, "Djambatan Gantung dan Konsepsi Presiden". *Harian Rakjat*, th. VIII, no. 1684, tgl. 28 Februari 1957.
35. Lihat "Lentera" dalam *Bintang Timur*, th. XXXVI, no. 237, tgl. 7 September 1962

Seorang lagi tokoh Lekra yang terkemuka, Prof. Bakri Siregar, dalam sebuah karanganya berkata, "Kesusastraan kita (Indonesia) adalah mutlak dari revolusi Agustus."[36] Ini adalah pendapat yang populer dikalangan PKI yang menganggap bahwa revolusi Indonesia masih belum selesai. Seorang lagi tokoh LKN yang juga seorang penyair terkenal, Sitor Situmorang, tidak ketinggalan meniupkan sloganisme-sloganisme a la PKI/Lekra dalam tulisan-tulisannya. Ia menolak ciptasastra yang menentang revolusi dan Manipol. Mengambil garis politik PNI/Asu pada waktu itu, Sitor berpendapat, "Sikap nasionalis, seperti mestinja setiap Manipolis dimana perlu dapat membelakang 'nilai artistik' apalagi jang berasal dari alam kontra revolusi. Keperluan sosial politik harus didahulukan".[37]

Seperti mana yang pernah dinyatakan oleh D.N. Aidit bahwa Lekra didirikan atas inisiatif PKI dan, oleh karena itu, Lekra merupakan front kebudayaan PKI. Maka dapat kita nyatakan dengan hati terbuka bahwa anggota-anggota Lekra boleh jadi terdiri dari orang-orang komunis, atau kalau tidak sebagai komunis, adalah terdiri dari orang-orang yang bersimpati dengan perjuangan komunis. Resolusi-resolusi KSSR yang membahas pidato pemimpin PKI, D.N. Aidit, selain dari menyetujui garis-garis perjuangan Partai terhadap penumpasan kebudayaan imperialis, feodalis dan kapitalis, juga menerima dengan baik ide-ide garis politik dalam kebudayaan menurut arahan Partai. Antara lain resolusi itu menegaskan:

> "Pada umumnja, kader2 sastrawan dan seniman kita sudah melalui fase 'tjinta anak djawi' atau tjinta jang dangkal, dan ini harus ditingkatkan mendjadi 'tjinta merpati', jaitu tjinta jang membawa mati, tjinta jang mendalam jang menimbulkan rindu dendam kepada kaum buruh, tani dan pradjurit, dan Rakjat pekerdja lainnja. Rasa tjinta jang demikian ini harus terus menerus ditanamkan dan diperdjuangkan. Semuanja ini adalah soal ideologi. Menjatukan perasaan dan pikiran dengan Rakjat pekerdja hanja mungkin djika kita mengintergrasikan diri dengan mereka, jaitu djika kita membiasakan diri turun kebawah melakukan riset dengan metode 'tiga sama', dan dengan sendjata 'Marxisme-Leninisme' untuk mengungkapkan kontradiksi2 jang tidak mudah kelihatan, kontradiksi2 jang

---

36. Lihat Bakri Siregar, "Pendukungan Sastra pada Repolusi Agustus". *Zaman Baru*, no. 19 (Oktober 1961), h. 3.
37. Lihat Situmorang, "Posisi Nasionalis ditengah-tengah Matjam Phobia Kebudajaan". *Suluh Indonesia*, no. 187, th. 10, tgl. 16 Mei 1963.

ada dalam perasaan dan hati massa".[38]

Di samping mengkomandokan kaum komunis, para seniman dan intelektuil dalam melancarkan cita-cita PKI, resolusi KSSR itu juga menyentuh soal penyakit "ngeloni ideologi burdjuis ketjil" di kalangan kader-kader sastrawan dan seniman. Ini mungkin ditujukan kepada mereka yang masih belum bisa mengindentifikasikan perjuangan komunisme dengan golongan proletar. Sepanjang pengetahuan kami tidak pernah dilancarkan "pengganyangan" terhadap sastrawan, seniman dan cendekiawan Lekra maupun yang menjadi anggota PKI karena ketidakbecusan dalam ideoloji. Tidak pernah diadakan kritik diri dan konfessi di kalangan kader-kader komunis sekiranya mereka melakukan kesalahan seperti mana yang lazim berlaku di Uni-Soviet dan di Republik Rakyat Tiongkok.[39]

Proses indoktrinasi ajaran komunisme itu berjalan terus walaupun di kalangan Lekra terdapat sebilangan anggota yang masih belum kuat keyakinan ajaran-ajaran "Marxisme-Leninisme"nya. Aidit sebenarnya menjalankan dasar yang pernah dipraktekkan dulu oleh Mao Tze-tung sebelum Mao berkuasa dalam politik tanahairnya. Ia membiarkn para cnedekiawan yang bersamanya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kulturil menurut pengalaman mereka sendiri-sendiri, walaupun dasar-dasar itu kurang sesuai dengan cita-cita komunisme. Yang penting ialah kuasa, dan kuasa itu masih belum diperoleh PKI lagi. Yang penting ialah mempunyai suatu gelombang massa yang kuat, terdiri dari golongan intelektuil hingga kepada golongan proletar. Sekiranya kuasa sudah di tangan PKI maka soal "pembersihan" anggota-anggota yang tidak konsekwen dalam perjuangan komunis bisa dilaksanakan. Sebab itu PKI bisa "menerima" pengarang-pengarang yang punya "vested-interest" dalam Lekra. Yang penting bagi PKI yalah supaya ia bisa memperalatkan orang2 itu untuk melaksanakan cita-cita PKI sendiri. Misalnya Pramoedya Ananta Toer adalah salah seorang sastrawan Indonesia yang terkemuka yang dikagumi orang baik ditanahair maupun di luar negeri karena karya-karyanya yang bermutu tinggi. Bila Pramoedya menjadi anggota Lekra dan duduk pula dalam Pimpinan Pusat Lekra, PKI mem-

38. Lihat resolusi KSSR sebagai hasil dari pembahasan referat D.N. Aidit yang berjudul *Dengan Sastra dan Seni jang Berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit.*

39. Untuk keterangan lebih lanjut bacalah Walter N. Vickery, *The Cult of Optimism.* Bloomington: Indiana University Press, 1963. Lihat juga Max Hayward dan Leopold Labenz (ed.), *Literature and Revolution in Soviet Russia 1917-1962.* London: O.U.P., 1963. Juga lihat Cyri Birch, *Chinese Communist Literature.* New York: Frederick A. Praeger' 1963.

peralatkan prestasi Pramoedya itu untuk kerja-kerja politik-kulturil PKI. Waktu rakyat dan pemerintah mempunyai prasangka jelek terhadap bangsa Cina di Indonesia, Pramoedya menulis sebuah buku berjudul *Hoa Kiau di Indonesia*, di mana ia memperjuangkan golongan Cina di Indonesia. Karena jasa-jasanya itu Pramoedya diberikan sebuah pabrik potlot.[40]

Penyair-penyair dan sastrawan-sastrawan yang lain diberikan kesempatan oleh PKI/Lekra untuk melawat kenegara-negara komunis/sosialis atau menghadhiri konferensi-konferensi di negara-negara tersebut. Sastrawan-sastrawan seperti Hr. Bandaharo, Utuy Tatang Sontani, Agam Wispi, S. Anantaguna, Sobron Aidit, Pramoedya Ananta Toer, Bakri Siregar, Boejoeng Saleh, pelukis Basuki Resobowo, Samandjaja dan lain-lain lagi mendapat kesempatan yang baik keluar negeri atas inisiatif PKI/Lekra. Sitor Situmorang didekati orang-orang komunis dan diberi kesempatan untuk mengetuai delegasi pengarang-pengarang Indonesia ke Peking. Bukan saja pengarang-pengarang Lekra yang diberi kesempatan melawat keluar negeri tapi juga pengarang-pengarang yang non-Lekra diberi juga kesempatan yang sama untuk "memancing" mereka supaya berpihak kepada PKI/Lekra. Sastrawan-sastrawan M. Balfas, Trisno Sumardjo almarhum pernah diberi kesempatan melawat Peking dengan harapan mereka nanti bisa memberikan gambaran-gambaran yang muluk-muluk dan indah-indah tentang negara komunis di bawah rejim Mao Tze-tung.

Secara halus PKI menjalankan jarumnya untuk mendapatkan simpati dan kerjasama dari pengarang-pengarang dan seniman-seniman Indonesia. Sekiranya seseorang sastrawan terkenal lemah ekonomi-nya atau mempunyai ambisi untuk bergiat dalam bidang politik seperti Sitor Situmorang yang menurut pembicaraan teman-teman sastrawan lain ia sangat bernafsu sekali untuk menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka PKI/Lekra menyokongnya dalam segala usaha-usahanya itu. Paling tidak Sitor menjadi anggota DPRGR mewakili karyawan/seniman, Henk Ngantung, seorang pelukis yang juga menjadi anggota Lekra pernah menjabat jawatan sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya dan disamping itu mewakili pekerja kebudayaan dalam Dewan Pertimbangan Agung.[41]

Kesempatan-kesempatan lain yang diberikan oleh Lekra kepada

---

40. Lihat *Angkatan Baru*, no. 8, th. I, tgl. 1 Agustus 1965 dengan judul karangan, "Waspadalah pada Gerpol di bidang Budaja".
41. Lihat *Laporan Kebudajaan Rakjat* (*II*), ha. 22

kaum sastrawan, senimnan dan intelektuil di dalam organisasi tersebut cukup merangsangkan. Bagi mereka yang menginginkan popularitet, baik sebagai seniman maupun sebagai pengarang, Lekra membuka pintunya. Kebanyakan pelukis-pelukis, pengarang-pengarang muda mendapat kesempatan menunjukkan bakat mereka di dalam organisasi ini. Beberapa kali Lekra mengadakan pameran senirupa, senilukis dan karikatur di samping mengintensifkan lagi minat dengan ide-ide baru dalam kesenian-kesenian rakyat seperti ludruk, wayang orang, seni tari dan sebagainya. Dalam harian-harian di bawah pengaruh PKI diterbitkan pula lampiran-lampiran khas untuk membicarakan soal-soal kulturil dan kesusastraan. Pada lampiran-lampiran inilah penuls-penulis muda yang kurang terkenal atau yang tidak terkenal memperkenalkan karya-karya mereka. Beberapa orang penyair yang bergabung dalam Lekra diberi kesempatan oleh Lekra untuk diterbitkan kumpulan-kumpulan puisi mereka. Seringkali kumpulan-kumpulan puisi itu merupakan suatu sikap politik tertentu yang sesuai dengan cita-cita PKI. Seringkali hasil lawatan para penyair ke negara-negara komunis membuahkan "ilham" kepada mereka untuk mencipta puisi-puisi seperti yang kelihatan dalam kumpulan puisi *Dari Bumi Merah* karangan Hr. Bandaharo, dan *Sahabat* oleh Agam Wispi. Selain dari kumpulan tersebut terdapat pula kumpulan-kumpulan puisi seperti *Bukit 1211* dari buahtangan F.I. Risakotta, Sudisman dan Rumambi, dan *Zaman Baru* dari karangan Sitor Situmorang. Sitor menulis puisi-puisi ini hasil "ilham" yang diperolehnya setelah melawat ke Tiongkok Komunis.

Sokoguru perjuangan PKI/Lekra ialah kaum tani, buruh dan perajurit. Persoalan-persoalan dan problim-problim yang menyangkut golongan-golongan tersebut khasnya mengenai kaum tani sering "dipuisikan" oleh penyair-penyair Lekra. Dua di antara beberapa buah kumpulan puisi yang memperjuangkan kaum tani ialah *Jang Bertanahair Tapi Tak Bertanah*, kumpulan S. Anantaguna, dan sebuah lagi *Matinja Seorang Petani* yang merupakan kumpulan puisi bersama dari berbagai penyair. Dalam kumpulan di atas terdapat pula puisi-puisi ciptaan D.N. Aidit dan Njoto. Sebagai suatu sumbangan penghargaan dan dedikasi terhadap Partai maka diterbitkan pula sebuah kumpulan puisi khusus memuatkan puisi-puisi bertemakan PKI yang diberi nama *Partai Dalam Puisi*. Dalam kumpulan ini D.N. Aidit dan Sudisman menyumbangkan sebuah puisi tiap-tiap seorang.

Dalam bidang senitari dan dalam bidang drama tradisionil seperti ludruk, ketoprak, wayang kulit dan sebagainya, PKI tidak ketinggalan membuat infiltrasi ke dalam unsur-unsur kulturil tersebut untuk men-

jadikan drama-drama tradisionil, senitari dan perwayangan sebagai alat yang ampuh bagi perjuangan dan penyibaran komunisme. Di Bali umpamanya kader-kader PKI melacurkan tarian-tarian Bali yang erat hubungannya dengan keagamaan Hindu-Bali untuk disesuaikan dengan cita-cita Partai, menghina dan membuat distorsi terhadap segala macam aktivitas-aktivitas keagamaan Hindu-Bali agar rakyat Bali menjadi benci pada kehidupan agama mereka yang bersipat tradisionil itu.[42]

Dalam segala bidang kulturil PKI/Lekra mencuba mempengaruhi rakyat agar rakyat menerima ideoloji komunis, dan berjuang di samping ataupun dalam organisasi-organisasi PKI. Aksi-aksi dan aktivitas-aktivitas kulturil itu diperhebatkan dari kota-kota besar hingga ke desa-desa guna menanamkan pengaruh komunisme di kalangan rakyat jelata. Dengan lain perkataan PKI/Lekra melancarkan suatu indoktrinasi massa di kalangan rakyat sebagai suatu kondisi sebelum ia merebut kekuasaan.

bab IV 1. pengertian rakyat bg. P.K.I.
2. kedudukan politik di dl kebudayaan.
3. [illegible]. "politik adalah panglima"
4. Mao Tse Tung + Aidit ttg seni + sastera
5. pengertian "humanis"
6. " "sastera berkepribadian"
7. ttg. [illegible] besar PKI
8. [illegible] ttg nilai seni
9. yg. hrs. dicapai oleh seniman

cf. pendapat - agama adalah panglima!
(ada analogi? lih. Basis, Des 73)

42. Lihat Ronald Mckie dan Beryl Bernay, *Bali*. Australia: Angus & Robertson Ltd., 1969, h. 95–96.

BAB KETIGA

LEKRA DENGAN PERSOALAN POLITIK DAN SENI

Surat Kepercayaan "Gelanggang" yang ditandatangani di Djakarta pada tanggal 18 Februari 1950 membawa satu fase kemajuan lagi dalam persoalan kulturil dan kesusastraan di Indonesia. Manifes tersebut memberikan suatu identitas kepada suatu angkatan sastrawan dan seniman yang dikenali sebagai Angkatan '45.[1] Pernyataan sikap dalam pembentukan kebudayaan baru Indonesia ini sangat penting. Oleh karena itu kami kemukakan sepenuhnya dalam tulisan ini.

> "Kami adalah ahli waris jang sah dari kebudajaan dunia dan kebudajaan ini kami teruskan dengan tjara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang-banjak dan pengertian rakjat bagi kami adalah kumpulan tjampur-baur dari mana dunia2 baru jang sehat dapat dilahirkan.
>
> Ke-indonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami jang sawo-matang, rambut kami jang hitam atau tulang pelipis kami jang mendjorok ke depan, tetapi lebih banjak oleh apa jang diutarakan oleh udjud pernjataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata-ikatan untuk kebudajaan Indonesia. Kalau kami berbitjara tentang kebudajaan Indonesia, kami tidak ingat pada melaplap hasil kebudajaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudajaan baru jang sihat. Kebudajaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara jang disebabkan suara2 jang dilontarkan

---

1. Lihat H.B. Jassin, *Angkatan 45*. Djakarta: Jajasan Dharma 1951.

dari segala sudut dunia jang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri.

Kami akan menentang segala usaha2 jang mempersempit dan menghalangi tidak betulnja pemeriksaan ukuran-nilai.

Revolusi bagi kami ialah menempatan nilai2 baru atas nilai2 usang jang harus dihantjurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanahair kami sendiri belum selesai.

Dalam penemuan kami, kami mungkin tidak selalu asli; jang pokok ditemui ialah manusia. Dalam tjara kami memberi, membahas dan menelaahlah kami membawa sifat sendiri.

Penghargaan kami terhadap keadaan keliling (masjarakat) adalah penghargaan orang2 jang mengetahui adanja saling pengaruh antara masjarakat dan seniman".[2]

Pendapat bahwa "Revolusi di tanahair kami sendiri belum selesai" tidak ditentang oleh Lekra karena Lekra sendiri berpendapat bahwa Revolusi Indonesia memang belum selesai. Yang dikecam oleh Lekra lewat tokohnya, Klara Akustia, ialah konsep *humanisme universil* dari pernyataan *Surat Kepercayaan "Gelanggang"* tersebut. Klara Akustia membuat garis Revolusi '45 sebagai revolusi nasional dan justru itu harus memancarkan segala perjuangan nasional yang berporoskan kerakyatan. Lebih jauh lagi ia menuduh bahwa sastrawan-sastrawan Angkatan '45 "berbalik menentang perubahan masjarakat bekas koloni Belanda kemasjarakatan kerakjatan". Klara Akustia menjelaskan bahwa "Perkembangan kesusastraan adalah pertarungan klas2 jang bertentangan kepentingan, jang satu mempertahankan kekolotan, jang lain mengusahakan kemadjuan".[3] Dengan menggunakan nama lain, Jogaswara, Klara Akustia memberi cap bahwa "Angkatan '45 sudah mampus".[4]

Polemik antara Lekra dan penganut-penganut *humanisme universil* bukan saja berlaku di Djakarta tapi juga di Medan. Tokoh Lekra di Medan pada waktu itu, Bakri Siregar mengadakan polemik dengan Aoh K. Hadimadja dan hasil dari polemik itu dapat dilihat dalam buku

2. Lihat H.B. Jassin, *Gema Tanah Air Prosa dan Puisi 1942–1948* Cetakan ke 4. Djakarta: Balai Pustaka, 1959, h. 12. Juga lihat A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru.* Djakarta: Yayasan Pembangunan, 1952, h. 170.

3. Lihat Klara Akustia, "Kepada Seniman Universil" dalam *Beberapa Paham Angkatan '45* susunan Aoh. K. Hadimadja. Djakarta: Tintamas, 1952, h. 82–91.

4. Bakri Siregar menjelaskan bahwa Klara Akustia, Jogaswara, A.S. Dharta adalah nama pena seorang pengarang sahaja. Lihat Bakri Siregar, "Prof. Dr. A. Teeuw tentang Lekra". *Zaman Baru*, no. 3, (Juni 1956), h. 39. Menurut keterangan Ajip Rosidi namanya yang sebenar ialah Rodji.

karangan Aoh. K. Hadimadja *Beberapa Paham Angkatan '45*. Bakri berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia harus memenuhi tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia dan bukan menjadikan hasil-hasil sastra sebagai barang luks untuk kepentingan satu golongan kecil semata-mata. Dalam sebuah tulisannya mengenai penyair Chairil Anwar, Bakri mengecam penyair Angkatan '45 tersebut dan menganggap ia mati "sebagai orang jang tidak bertuhan".[5] Agak anih juga bagi orang Lekra masih mengingatkan soal ketuhanan karena perkembangan dialog selanjutnya antara tokoh-tokoh Lekra dengan sastrawan-sastrawan dan cendekiawan-cendekiawan yang non-Lekra, persoalan ketuhanan tidak pernah ditimbulkan oleh orang-orang Lekra.

Bila Bakri Siregar berhijrah ke Djakarta ia banyak sekali menulis dalam harian-harian dan majalah *Zaman Baru* kepunyaan PKI/Lekra. Sebagai tokoh intelektuil Lekra dan dosen pada Akademi Bahasa dan Sastra Multatuli, Bakri menulis sebuah buku yang membicarakan pembabakan dan perkembangan kesusastraan Indonesia yang ditinjaunya dari aspek Marxisme. Rumusannya tentang Lekra sangat menarik sekali di mana ia berkata:

> "Sastrawan2 jang bergabung dalam Lembaga Kebudajaan Rakjat (LEKRA), jang didirikan tanggal 17 Agustus 1950, tegas berpihak kepada rakjat dan mengabdi kepada rakjat, dan dengan demikian atas dasar paham "Seni untuk Rakjat", menolak aliran "Seni untuk Seni" seperti jang dinjatakan dalam "Mukaddimah Lekra" serta "Konsepsi Kebudajaan Rakjat" (1950). Ide2, pikiran serta karya2 Maxim Gorki, bapak realisme sosialis di Uni-Soviet dan Lu Shun, pelopor sastra Tiongkok modern dan revolusioner, serta tokoh2 repolusioner dan progresip serta dunia lain memberikan bahan dan merupakan pegangan bagi kalangan sastra progresip dan repolusioner di Indonesia, jang menerima pula metode realisme sosialis dengan pegangan *politik adalah panglima*, mengabdi pada rakjat. pekerja".[6]

Seorang penyair dan intelektuil Lekra yang terkemuka, Boejoeng Saleh, juga mengecam *humanisme universil*. Secara historis, ia berkata:

> "Kaum bordjuis mentjoba mengemukakan andjuran pemisahan kaum seniman dari masjarakat dengan mengandjurkan "seni tak berpihak", "seni tanpa klas", "seni universil dan kosmopolitan"

5. Lihat Bakri Siregar, "Dan pengertian tetap katjau", dalam *Beberapa Paham Angkatan '45*, h. 78.
6. Lihat Bakri Siregar, *Sedjarah Sastra Indonesia Modern* (*I*) Djakarta: Akademi Sastra dan Bahasa "Multatuli", 1964, h. 12.

jang berudjud formalisme. Dengan sembojan "seni untuk seni" bordjuis hendak mementjilkan dan mengutjilkan kaum seniman dari rakjat banjak".[7]

Di sini kelihatan aliran pemikiran dua orang tokoh sosialis itu, dan kedua-duanya menolak konsep *humanisme universil*, dan secara tidak langsung mengidentifikasikan konsep tersebut dengan golongan borjuis. Konsep yang "benar" menurut Boejoeng Saleh ialah seni itu harus berisi, mempunyai "tendens". Tapi ia juga mengakui bahwa harus ada paduan yang baik dan erat antara isi dengan bentuk supaya karya seni itu mempunyai mutu artistik. Namun demikian ia menganjurkan juga seni yang berpihak yang menurutnya adalah seperti di bawah ini:

> "Disini terhadap formalisme kita kemukakan seni jang berisi, seni jang berpihak, berpihak kepada kebenaran dan keadilan, pada jang lemah dan jang tertindas, pada Manusia dan Rakjat. Disini seni mendjadi pendukung tjita2 jang besar, tjita2 kemanusiaan untuk pembaharuan dan kemadjuan, untuk pembebasan semua bangsa dan manusia, dan kasih besar antara sesama manusia."[8]

Suatu hal yang tidak bisa terlepas dari peninjauan kita bila menilai konsep kulturil Lekra dan sikap budaya dari mereka yang non-Lekra ialah situasi masyarakat Indonesia setelah penyerahan kedaulatan bagi Indonesia. Pengorbanan darah, tenaga, hartabenda dari bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan tidaklah sedikit. Sipat revolusi yang memberikan cita-cita nasional tapi gagal untuk memberikan kemajuan sosial dalam masyarakat, meninggalkan kesan juga dalam bidang spirituil.[9] Lukisan-lukisan zaman revolusi dan sesudah revolusi yang digambarkan oleh sastrawan-sastrawan Indonesia pada umumnya menjalari napas-napas penderitaan, kesukaran, pesimisme, konflik jiwa dan kemiskinan. Tidak kurang pula yang mengejek dengan pahit melihat kebobrokan dalam masyarakat sendiri. Demikianlah sikap Pramoedya dalam kebanyakan karya-karyanya seperti *Keluarga Gerilja*, *Bukan Pasar Malam* dan *Korupsi*. Ada juga sastrawan yang melihat kelakuan manusia dizaman revolusi seperti "cowboys" dalam filem dan mengejek golongan tersebut seperti mana yang dilukiskan Idrus dalam *Surabaja* nya.

Suasana yang serba sukar itu adalah lanjutan dari revolusi yang belum selesai. Hal ini tampak jelas dari sikap yang diambil oleh golongan Lekra

---

7. Lihat Boejoeng Saleh, "Kearah Seni Berisi, sekitar soal 'tendens' dalam *Indonesia*, no. 6/7, (Juni/Juli 1953), h. 337–344.
8. Boejoeng Saleh, *ibid.*, h. 339
9. Lihat W.F. Wertheim. *Indonesian Society in Transition*. 2nd. edition. The Hague dan Bandung: W. Van Hoeve, 1959, p. 308.

dan juga pendudung-pendukung *Surat Kepercayaan "Gelanggang"* yang menganggap "revolusi Indonesia masih belum selesai". Tapi Lekra lebih optimistis dalam menanggapi "essence" revolusi yang belum selesai itu. Untuk menyelesaikan revolusi orang bisa berbuat apa saja, dan harus berkorban segala-galanya demi kepentingan revolusi dan rakyat. Orang tidak harus berputusasa, berasa keciwa dalam tindakan physikal dan spirituil. Segala pengorbanan manusia harus didasarkan pada revolusi. Demikianlah Joebaar Ajoeb waktu membuat sorotan atas karangan Idrus *Surabaja* mengecam penulis *Surabaja* yang dianggapnya "tidak mempunjai pengertian tentang perasaan2 kebangsaan dan tentang revolusi...."[10]

Pramoedya Ananta Toer pada permulaan tahun-tahun 50an masih sangsi untuk mempolitikan kesusastraan. Dengan bijak ia menegaskan bahwa bukan kesusastraan itu yang diperalatkan tapi pengarangnya, karena tanpa pengarang maka tidak akan lahir kesusastraan. Mungkin diwaktu itu Pramoedya masih belum menjadi anggota Lekra maka sikap sastranya sangat berlainan sekali dari sikap politiknya setelah ia menjadi tokoh Lekra. Tentang problim sastra dan propanda, Pramoedya menulis demikian:

> Daerah2 dimana faktor2 politik menentukan tak djarang apa jang dinamakan kesusastraan itu tjampuraduk dan merupakan bahan gubal antara sastra propaganda, antipati terhadap politik tertentu dengan melupakan kemungkinan2 lain. Dalam hal ini kesusastraan jang sesungguhnja, dikorbankan oleh dan untuk politik. Kesusastraan demikian adalah kesusastraan propaganda jang belum patut mendapat nama kesusastraan."[11]

Seperti yang ditegaskan sebelumnya Lekra sebagai front kebudayaan PKI tidak bisa menyeleweng dari "Mukaddimmah" dan "Konsepsi Kebudayaan Rakjat" yang telah pun disetujui oleh PKI. Dalam masyarakat Indonesia yang bobrok, moral yang becat, korupsi, petualangan dalam politik serta situasi ekonomi yang tidak stabil dan lebih-lebih lagi kehidupan kaum proletar yang menderita, merangsang bagi PKI dan ormas-ormasnya untuk meningkatkan lagi aksi-aksinya dalam segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Demonstrasi-demonstrasi massa terhadap kedutaan-kedutaan Amerika, Inggeris dan Malaysia diwaktu itu dengan sendirinya menunjukkan sokongan rakyat terhadap

---

10. Lihat Joebaar Ajoeb, "Idrus dan Surabaja", dalam *Indonesia*, no. 8/9, th. IV, (Agustus/September 1953), h. 516–519.
11. Lihat Pramoedya Ananta Toer, "Kesusastraan sebagai Alat", dlm *Indonesia*, no. 8, th. III (Agustus 1952), h. 7–12.

gagasan-gagasan politik yang dominan. PKI menjadi gergasi yang ditakuti, baik oleh pihak ABRI maupun oleh partai-partai politik yang lain yang tidak bersetuju dengan gagasan politik PKI itu.

Partai-partai politik yang non-komunis kehabisan daya untuk mencegah merebaknya pengaruh PKI. Lagi pula partai-partai tersebut tidak terorganisir dengan baik seperti PKI. Kekuatan politik mereka sangat terbatas. PKI sudah lama menyusun strategi politiknya sejak D.N. Aidit memegang teraju kekuasaan dalam PKI. Sejak 1945 hingga lahirnya Manipol-Usdek pada tahun 1959 Indonesia tidak pernah mengalami kestabilan politik. Ini menyebabkan rakyat menjadi keciwa dengan sistim pemerintahan "liberal" hingga akhirnya secara langsung atau tidak langsung rakyat terjebak dalam sistim pemerintahan totaliter Soekarno. PKI, sebagai partai politik yang terbesar, mendesak terus terhadap pemerintahan Soekarno hingga akhirnya timbul kultus peribadi terhadap diri manusia Soekarno. Di sinilah letaknya fase akhir bagi perjuangan PKI, suatu klimak dalam taktik PKI sebelum menggulingkan rejim Soekarno. Tambahan pula PKI menganut pahaman Marxisme-Leninisme yang bersesuaian pula dengan perjuangan yang militan dan agresif itu.[12]

Menurut ajaran Marxisme-Leninisme setiap alat harus dipergunakan sepenuhnya bagi kepentingan cita-cita partai. Sekiranya kesusastraan dijadikan propaganda, maka itu adalah keharusan dari perjuangan partai. Definisi propaganda dalam kamus dan ensaikelopedia Uni-Soviet yang standard ialah "penafsiran ide, pengajaran, pikiran-pikiran politik dan pengetahuan, bagian-bagian pekerjaan partai komunis dan buruh dalam bimbingan ideoloji massa, partai dan pekerja-pekerja".[13] Dengan lain perkataan, propaganda adalah penting dalam sistim komunis. D.N. Aidit menanggapi peranan Marxisme-Leninisme dalam karya-karya kreatif sastra dan seni, berkata:

> "Mempersoalkan tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik", inipun harus djuga ditjapai dengan djalan beladjar Marxisme-Leninisme dan pengintegrasian diri dengan massa, karena bahan baku untuk kerdja kreatif sastra dan seni terdapat pada massa;

---

12. Sekembalinya D.N. Aidit dari lawatannya ke negara-negara komunis pada tanggal 29 September 1963, PKI menyebelahi komunis Cina dalam perselisihan ideoloji komunis antara Uni-Soviet dengan Cina komunis. Keterangan lanjut bacalah Arnold C. Brackman, *South East Asia's Second Front. The Power Struggle in the Malay Archipelago*. 2nd. print. New York: Frederick A. Praeger, 1966, p. 250.

13. Lihat John C. Clews, *Communist Propaganda Techniques*. London: Methuen 1964, p. 4.

djuga keartistikan jang harus diolah oleh para seniman dan sastrawan terdapat pada massa. Pendeknja para sastrawan dan seniman harus mentjari sumber kreasinja pada massa, dan terus-menerus membadjakan diri dan mendidik diri. Mutu ideologi kerja tidak mungkin tinggi kalau manusia jang mengkreasinja sendiri tidak menempa ideologinja sendiri, tidak membadjakan diri di dalam kehangatan perdjuangan revolusioner. Dan mutu artistik karja djuka djuga tidak akan meninggi djika sastrawan dan seniman tidak terus-menerus mendidik diri, beladjar Marxisme-Leninisme serta giat beladjar dan giat berlatih dilapangan artistik".[14]

Umum mengetahui bahwa komunisme menitikberatkan pengawalan jalan pikiran manusia dan berusaha untuk mengawal pikiran individu maupun massa untuk bekerdja bagi kepentingan partai. Tujuan yang akhir sudah tentu iaitu mengawal jalan pikiran massa, tapi dalam tingkat-tingkat permulaannya komunisme berusaha untuk menetralisasikan segala tentangan terhadapnya, dasar-dasarnya yang berlaku pada satu-satu masa tertentu.[15]

Mengingatkan sikap komunisme yang demikian, maka tidak mengherankan sekiranya A.S. Dharta[16] dan Boejoeng Saleh[17] mengungkapkan konsep "pertentangan klas", perjuangan untuk rakyat tertindas dan kesusastraan harus berpihak kepada rakyat. Alangkah anihnya bila orang terlalu dipengaruhi dengan revolusi '45 hingga berbuat penilaian-penilaian yang mengejutkan tentang kelahiran angkatan sastrawan. Benny Tjung pernah berkata bahwa angkatan seniman lahir adalah "ditandai watak2 perdjuangan masjarakat dalam suatu periode djaman."[18] Lebih lanjut lagi ia menegaskan watak perjuangan masyarakat "masih dalam suatu peroide revolusi, melawan imperialisme, feodalisme dan memperdjuangkan nilai2 kemerdekaan jang murni; dari rakjat, oleh rakjat dan untuk rakjat".[19] Justru itu menurut Benny Tjung lagi:

14. D.N. Aidit, *op. cit.*, h. 57.
15. John C. Clews, *op. cit.*, p. 21–22.
16. Lihat A.S. Dharta, "Djalan Perkembangan Kesusastraan" (preadvisnya dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke 2 di Bandung, 1951). *Indonesia*, nomor Kongres Kebudayaan ke 2, (Januari/Februari/Maret 1952), no. 1/2/3, th. III, h. 76–79.
17. Lihat pendapat-pendapat Boejoeng Saleh yang menanggapi pendapat-pendapat M. Nasroen seperti dalam catatan kaki (16), h. 179–185.
18. Lihat Benny Tjung, "Sastra Indonesia punja Tradisi Revolusioner", (prasarannya dalam Simposium Pertama Lembaga Sastra Indonesia yang disponsori Lekra yang diadakan di Balai Budaya, Djakarta tanggal 29 April 1960).
19. Benny Tjung, *ibid.*

"Sampai sekarang belum ada satu angkatan jang baru. Angkatan jang ada masih satu, iaitu angkatan revolusi. Garis kesimpulan ini sesuai dengan garis sosiologi, politik dan kulturil umumnja. Di sini pula saja menarik garis logika, bahwa Chairil Anwar cs sampai pada Pram, Sobron, Agam, Rumambi, S.M. Ardan, Sukaris, Eka Rahendra, W. Sontani adalah satu angkatan jang sah".[20]

Di sini jelas kelihatan pengertian "angkatan sastra" yang berdasarkan faktor-faktor ekstrinsik seperti faktor-faktor politik yang dikemukakan oleh anggota Lekra Benny Tjung itu. Kita agak sangsi bilamana ia memasukkan Chairil Anwar sebagai sastrawan "angkatan revolusi". Apakah karena Chairil melahirkan puisi-puisinya yang penuh vitalisme dan individualistisme, dan hidup dalam periode perjuangan merebut kemerdekaan maka ia, Chairil Anwar, digolongkan sebagai penyair "angkatan revolusi"? Apakah Sitor Situmorang dengan kumpulan puisinya *Surat Kertas Hidjau* bisa digolongkan sebagai sastrawan "angkatan revolusi"? Bagaimana dengan Idrus yang menulis *Surabaja* dan dikecam oleh Joebaar Ajoeb karena sikapnya yang "tidak revolusioner" bisa digolongkan sebagai pengarang "angkatan revolusi"? Bisakah Mochtar Lubis yang tergolong dalam Angkatan '45 menurut H.B. Jassin bisa dimasukkan ke dalam angkatan sastra kreasi Benny Tjung? Bagaimana pula dengan cerpen-cerpen dan drama-drama Usmar Ismail dan puisi-puisi Asrul Sani? Sastrawan-sastrawan yang kami kemukakan di sini adalah mereka yang seangkatan dengan Chairil Anwar dalam periode penciptaan dan di samping itu mempunyai visi dan sikap hidup yang sama dengan Chairil Anwar seperti mana yang dapat kita baca dalam *Surat Kepercayaan Seniman "Gelanggang"*.

Memang Pramoedya Ananta Toer banyak menggali ilham dari kisah-kisah revolusi seperti dalam *Keluarga Gerilja*, *Ditepi Kali Bekasi*, *Mereka jang Dilumpuhkan*, *Perburuan* dan *Bukan Pasar Malam*. Karya-karyanya yang di atas adalah ciptaan-ciptaannya sebelum Pramoedya menjadi anggota Lekra, dan karya-karya itulah yang memperkenalkan Pramoedya sebagai pengarang prosa Indonesia yang terkemuka. Tapi nama-nama seperti Sukaris, Ika Rahendra, W. Sontani dan Rumambi hanya dikenali dalam lampiran-lampiran kebudayaan dalam harian-harian PKI atau yang dipengaruhi PKI saja. Oleh sebab mereka banyak menulis puisi ataupun cerpen tentang orang-orang yang tertindas yang seiringan dengan instruksi PKI, maka nama-nama mereka dimasukkan sebagai sastrawan-sastrawan "angkatan revolusi". Dan yang paling meragukan

---

20. Benny Tjung, *ibid.*

kita kapankah revolusi itu bisa selesai kalau ditinjau dari pengertian PKI/Lekra? Perubahan sosial. Orang PKI/Lekra sudah pasti tidak bersetuju dengan pendapat demikian lantaran mereka sudah diindoktrinir dengan ajaran komunisme untuk memperjuangkan masyarakat tanpa klas, dan mereka yakin dengan pendapat-pendapat seperti itu. Di sinilah kita menghadapi suatu problim dalam memberi ukuran nilai pada hasil-hasil seni dan kesusastraan. Lekra bertolak dari konsep revolusi yang ideoloji-sentris dalam penilaiannya, dan kita pula bertolak dari segi hasil itu sendiri dari segi intrinsiknya dan kita tidak pula melupai unsur-unsur ekstrinsik yang mempengaruhi sesebuah ciptaan seni dan sastra itu.

Kita melihat ada usaha-usaha dari pihak PKI/Lekra untuk mempropagandakan perjuangan komunisme lewat tokoh-tokoh mereka, lewat pidato-pidato tentang kebudayaan dan kesusastraan dan lewat tulisan-tulisan dalam harian-harian dan majalah-majalah.[21] Di samping itu kongres-kongres, simposium-simposium yang dianjurkan oleh PKI/Lekra merupakan media-media indoktrinasi komunisme untuk para seniman, sastrawan, cendikiawan dan para simpatisan PKI/Lekra umumnya.

21. Lekra menerbitkan majalah *Zaman Baru* di mana banyak hasil sastra dan kritik diterbitkan. Harian *Bintang Timur* pula mempunyai lampiran kebudayaan bernama "Lentera". Redaksinya terdiri dari Pramoedya dan S. Rukiah. Redaksi *Harian Rakjat* terdiri dari Piet Santoso Isnanto B.A., Abdullah Said Patmadji dan Zainal Abdi. Harian-harian lain yang menyuarakan pikiran PKI dan mempunyai lampiran-lampiran kebudayaan termasuklah *Terompet Masjarakat*, *Djawa Pos* (kedua-duanya dari Surabaja), *Harian Tempo* dan *Sinar Indonesia* (dari Semarang), *Nasional* (Djogdjakarta), *Patriot* (Medan), *Perdamaian* (Surabaja) dan *Harian Penerangan* (Padang).

BAB KEEMPAT

LEKRA: GERAKAN KEBUDAYAAN DAN AGITASINYA

Dalam Konsepsi Kebudayaan Rakyat, fasal III yang membicarakan tentang fungsi kebudayaan, antara lain dijelaskan seperti di bawah ini:

> "Perdjuangan Kebudajaan Rakjat adalah bagian jang tidak dapat dipisahkan dari perdjuangan Rakjat umumnja. Ia merupakan bagian jang tidak dapat dipisahkan terutama dari perdjuangan klas Buruh dan Tani jaitu klas jang mendjadi pemimpin dan tenaga terpenting dan pokok dalam perdjuangan Rakjat. Fungsi dari Kebudajaan Rakjat (Kultur Rakjat) sekarang ialah *mendjadi sendjata perdjuangan untok menghantjurkan imperialisme dan feodalisme*. Ia harus mendjadi stimulator dari Massa, mendjadi sumber jang senantiasa mengalirkan begeestering (kesegaran djiwa) dan Api Revolusioner jang tak kundjung padam. Ia harus menjanjikan, memudja, mentjatat perdjuangan kerakjatan, dan menghantam, membongkar, menggulingkan dan mengalahkan imperialisme dan feodalisme. Kebudajaan Rakjat berkewadjiban mengadjar dan mendidik Rakjat untuk medjadi pahlawan dalam perdjuangan".[1]

Lekra berpendapat bahwa perjuangan Revolusi '45 itu mempunyai gejala-gejala kegagalan karena kelihatan gejala-gejala kebobrokan setelah kemerdekaan. Alasan-alasan yang diberikan oleh Sekretariat Lekra tentang kegagalan tersebut berupa adanya posisi seniman yang lantaran "restorasi kekuasaan imperialisme dalam lapangan ekonomi sudah men-

---

1. Lihat Konsep Kebudajaan Rakjat yang diterbitkan dalam *Menjambut Kongres Kebudajaan Kedua di Bandung* (6 s/d Oktober 1951), h. 45–47.

jadi semakin tidak bebas dan terdesak sehingga terpaksa melayani kepentingan klas yang berkuasa dilapangan ekonomi".[2] Di samping itu kelihatan kebanjiran infiltrasi kebudayaan imperialis lewat buku-buku, film-film yang menunjukkan "kebentjian bangsa, anti-resionalisme, anti-realisme, napsu untuk bunuh membunuh dan sebagainja".[3] Menurut logika Lekra "infiltrasi tersebut menjebabkan kesulitan2 dalam usaha mentjerdaskan rakjat, kemahalan harga buku, pengongkosan asrama dan sekolah bagi peladjar dan mahasiswa."[4]

Yang memungkinkan PKI menggerakkan massa rakyat dan melancarkan aksi-aksi penyerangan terhadap segala "benteng-benteng" "imperialis dan kapitalis Amerika" dan lain-lain negara barat ialah kekuatan yang terbendung dalam PKI sendiri. Kemajuan PKI di bidang politik kelihatan dari statistik undian yang diperolehnya. Dalam pilihan umum nasional 1955 PKI mendapat 2,326,108 undian di Jawa Tengah, dan pada tahun 1957 PKI mendapat 3,005,150 undian di daerah yang sama, dan jumlah ini menjadikan PKI sebagai partai yang utama di situ. Di Jawa Timur PKI menjadi partai politik yang kedua besarnya dengan undian sebanyak 2,299,602 (1955), dan pada tahun 1957 mendapat 2,704,523 undian. Di Jawa Barat PKI menjadi partai politik yang kedua besarnya dengan undian sebanyak 1,087,269 (1957) dan sebelumnya cuma memperoleh 755,634 pada tahun 1955. Pada pemilihan umum 1957 PKI merupakan partai politik yang terbesar sekali di Indonesia.[5]

Pengaruh PKI ini meluas karena PKI mempunyai 272 cabang, dan tiap-tiap pulau yang penting mempunyai "Komite Pulau" yang mempunyai sel-sel berbagai macam untuk menyibarkan propaganda komunis, baik bagi keluarga, teman-teman maupun pada musuh-musuh PKI sendiri. Tambahan pula kader-kader PKI telah menguasai organisasi-organisasi buruh, tani dan sebagainya hingga ia menjadi partai komunis yang terbesar sekali di dunia di luar Republik Rakyat Tiongkok dan Uni-Soviet.[6] Dalam dunia mass media PKI mempunyai suara yang garang dalam korannya *Bintang Timur* dan *Harian Rakjat* dan di samping itu cita-cita PKI mendapat dukungan pula dalam harian-harian

---

2. Lihat *Sikap dan Pendirian Lembaga Kebudajaan Rakjat terhadap Keadaan Dewasa ini* (stensilan). Djakarta: Sekretariat Lekra, tanggal 28 Disember 1950.
3. Sekretariat Lekra, *ibid.*
4. Sekretariat Lekra, *ibid.*
5. Lihat Soe Hok Gie, "The Future of the Indonesian Communist Movement", *Solidarity*, no. 9, vol. III (September 1968). Manila: Solidaridad Publishing House, p. 13–18
6. Lihat Arnold Brackman, *Indonesian Communist: A History*, p. 301

n.b. sebagai data (dr. PKI) perlu diragukan kebenarannya (lih. data undian di atas)

seperti *Pendorong*, *Sin Po* (edisi Tionghoa dan Indonesia), *Terompet Masjarakat* dan beberapa harian yang lain.[7] Di samping itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kantor berita nasional Antara dapat dikuasai oleh PKI. Sejak tahun 1959 hingga dengan 1965 sebelum tercetusnya Gestapu 30 September 1965 terdapat tiga kumpulan "pelakun" yang berkuasa—Presiden/Perdana Menteri Soekarno, pucuk pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia dan PKI.[8]

Mengingatkan pengaruhnya yang besar dalam bidang politik, mass media dan kebudayaan maka agitasi PKI/Lekra terhadap imperialisme, kolonialisme, nekolim dan feodalisme menjadi bertambah hebat. Pidato-pidato Soekarno tentang Manipol-Usdek diolah oleh pimpinan PKI/Lekra untuk pentrapan bagi konsumsi rakyat. Dalam pidato Manipol Usdek tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno mengecam kebudayaan barat yang memperkenalkan tarian "rock 'n roll", dansa a la cha-cha-cha, musikan a la ngak-ngik-ngok gila-gilaan yang diassosiasikan dengan cita-cita imperialisme barat. Soekarno menggesa rakyat supaya dalam kebudayaan rakyat Indonesia harus "kembali kepada kebudayaan nasional dan harus berkeperibadian nasional dalam kebudajaan". Selain dari itu ia juga melarang rakyat Indonesia membaca tulisan-tulisan dan buku-buku dari barat yang dianggapnya sebagai racun kebudayaan imperialisme.[9]

Dekrit Presiden seperti inilah yang sangat disenangi oleh PKI/Lekra. Lantaran komando tersebut datangnya dari Presiden Soekarno, Pemimpin Besar Revolusi, maka dengan gentar dan penuh akur rakyat akan mematuhi segala komandonya. Sekiranya rakyat tidak memahami segala ajaran-ajaran Soekarno maka telah diangkat secara resmi oleh rejim Soekarno, Dr. Haji Roeslan Abdulgani, sebagai "pentafsir" ajaran-ajaran Soekarno. Kesempatan untuk "mentafsir" ajaran-ajaran dan cita-cita Soekarno juga dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI/Lekra. Aksi-aksi militan dari PKI/Lekra terhadap Amerika, Belanda, Malaysia dan lain-lain lagi adalah sebagai "memenuhi" komando Soekarno. Demikianlah Joebaar Ajoeb mengatakan, "rakjat dengan kesadarannja telah

---

7. Tentang beberapa harian yang terkemuka di Indonesia bacalah Thom Kerstiens, *The New Elite in Asia and Africa*. 2nd. printing. New York: Frederick A. Praeger, 1966, p. 253

8. Lihat Donald Hindley, "The October Coup in Indonesia". *The American Review* (Oktober 1967), p. 59.

9. Bacalah pidato Soekarno, "Manifes Politik R.I.: Penemuan Kembali Revolusi Kita", yang akhirnya menjadi konsep "haluan negara". Inilah babak pertama dalam pemerintahan yang dikenali dengan nama "Demokrasi Terpimpin".

menghantjur Sticusa dan pemerintah achirnja menutup Asia Foundation."[10] Lekra juga mendesak supaya film-film asing khasnya buatan Amerika dilarang untuk diputar pada bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Pihak PKI/Lekra menuduh film-film Amerika dan negara-negara barat yang lain lebih banyak menonjolkan sadisme, pembunuhan, peperangan dan keruntuhan akhlak. Juga didesak supaya "pocket books" yang banyak membanjiri toko-toko buku diberhentikan kemasukannya karena buku-buku tersebut mencerminkan kebudayaan barat dan unsur-unsur kekuatan inperialisme dan kolonialisme.

Di samping melancarkan aksi-aksi anti-imperialisme, anti-kolonialisme dan anti-nekolim dalam harian-harian serta dalam demonstrasi-demonstrasi terhadap kedutaan-kedutaan asing khasnya Amerika, Inggeris, pihak PKI/Lekra menjalankan aksi "diplomasi politik" yang licik dengan mengundang Presiden Soekarno menghadhiri resepsi penutupan Kongres Nasional Lekra di Solo. Kesempatan yang baik itu digunakan oleh PKI/Lekra dengan menyodorkan pidato dari Joebaar Ajoeb, sekretaris jeneral Lekra, yang antara lain meminta Presiden Soekarno:

> "...mengambil sikap dan tindakan frontal dari pemerintah dan Rakjat dengan seluruh gerakan massa dan kebudajaannja, untuk mengachiri intervensi kebudajaan jang meratjun perkembangan revoslusi dan kebudajaan nasional".[11]

Kelihaian Soekarno dalam politik tidak mengkagetkan PKI. PKI/Lekra dalam bidang kulturil, ekonomi dan politik memainkan lagu-lagu yang disenangi Soekarno. Lagu-lagu yang dimainkan itu adalah juga lagu-lagu politik PKI. PKI harus mencari hero dalam politik dewasa itu, dan hero yang tidak ada tandingannya ialah Pemimpin Besar Revolusi yang juga menjadi Presiden Indonesia. Unsur "bapakisme" dalam politik dikuasai sepenuhnya oleh Soekarno. Demikianlah setiap partai politik yang hidup diwaktu itu berusaha untuk mendapatkan perlindungan dan "restu" dari Soekarno. Tapi kekuatan partai-partai politik yang lain tidak bisa mengatasi pengaruh PKI terhadap rejim Soekarno.

Setiap kali diadakan rapat pihak Lekra tidak lupa menggerakkan massa rakyat untuk menumpas segala sisa-sisa kebudayaan barat. Lagu-lagu barat dari penyanyi-penyanyi Amerika dan Inggeris khususnya jarang sekali berkumandang di udara pada waktu itu. Yang banyak kedengaran

---

10. Lihat Joebaar Ajoeb, *Laporan Kebudajaan Rakjat* (*I*), h. 26–28.
11. Joebaar Ajoeb, *ibid.*, h. 91

ialah lagu-lagu "perang" yang penuh semangat yang diperdengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Sebagai suatu usaha untuk "kembali kepada kebudayaan nasional", Lekra dalam Sidang Pleno pada bulan Julai 1961, membuat resolusi meminta pemerintah melarang AMPAI yang punya monopoli terhadap pemasukan film-film Amerika dan Eropah dan juga punya moncpoli terhadap bioskop-bioskop di Indonesia. Alasan yang sering dikemukakan PKI/Lekra ialah film-film dari Amerika dan Eropah Barat itu anti-Manipol, bersipat sadistis dan merusakkan akhlak bangsa Indonesia. Oleh karena posisi PKI dalam arena politik nasional sangat kuat dan berpengaruh, maka demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi kebudayaan dan politik dari PKI/Lekra berhasil. AMPAI, Sticusa.[12] USIS, Asia Foundation dan Peace Corps, semuanya menamatkan kegiatan masing-masing. D.N. Aidit waktu menanggapi ofensif kulturil ini dengan bangga berkata bahwa ofensif kulturil di kalangan rakyat sangat hebat hingga AMPAI terpaksa menghentikan kegiatannya.[13] Sudah pasti rakyat yang dimaksudkan Aidit adalah mereka yang menjadi anggota-anggota dan pengikut-pengikut PKI dan lain-lain ormas yang di bawah naungan PKI.

Penyibaran ideoloji komunisme diperhebatkan Lekra lewat lembaga-lembaga di bawahnya. Lembaga-lembaga itu ialah Lembaga Sastra Indonesia, Lembaga Senirupa Indonesia, Lembaga Musik Indonesia, Lembaga Film Indonesia, Lembaga Senidrama Indonesia dan Lembaga Ilmu Indonesia. Dalam Lembaga Senidrama Indonesia dimasukkan juga drama-drama tradisionil seperti ludruk, lenong, ketoprak, wayang orang dan sebagainya. Tjak Bowo dari sandiwara ludruk "Marhain" dan Sudjadi dari Sandiwara "Kridomardi" menjadi tokoh Lekra terpenting dalam kedua buah cabang kesenian tradisionil ini.[14] Tokoh-tokoh Lekra yang menjadi pengurus sementara dalam Lembaga Sastra Indonesia selepas Konferensi Nasional Pertama Lekra di Solo (1959) ialah Bakri Siregar (ketua) Pramoedya Ananta Toer (wakil ketua), M.S. Ashar (sekretaris) dan anggota-anggotanya terdiri dari Samandjaja, Njoto, Joebaar Ajoeb, S. Rukiah Kartapati, S. Anantaguna dan Agam Wispi.

---

12. Sticusa sebuah yayasan yang ditubuh di negara Belanda oleh orang-orang Belanda yang berminat untuk mengadakan hubungan kulturil antara Indonesia-Belanda. Pernah mengadakan diskusi kesusastraan Indonesia pada tahun 1952, dan juga menjemput sastrawan-sastrawan Indonesia melawat dan belajar di negara Belanda. Antara mereka termasuklah Pramoedya, Sitor Situmorang, Takdir Alisjahbana dan Asrul Sani.
13. Lihat D.N. Aidit, "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bina kebudajaan jang berkepribadian Nasional". *Zaman Baru*, (Disember 1964), h. 1–3
14. *Laporan Kebudajaan Rakjat* (*I*), h. 89.

Benteng keyakinan agama merupakan suatu halangan terbesar untuk PKI meluaskan ideoloji komunisme. Sikap permusuhan terhadap agama itu pernah dikemukakan V.I. Lenin dalam tulisan-tulisannya di mana ia mengganggap agama sebagai alat borjuis mempertahankan eksploitasinya terhadap rakyat, dan mengkhayalkan kelas pekerja untuk membangun merebut hak-haknya.[15] Guna mempengaruhi rakyat terhadap pahaman komunisme itu harus dijalankan aksi-aksi pembasmian keyakinan beragama, atau sekurang-kurangnya menganggap soal agama sebagai soal yang remeh saja. Karena di Indonesia sebilangan besar dari warganegaranya beragama Islam, maka PKI meningkatkan aksi-aksinya untuk menentang ulama-ulama dan agama Islam dengan berbagai cara.

James L. Peacock,[16] dalam penyelidikannya tentang ludruk di Surabaya menceritakan bahwa ludruk itu sangat diminati oleh kaum buruh di sana, dan dalam kebanyakan pementasannya tema-tema anti-kolonial Belanda dan anti-Muslim yang diketengahkan. Hal ini disebabkan kebanyakan dari pemain-pemain ludruk terdiri dari Muslim *abangan* yang lebih banyak menaruh perhatian pada rituil-rituil dan kepercayaan-kepercayaan Jawa tradisionil dari memegang prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang murni. Dengan demikian pihak *abangan* seringkali bermusuhan dengan golongan *santri* yang lebih murni tanggapan agamanya.[17] Menyedari bahwa kebanyakan penduduk-penduduk Bali sangat kuat sekali berpegang pada agama Hindu-Bali, pihak PKI/Lekra mencuba membuat distorsi tentang tarian-tarian dan lain-lain aspek kehidupan beragama suku-bangsa Bali.[18] Menurut keterangan dari beberapa orang teman penulis, pemain-pemain ludruk dari Lekra pernah mementaskan cerita-cerita tentang Tuhan telah mati di Jawa Tengah.

Dalam bidang kesusastraan pengarang-pengarang Lekra membawakan tema-tema anti-ulama-ulama Islam yang dilukiskan sebagai tuan-tanah yang kejam, pemeras rakyat dan menjadi simpatisan pada gerakan Darul Islam. Tokoh haji seringkali dijadikan bahan ejekan dan bahan hinaan, dan haji-haji yang mencuba mempertahankan nilai-nilai agama

---

15. Lihat V.I. Lenin, "Attitute of the Workers' Party towards Religion," dalam *V.I. Lenin, Marx, Engels Marxism*. 5th English edition. Moscow: Foreign Language Publishing House, 1953, p. 302.
16. James L. Peacock, "Anti-Dutch, Anti-Muslim Drama Among Surabaja Proletarians: A Description of Performances and Responses", *Indonesia*, no. 4, (Oktober 1967), Modern Indonesian Project, Cornell University, Ithaca, New York, p. 44–73.
17. Keterangan lanjut sila baca Clifford Geertz, *The Religion of Java*. Paperback edition, London: The Free Press of Glencoe, 1964, 392 pp.
18. Ronald McKie dan Beryl Bernay, *loc. cit.*

dan moral dianggap bodoh, picik dan ketinggalan zaman.[19] Demikianlah berbagai watak haji yang buruk diketengahkan dalam *Sajang ada Orang lain, Si Kampeng* dan *Si Sapar* tiga buah karya Utuy Tatang Sontani. Pramoedya Ananta Toer pula mengarang *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* yang memperkenalkan watak Musa, seorang yang bersipat sebagai pemeras kekayaan rakyat dan simpatisan Darul Islam. Karya Pramoedya ini dijadikan drama oleh Dhalia dan diberi judul *Orang2 Baru dari Banten.* Dalam *Midah si Manis Bergigi Mas* Pramoedya melukiskan watak haji yang melarang anak gadisnya dari memainkan plat-plat lagu keroncong. S. Rukiah, seorang anggota Lekra juga, membawa tema anti-agama dalam *Kedjatuhan dan Hati.*

Puncak penyerangan PKI/Lekra terhadap ulama-ulama Islam ialah penyerangan PKI/Lekra terhadap ulama Hamka. Seorang penulis bernama Abdullah Sp. seorang anggota staf *Bintang Timur*, menulis dalam harian tersebut pada tanggal 7 September 1962 mengatakan bahwa karya Hamka *Tenggelamnja Kapal van der Wijck* sebagai hasil plagiarisme dari karya pengarang Mesir Manfaluti.[20] Polemik tentang karya Hamka itu berlanjutan sekian lama hingga akhirnya mendapat tanggapan pula dari orang lain. H.B. Jassin, kritikus Indonesia terkenal, dalam menanggapi persoalan ini antara lain menulis:

> "Memang ada kemiripan dalam plot, ada pikiran2 dan gagasan2 jang mengingatkan pada 'Magdalena' Manfaluti, tapi kepandaiannja melukiskan lingkungan masjarakat dan menggambarkan alam serta menusianja, kemahiran melukiskan selok belok adat istiadat, serta keahliannja jang membentangkan latarbelakang sedjarah dan masjarakat Islam di Minangkabau, mengangkat tjeritakannja itu djadi tjiptaan Hamka sendiri."[21]

Sebenarnya persoalan plagiarisme itu menjadi helah belaka untuk menghina Hamka di kalangan pemeluk-pemeluk agama Islam di Indonesia, Tokoh-tokoh PKI/Lekra mengetahui bahwa Hamka seorang ulama modenis terkenal dan berpengaruh di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam bidang agama mereka tidak bisa menggugat Hamka. Maka

---

19. Lihat H.B. Jassin, "Ketjenderungan Negatif dalam Kesusastraan Indonesia," dalam *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei (IV)*. Djakarta: Gunung Agung, 1971, h. 110-114.
20. Keterangan lanjut sila baca Junus Amir Hamzah dan H.B. Jassin, *Tenggelamja Kapal van der Wijck dalam Polemik.* Djakarta: Mega Book Store, 1963, 198 halaman.
21. Lihat juga H.B. Jassin, "Apakah Tenggelamnja Kapal van Der Wijck Plagiat?" dalam *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei (I)*. Cetakan ke 4, Djakarta: Gunung Agung, 1967, h. 165

dicarilah alasan-alasan untuk menunjukkan "kepalsuan" dan "ketidak-jujuran" Hamka. Lebih-lebih lagi mengingatkan Hamka seorang ulama yang radikal dan juga seorang novelis—satu kombinasi yang sukar di-dapati dalam masyarakat pemeluk agama Islam di Indonesia/Malaysia.

Cita-cita PKI/Lekra untuk menjatuhkan Hamka gagal dan persoalan-nya tidak diungkit-ungkit lagi. Namun itu tidak bermakna PKI men-diamkan diri. Bilamana Hamka membuat kecaman-kecaman yang pedas terhadap rejim Soekarno, maka kesempatan itu dipergunakan oleh PKI untuk menjatuhkan Hamka. Oleh sebab Hamka tidak mempunyai massa yang kuat untuk mendukungnya, maka Hamka dengan gampang di-jebloskan ke dalam tahanan oleh rejim Soekarno. Dengan jalan itu Hamka tidak bisa lagi mempengaruhi rakyat Islam, dan ini adalah suatu kemenangan juga bagi PKI/Lekra.

"Politik adalah Panglima", konsep budaya dan sastra Lekra itu, terus-menerus meningkat kegiatannya. Dengan slogan-slogan "kembali kepada kebudajaan jang berkeperibadian nasional", serta melem-parkan tuduhan-tuduhan "anti-Manipol", "kontra-revolusi" dan lain-lain panggilan nama yang bersipat permusuhan terhadap penentang-penentang PKI, Lekra menjadi suatu organisasi yang sangat ditakuti oleh budayawan-budayawan serta sastrawan-sastrawan yang non-ko-munis. Rupanya taktik PKI di bidang kebudayaan menarik perhatian partai-partai politik lain untuk mendirikan pula organisasi-organisasi kulturil di bawah naungan partai. Kira-kira sekitar akhir tahun 50an PNI mendirikan LKN sebagai organisasi kebudayaannya yang diketuai oleh sastrawan Sitor Situmorang. Nahdatul Ulama pula mendirikan Lesbumi yang antara tokoh-tokohnya termasuklah sastrawan—sutradara Haji Asrul Sani dan sastrawan-sutradara Usmar Ismail almarhum.

Bernaung di bawah partai politik seolah-olah memberi jaminan "ke-amanan" kepada budayawan dan sastrawan dari pengganyangan PKI/ Lekra. Sikap akomodasi diri dan kreativitas menurut suasana politik dewasa itu dilakukan oleh sebilangan besar kaum budayawan dan sastra-wan juga cendekiawan. Mereka yang bernaung di bawah organisasi kul-turil partai harus menerima dasar dan sikap partai yang berlaku di-waktu itu.

Kepada seniman, budayawan dan intelektuil yang tidak bernaung di bawah mana-mana organisasi kebudayawan partai, kedudukan mereka sangatlah sulit. Mereka sering menjadi sasaran kecaman dari orang-orang politik, khasnya dari golongan Lekra. Posisi mereka sebagai in-telektuil bebas menjadi kritirium yang baik dan terhormat di kalangan masyarakat terpelajar Indonesia. Mereka mencuba sedaya upaya mene-

gakkan konsep-konsep intelektuilsme yang objektif tanpa menghiraukan konsep-konsep budaya yang bersumber pada politik kiri orang-orang Lekra dan LKN itu. Oleh karena posisi mereka sebagai intelektuil bebas, maka Lekra mencuba menjatuhkan posisi mereka yang penting itu dengan menggunakan slogan-slogan serta tuduhan-tuduhan yang berbau politis.

Tokoh kesusastraan yang penting yang hendak dijatuhkan PKI/Lekra ialah Drs. H.B. Jassin yang pernah diberi gelaran "Paus kesusastraan Indonesia modern" oleh sastrawan-budayawan Gajus Siagian. Sejak awal 50an H.B. Jassin telah dikecam oleh pengarang-pengarang Lekra karena beliau menganut paham an *humanisme universil* yang diidentifikasikan oleh Lekra sebagai "reaksioner", penganut "art for art's sake", "kosmopolitan", "individualistis", "anti-rakyat" dan lain-lain tuduhan yang punya konotasi politik yang jelek.

Serangan kedua terhadap ketokohan H.B. Jassin berlaku bila majalah *Sastra* di bawah redaksi H.B. Jassin memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang dalam bidang cerpen, puisi, cerita bersambung dan esei. Virga Belan, seorang anggota LKN, menolak hadiah tersebut, begitu juga Motinggo Boesje, kedua-duanya pemenang dalam bidang cerpen. Poppy Hutagalung yang memenangi hadiah dalam bidang puisi, juga menolak. Alasan mengapa Virga Belan menolak hadiah tersebut bisa dipahami karena sebagai anggota LKN yang bernaung di bawah partai PNI ia diseret untuk memasuki kamp PKI oleh partainya. Motinggo Boesje menolak dengan membuat alasan bahwa panitia *Sastra* kurang hati-hati dalam penilaian cerpen, karena cerpen yang memenangi hadiah *Sastra* itu pernah ditolak oleh redaksi *Sastra* sendiri sebelumnya. Tapi umum berpendapat bahwa Motinggo telah dipengaruhi suasana politik diwaktu itu, di mana seorang seniman harus berani membuat perhitungan untuk berani ujud sebagai seniman yang bebas ataupun sebaliknya menggantungkan harapan pada suatu pendapat umum yang bersipat politis diwaktu itu. Poppy Hutagalung, seorang penyair yang baru muncul "terpaksa" menolak hadiah *Sastra* setelah "diinterview" oleh orang-orang Lekra dan mengingatkan pula bahwa kekasihnya diwaktu itu seorang anggota Lekra.[22]

Issue penolakan Hadiah Sastra[23] tahun 1962 digunakan oleh PKI/

---

22. Interview dengan H.B. Jassin.
23. Daftar pemenang-pemenang Hadiah Sastra adalah seperti di bawah ini:
Bidang cerpen: Bur Rasuanto, Motinggo Boesje dan Virga Belan.
Bidang puisi: Saribi Afn, Piet Ardijanto Suprijadi dan Poppy Hutagalung.
Bidang cerita bersambung: B. Sularto, Djamil Suherman dan Usamah.
Bidang esei: Goenawan Mohammad, D.A. Peransi dan Hartojo Andangdjaja.

Lekra untuk menghancurkan kekuatan H.B. Jassin. Pramoedya Ananta Toe dan Sitor Situmorang banyak sekali membuat kecaman terhadap H.B. Jassin. Bukan saja penyerangan-penyerangan dari orang-orang Lekra dan LKN bersipat peribadi, tapi juga Lekra sanggup memalsukan taligram Usamah, seorang pemenang dalam bagian cerita bersambung, seolah-olah Usamah juga turut menolak hadiahnya. Ini ketahuan bila Usamah sendiri mengirimkan taligram menyatakan penerimaan hadiah *Sastra* tidak lama selepas itu.[24] Dengan demikian kepalsuan PKI/Lekra terdedah. Serangan PKI/Lekra kali inipun tidak meninggalkan bekas.

Menggunakan fitnah, pemalsuan dan melemparkan tuduhan yang berhahaya untuk menakutkan orang-orang yang menentang PKI/Lekra, bukan suatu taktik PKI yang luar biasa. Segala macam hasutan, fitnahan dan segala macam kelihaian untuk "membunuh" penentangan dari orang-orang lain dilakukan, karena PKI/Lekra memperjuangkan satu sikap kulturil, iaitu "Politik adalah Panglima" yang tidak mengenal kompromi apa pun asalkan tujuan mereka yang akhir tercapai.

Saudara Arief Budiman, seorang budayawan juga seorang saikoloog, telah membuat suatu studi tentang pengaruh politik dalam kesusastraan Indonesia, antara lain berkata:

> "Periode 1961–63 meskipun terdjadi polemik jang sengit jang sipatnja sudah berbentuk tuduhan2 kasar dari pihak komunis, tidak melahirkan satu tindakan jang kongkrit dalam bentuk disingkirkannja H.B. Jassin dari posisi kekuasaannja dalam dunia kesusastraan. Tapi periode ini merupakan periode pematangan bagi periode berikutnja dengan muntjulnja Manifes Kebudajaan".[25]

Soekarno sebagai hero dengan gigih diperjuangkan oleh PKI/Lekra dan partai-partai politik yang lain. Karena cita-cita politik Soekarno mempunyai garis yang sama dengan cita-cita komunis, maka PKI mendesak supaya cita-cita Soekarno dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia. Pembelaan Bung Karno terhadap PKI dalam pidato-pidatonya sejak 1960 (Jarek), dan pelaksanaan kabinet Nasakom pada tahun 1961 dan pelaksanaan indoktrinasi ajaran-ajaran Soekarno, yang pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan ajaran-ajaran komunis, disambut baik oleh PKI dan ormas-ormasnya. Lebih-lebih lagi bilamana Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1963 antara lain berkata bahwa "buruh

---

24. Taligram asli dari Usamah dan juga surat penerimaan hadiah *Sastra* masih disimpan oleh H.B. Jassin hingga sekarang.
25. Lihat Arief Budiman, "Kekuatan Politik dalam Kesusastraan Indonesia: Sebuah Tindjauan Sedjarah," tulisan tangan dalam simpanan arsip H.B. Jassin yang bertanggal 26 September 1968.

dan tani adalah sokoguru Revolusi".[26]

Sesuai dengan ajaran PKI dan ajaran-ajaran Soekarno, maka Menteri PTIP pada tanggal 5 April 1962 "menetapkan bahwa Pantjasila dan Manipol, begitu djuga agama mendjadi mata peladjaran jang diharuskan diperguruan-perguruan tinggi terhitung mulai tahun peladjaran 1962/1963."[27]

Bukan saja di bidang pendidikan nasional sudah dimasukkan indoktrinasi ajaran-ajaran Soekarno, tapi juga dalam bidang kulturil. Menyentuh tentang segolongan para pengarang dan cendekiawan yang mau menghirup udara bebas dalam penciptaan mereka, pihak pemerintah diwaktu itu antara lain menegaskan:

> "Kaum tjendekiawan banjak jang tidak bertjermin kepada rakjat terbanjak jang mendjadikan sokoguru daripada Revolusi kita. Banjak dikalangan mereka jang lebih suka mempeladjari segala sesuatu jang bersumber kepada kalangan mereka sendiri. Mereka mengadji rasa dan pikiran mereka sendiri, serta memberi maaf kepada tjatjat2 mereka sendiri sambil membelanja. Sebaliknja mereka tidak setjara sungguh2 mendekati rakjat djelata jang terdiri dari berbagai golongan: *buruh*, *tani* dan *tentera* dan lain2. Mereka tidak berusaha untuk mendidik dan memberi bantuan kepada rakjat, terutama jang masih buta huruf, untuk ikut serta berdjuang serta menikmati hasil2 kemerdekaan, terutama dibidang seni dan sastra....
>
> Kita harus berani membongkar alat-alat jang lama dan membangunkan jang baru untuk meneruskan perdjuangan diatas rel revolusi.... Para seniman dan sastrawan kita harus dapat menundukkan dan menelandjangi ketjenderungan kaum tjendekiawan jang terlalu bersipat kosmopolitan. Kritik jang tadjam dan sindiran2 jang berarti dalam bentuk serbaneka harus dilantjarkan terutama untuk memutarbalik pandangan mereka terhadap rakjat banjak.
>
> Terhadap rakjat jang hakekatnja mendjadi pentjipta sedjarah, para seniman dan sastrawan kita harus dapat memberikan pudjian dan penghargaan jang semestinja...."[28]

---

26. Baca pidato Bung Karno, "Genta Suara Revolusi Indonesia", tanggal 17 Agustus 1963 dalam *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, h. 579
27. Lihat, "Ichtisar Tahunan Tertulis tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS, No. 11, tahun 1960 mengenai Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, Tahapan Pertama 1961–1969" dalam *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, h. 861.
28. Lihat *Kebudajaan dan Pendidikan Nasional: Pola Pembangunan Nasional Berentjana*. Djakarta: Balai Pustaka, 1964, h. 21

Ketetapan-ketetapan yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia mengakibatkan pelarangan penerbitan dan penyibaran karangan-karangan yang pernah ditulis oleh pengarang-pengarang dan sarjana-sarjana Indonesia yang meninggalkan Indonesia sewaktu konfrantasi Indonesia-Malaysia dulu. Buku-buku karangan M. Balfas, Sutan Takdir Alisjahbana dan Idrus dilarang untuk pemakaian di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diwaktu itu.[29] Karangan-karangan dari pencetus dan pendukung *Manifes Kebudayaan* juga dilarang, khasnya buku-buku karangan H.B. Jassin. Karangan-karangan orang-orang Lekra yang pernah dilarang penerbitan dan penyibarannya seperti karangan Pramoedya Ananta Toer *Hoa Kiau di Indonesia* (Maret 1960), dan *Matinya Seorang Petani* karangan Agam Wispi dan kawan-kawannya, kini dicabut pelarangannya.[30] Ini disebabkan kedua pengarang tersebut menjadi tokoh Lekra dan pada waktu itu PKI menjadi partai politik yang terkuat.

H.B. Jassin yang menanggapi masalah di atas bertanya bagaimanakah kumpulan sajak *Surat Kertas Hidjau* dan *Dalam Sadjak*, dua buah kumpulan puisi Sitor Situmorang yang pernah dianggap iseng dan dekaden oleh orang-orang Lekra, tiba-tiba saja dianggap sebagai puisi-puisi yang representatif revolusioner? Apakah karena pengarangnya menjadi tokoh LKN yang sejiwa pikiran politiknya dengan PKI/Lekra? Memang dasar politiklah yang menjadi ukuran orang-orang Lekra dan LKN. Sebab itu dalam Pameran Buku Nasional yang diadakan pada tahun 1965, buku-buku yang terbit sebelum 1965 yang dikarang oleh pengarang-pengarang yang non-Lekra dan non-LKN tidak dimasukkan ke dalam daftar buku-buku terbitan sebelumnya dan tidak dipamerkan dalam pameran tersebut.[31] Sikap yang sama juga dilakukan oleh panitia Pameran Dokumentasi Kesusastraan Indonesia Modern yang juga tidak mempamerkan buku-buku karangan pengarang-pengarang Lekra.[32] Kritirium politik ini nampaknya tidak saja dilakukan oleh orang-orang

---

29. Ketiga orang pengarang Indonesia ini berada di Malaysia sewaktu konfrontasi: Takdir menjadi ketua Jurusan Melayu di Universiti Malaya, M. Balfas bekerja di Suara Malaysia, Radio Malaysia. Idrus bekerja sendiri sebagai penerbit tetapi mempunyai hubungan rapat dengan Suara Malaysia.
30. Diterbitkan oleh Lekra. Mulai 22 November 1962 dilarang diedarkan oleh Peperda Djakarta Raya, S.P. no. 130/62.
31. Lihat H.B. Jassin, "Ketjenderungan Negatif dalam Kesusastraan Indonesia", h. 113.
32. Pameran ini disponsor oleh Dewan Kesenian Djakarta, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dan Ikatan Penerbit Indonesia yang diadakan dari 11 s/d 17 November 1968 di Djakarta.

Lekra tapi juga dilanjutkan lagi selepas kemenangan *Orde Baru*. Tidak mengherankan kita sekiranya Prof. Dr. Prijono yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diwaktu itu dalam salah satu pidatonya menganggap pengarang-pengarang dan seniman Indonesia yang terkemuka adalah Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, Asrul Sani, Trisnojuwono, Sitor Situmorang, Utuy Tatang Sontani, Rukiah Kertapati, Nh. Dini, Ajip Rosidi dan Dodong Djiwapradja".[33] Kecuali Nh. Dini, Asrul Sani dan Trisnojuwono, semuanya adalah anggota-anggota Lekra dan LKN.

Apakah akibat dari penyerangan-penyerangan dari pihak Lekra dan LKN dalam bidang kulturil di Indonesia? Pertama-pertama, timbul semacam ketakutan di kalangan budayawan-budayawan dan seniman-seniman serta kaum intelektuil Indonesia dalam dunia mereka sendiri. Mereka takut untuk mencipta sesuatu yang bisa menggugat posisi mereka sebagai seniman dan intelektuil sekiranya mereka menulis karangan-karangan, dan mencipta kreasi-kreasi kesenian yang dianggap "kontra-revolusi", "anti-Manipol", ataupun "anti-rakyat". Sikap pemerintah diwaktu itu sudah mengambil garis perjuangan PKI dalam bidang kebudayaan di mana sokoguru mereka adalah terdiri dari ***kaum tani*, *buruh*** dan ***perajurit*** seperti mana yang pernah dipidatokan D.N. Aidit pada KSSR. Kebanyakan dari para sastrawan yang kami temui berkata, mereka terpaksa menyimpan karangan-karangan mereka dalam almari dan menunggu saja saat yang baik untuk diterbitkan. Ada juga pengarang-pengarang yang non-komunis, non-Lekra dan non-LKN yang meneruskan kegiatan mencipta dan menjaga kepentingan sosial mereka dengan secara sedar memaksakan diri untuk menerima Manipol-Usdek Soekarno dan sebagainya. Menurut S. Tasrif:

> "Dizaman rejim Soekarno peranan kaum intelektuil Indonesia tidak dapat dibanggakan, oleh karena sebaliknja daripada mengeluarkan suara untuk menentang berbagai kezaliman dan penjelewangan Soekarno, mereka kebanjakannja mendjadi "clique and claqeurs" dari Soekarno".[34]

Pengarang-pengarang harian yang berani menentang suasana politik yang ditunggangi PKI dimasa itu seperti Rosihan Anwar dari *Pedoman* dan Mochtar Lubis dari *Indonesia Raya*, melihat harian-harian mereka dilarang oleh pemerintah Soekarno. Mochtar Lubis yang terlalu lantang

---

33. Lihat Prijono, *Glimpses of Indonesian Education and Culture*. Djakarta: Balai Pustaka, 1964, h. 14.

34. Lihat S. Tasrif, "Situasi Kaum Intelektuil di Indonesia", *Budaja Djaja*, no. 4 th. 1 (September 1968), h. 201

mengecam rejim Soekarno dimasukkan ke dalam tahanan. Harian-harian yang pro-Masjumi dan PSI seperti *Abadi*, juga harian *Merdeka*, dilarang penerbitannya. Dengan demikian mass media untuk kaum sastrawan dan intelektuil bersuara dan menyatakan pendapat-pendapat mereka secara bebas tersekat sudah. Suasana politik diwaktu itu tidak memungkinkan dialog dan hanya slogan-slogan politik "progresif revolusioner" saja yang memenuhi kolong langit Indonesia.

bab IV 1. fungsi kebudayaan
? 2. apakah data dr. Lekra sendiri valid?
3. pidato² Sukarno memberikan umpan
cf. h. 67 — 4. karangan² mulai menyerang agama
cf. h. 94 5. serangan kpd Hamka, Jassin
6. th 50-an muncul pengarang dr. gol. lain
7. cara kerj. Lekra
8. indoktrinasi di bid. kulturil

BAB KELIMA

PEMBAHASAN TERHADAP ALIRAN REALISME SOSIALIS

Ilham yang mencetuskan realisme sosialis sebagai satu aliran dalam kesusastraan bersumber dari ajaran Karl Marx dan Friedrich Engles yang antara lain mengatakan, "Sejarah eksistensi masyarakat sejak mula hingga kini adalah sejarah pertentangan klas."[1] Bersamaan dengan pertentangan kelas tersebut diajukan pula konsep *historical materialism* yang mengatakan bahwa institusi politik dan kehidupan intelektuil dalam masyarakat ditentukan oleh anasir-anasir ekonomi yang menjadi basisnya.[2] Dalam masyarakat timbul dua "forces" yang bertentangan, yang apabila bertentangan antara keduanya itu nanti akan melahirkan *force* ketiga yang mempunyai warisan dari kedua *forces* yang bertentangan tadi. Konsep ini diberi nama *dialectical materialism* yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsuf Jerman, Hegel.[3] Marx mengemukakan satu tiori lagi yang diberi nama *Theory of surplus value* yang menyatakan bahwa *labour* (kerja) adalah satu-satunya pencipta nilai (value). Gaji yang diterima oleh kerja adalah kurang dari jumlah nilai (total value) yang didapatinya. Nilai yang lebih

1. Karl Marx dan Friedrich Engels, "Sosial Reality as Class Struggle," dalam *The Modern Tradition: Background of Modern Literature*. Richard Ellman and Charles Feidelson, Jr. (ed). New York O.U.P., p. 329
2. Lihat Moshe Decter, *The Profile of Communism. A Fact by Fact Primer*. 2nd. print. New York: Collier Books, 1966, p. 22.
3. Lihat Siegfried Marck, "Dialectical Materialism" dalam *History of Philosophical Systems*. Vergillus Ferm (ed.) New Jersey: Littlefield, Adams, 1961, p. 306–314.

(the surplus value) itu direbut oleh kapitalis yang mengeksploitasikan kerja itu. Inilah yang diartikan Marxisme sebagai ketidakseimbangan persamaan dalam masyarakat kapitalis.[4] Dengan demikian tiori Marxisme mencakupi empat prinsip doktrin tersebut.

Atas dasar Marxisme itulah nilai dan metode kesusastraan yang dikenal dengan nama realisme sosialis timbul. Kesusastraan pada kaum Marxis bukan menjadi barang luks, tapi alat yang ampuh untuk memperjuangkan kelas pekerja, buruh dan tani guna mencapai tujuan dan cita-cita Partai. Realisme sosialis yang demikian rupa tumbuh di Uni-Soviet pada tahun 1932 yang lebih terkenal dengan nama *Dzadanov Line*. Rene Wellek yang menanggapi realisme sosialis berkata:

> "The term covers a theory which asks the writer, on the one hand, to reproduce reality accurately, to be a realist in the sense of depicting contemporary society with an insight into its structure, and, on the other hand, asks the writer to be a socialist realist, which in practice means that he is *not* to reproduce reality objectively but must use his art to spread socialism: that is, communism, the party spirit, and the party line."[5]

Terjemahannya kira-kira demikian.

> Istilah itu mencakupi satu tiori yang meminta pihak penulis mereprodusir realitas setepat-tepatnya untuk menjadi seorang realis dalam pengertian menggambarkan masyarakat kontemporer dengan mempunyai 'insight' pada strukturnya. Dipihak lain pula realisme sosialis meminta penulis menjadi realis sosialis, yang dalam prakteknya membawa pengertian bahwa ia tidak mereprodusirkan realistas secara objektif tetapi menggunakan seninya untuk menyebarkan sosialisme, iaitu komunisme, semangat partai dan garis partai.

Oleh karena aliran realisme sosialis ini pertama-tama berkembang dan berpusat pada kesusastraan Uni-Soviet, maka kita dapati setelah diletakkan garis politik partai pada kesusastraan, maka kesusastraan Uni-Soviet dijadikan alat dalam pembentukan ideoloji massa pekerja menurut semangat sosialisme. Dengan demikian kesusastraan menjadi didaktik yang sangat menjolok, dan bersipat idealistis dalam pengertian bahwa kehidupan yang dipancarkan itu bukanlah kehidupan yang kontemporer, tapi kehidupan apa yang seharusnya menjadi idealisasi me-

---

4. Moshe Decter, *op. cit.*, p. 23
5. Lihat Rene Wellek, *Concepts of Criticism.* Edited with an introduction by Stephen G. Nichols, Jr. New Haven dan London: Yale University Press, 1964, p. 346

nurut Marxisme.[6] Menurut Rene Wellek lagi kritikus-kritikus Marxis yang baik memahami bahwa seni memerlukan watak, imagi, aksi dan perasaan. Sorotan atas konsep "type" merupakan sebagai jambatan antara realisme dan idealisme. "Type" tidak bermakna sesuatu yang umum atau yang representatif, tapi sesuatu "type" yang ideal, sesuatu "model" atau sesuatu hero yang harus dicontohi pembaca-pembaca dalam kehidupan yang aktuil.[7]

Nilai-nilai dan sikap individualisme tidak bisa dipraktikkan dalam kesusastraan realisme sosialis. Watak buruh, tani dan perajurit harus dimenangkan dalam ciptaan-ciptaan atau kreasi-kreasi realisme sosialis tanpa keraguan apapun. Golongan penghisap seperti tuantanah, kapitalis, golongan agama, feodal harus digambarkan sejelek-jeleknya, karena menurut realisme sosialis, golongan-golongan tersebut tidak mempunyai nilai-nilai kebaikan langsung. Demikianlah Prof. Bakri Siregar yang menyorot dari kacamata Marxisme menganggap watak Sjamsulbahri dalam *Sitti Nurbaja* karangan Marah Rusli bukan sebagai watak hero karena ia memperjuangkan kepentingan politik Belanda, tapi sebaliknya Datuk Meringgihlah yang dianggap hero karena ia menentang pemerintah Belanda walaupun sebenarnya Datuk Meringgih seorang kaya yang memeras. Di sini kelihatan bahwa anti-kolonialisme itulah yang menjadi perhitungan Bakri Siregar dalam bukunya *Sedjarah Sastra Indonesia Modern* (*I*).[8]

Pertentangan kelas adalah pokok konsep sosialisme dan komunisme. Gejala-gejala naluri dalam diri seorang individu yang sering bertentangan tidak menjadi perkiraan. Kepada komunis perjuangannya terletak kepada keseluruhan manusia yang tertindas, dan bukan manusia sebagai individu. Disinilah kelihatan betapa tidak wajarnya konsep realisme sosialis menilai manusia dan kemanusiaan itu. Sastra sebagai alat propaganda untuk "membangun" kesedaran rakyat dan politik massa adalah wajar bagi kaum komunis dan sosialis. Menurut Lenin masyarakat proletar harus didorong, digodok untuk menyertai perjuangan kaum komunis karena, sekiranya tidak dilakukan demikian, kaum proletar akan kembali tinggal dalam dunia mereka yang beku.[9] Dengan lain perkataan penciptaan sastra dan seni yang bebas, hasil dari pengalaman individu dan intuisi sendiri yang memberikan jalur-jalur individualisme dalam

---

6. Rene Wellek, *loc. cit.*, p. 346
7. Rene Wellek, *ibid.*, p. 347
8. Lihat Prof. Bakri Siregar, *Sedjarah Sastra Indonesia Modern* (*I*) h. 52.
9. Lihat Alfred G. Meyer. *Leninism*. New York: Frederick A. Praeger, 1965, p. 37–65

penciptaan sastra, tidak bisa diketengahkan. Setiap kreasi sastra dan seni harus disesuaikan dengan perintah dan tujuan komunis. Kebebasan untuk mengkritik secara jujur terhadap programa Partai atau ajaran-ajaran komunisme tidak bisa berlaku, dan kaum pengarang dan seniman hanya diperintah untuk memuja, memuji dan menggerakkan massa bagi kepentingan Partai dan komunisme. Pengekangan intelektuilisme inilah yang menyebabkan banyak pengarang yang menjadi komunis atau bersimpati dengan komunisme menarik diri dari organisasi tersebut atau ideoloji tersebut seperti Ignazio Silone, Andre Gide, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan Louis Fischer.[10]

Realisme sosialis memperlihatkan karya-karya sastra yang menentang, melawan dan menyerang golongan-golongan penghisap, dan memuja serta menyokong kaum terhisap dan tertindas dalam perjuangan mereka, serta meningkatkan konflik-konflik tersebut hingga tercapai revolusi.[11] Di sini kelihatan betapa sempitnya daerah penceritaan aliran realisme sosialis. Bagaimanakah sikap aliran realisme sosialis tentang konflik-konflik dalam percintaan pemuda pemudi dari kelas terhisap? Apakah konflik yang dihadapi mereka itu harus dihapuskan begitu saja? Atau apakah percintaan antara dua makhluk itu harus diarah supaya mereka meninggalkan cinta yang bersipat peribadi untuk mencintai pabrik-pabrik besi, pertanian dan Partai cuma? Menurut N.G. Tjernisevski cinta demikian adalah cinta anak muda yang hanya dihasilkan untuk mengisi ruang-waktu, "terlalu penuh sentimen yang tak sihat bagi orang dewasa."[12] Soal-soal peribadi yang paling intim, lambang-lambang individualisme dari lirik-lirik puisi yang individualistis dan yang bersipat kontemplatif ditolak oleh Marxisme.[13] Pada Marxisme masyarakat itu sendiri "menjadi sebuah karya seni."[14]

Metode penilaian sastra dari aliran realisme sosialis adalah penilaian ekstrinsik yang tidak bisa memberi asas yang rasional tentang estetik selanjutnya kritik dan penilaian sastra. Menurut pendapat Rene Wellek,

---

10. Lihat Richard Crossman, *The God That Failed*. 2nd print New York: Bantam Books, 1954.
11. Lihat Pramoedya, "Realisme-sosialis dan Sastra Indonesia", satu prasaran pada Seminar Fakultas Sastra, Universitas Indonesia yang diadakan pada 26 Januari 1962. (stensilan sahaja). Lihat juga Donald W. Heiney, *Contemporary Literature*. New York: Barrin's Educational Series, 1954, p. 496–497
12. Lihat N.G. Tjernisevski, *Hubungan Estetik Seni dengan Realitet*. Terjemahan Samandjaja. Djakarta: Lekra, 1961, h. 154.
13. Lihat William K. Wimsatt, Jr. dan Cleanth Brooks, *Literary Criticism. A Short History*. Calcutta: Oxford & IBH Publishing Co. 1967, p. 479
14. Wimsatt dan Brooks, *ibid.*, p. 479. Petikan dari Edmund Wilson.

"Penilaian dari segi sebab dan akibat (causal study) tentang kesusastraan tidaklah cocok pada penganalisaan, penguraian dan penilaian sesebuah cipta sastra."[15] Pramoedya Ananta Toer dalam tanggapannya tentang realisme sosialis pernah berkata, "Sesuai dengan logika, dan sesuai pula dengan kenjataan hidup, estetika mengambil tempat jang terachir dalam kehidupan sosial. Perut jang lapar lebih banjak membutuhkan nasi dari keindahan...."[16]

Realisme sosialis mementingkan watak-watak yang digambarkan dalam sesebuah karya sastra. Perlakuan terhadap watak-watak itu, jalan sejarah dan aksinya dalam sesebuah ciptasastra menjadi ukuran dalam kritik realisme sosialis. Apakah watak A itu memenangkan kaum penghisap atau bersipat reaksioner atau tidak? Apakah watak B itu pejuang yang gagah memenangkan kaum buruh, tani atau perajurit ataupun tidak? Apakah si C watak yang ragu-ragu dalam lukisan pencipta dan sebagainya. Satu hal yang nyata, sebuah karya yang baik dan bernilai dari segi Marxisme adalah gambaran optimisme dan kemenangan bagi kaum proletar dan rakyat tertindas diakhir cerita itu.

Seorang haji adalah sama darjah kejahatannya dengan kapitalis, dengan imperialis dan borjuis karena manusia-manusia itu digolongkan kepada satu kelas—kelas penghisap. Pendapat-pendapat seumpama ini adalah bertentangan dengan kelakuan manusia pada umumnya. Dalam sesuatu masyarakat terdapat juga individu-individu yang baik dan yang jahat baik dari golongan penindas maupun dari golongan tertindas. Gejala-gejala baik dan buruk ini tetap ada dan tetap hidup. Dalam kehidupan biasa terdapat petani yang jahat, yang malas; ada buruh yang jahat dan begitu juga golongan borjuis. Justru itu, untuk menyelaraskan realisme sosialis dalam kreasi sastra ia memperlihatkan secara menjolok perkembangan watak yang dibentuk-bentuk, jalan cerita yang sengaja diolah-olah agar supaya sesuai dengan cita-cita komunisme, atau garis yang telah ditetapkan Partai.

Kepada kritikus Marxis tujuan akhir dalam persajakan ialah untuk mengajar dan mempengaruhi pembaca, dan bukan melihat ciri-ciri penilaian komposisi persajakan itu, dan kebenaran 'truth' yang diungkapkan ialah Marxisme.[17] Oleh karena yang diungkapkan penyair sosialis atau komunis ialah kebenaran Marxisme, maka pengalaman-penga-

---

15. Rene Wellek dan Austin Warren, *Theory of Literature*. Penguin, 1963, p. 108
16. Pramoedya, "Realisme-sosialis...", *op. cit.*, p. 56.
17. Lihat Cleanth Brooks, *Modern Poetry and the Traditions*, New York: O.U.P. A Galaxy Book, 1965, p. 47.

lamannya serta cita-cita yang terbendung dalam jiwanya terpaksa dihindari, dan ia cuma melahirkan sajak-sajak yang bersipat "exclusion", dan dengan demikian ia seolah-olah memudahkan pengalaman-pengalaman itu.[18]

Bersesuaian dengan realisme sosialis maka tidak heranlah mengapa penyair-penyair yang berbakat seperti Hr. Bandaharo, Agam Wispi, Sobron Aidit, S. Anantaguna, dan Sitor Situmorang banyak sekali menghasilkan puisi-puisi pemujaan terhadap kemajuan Republik Rakyat Tiongkok, dan sipat-sipat kepahlawanan rakyat-rakyat dari negara-negara komunis yang lain. Kebanyakan puisi-puisi yang dihasilkan mereka terlalu dipengaruhi oleh hasrat yang meluap untuk memuja dan memuji kemajuan negara-negara komunis itu hingga puisi-puisi itu merupakan sebagai propaganda. Drs. M.S. Hutagalung, seorang kritikus dan sarjana sastra, sewaktu menilai kumpulan puisi *Zaman Baru* karangan Sitor Situmorang menganggap kebanyakan dari puisi-puisi itu bukan lagi puisi.[19]

Sebagai contoh puisi-puisi yang populer di kalangan penyair-penyair Lekra, kami berikan di bawah ini.

Sobron Aidit, adik kepada D.N. Aidit, sewaktu memperingati hari ulangtahun PKI antara lain menulis dalam puisinya "kawan separtai bekerdja" demikian:

Orang2 terus bekerdja bagaikan kuda
Aku bersandar terpaku lesu
Mataku kuju menembus djeradjak djendela
Betapa orang2 menerus madju.
Kali ini keputuskan, tidak:
Aku djuga ikut berlumba
Biar sakit, asal dapat, tak usah terelak
Masih bangga mati sedang bekerdja.[20]

Hr. Bandaharo yang juga menyanyikan lagu pekerja dalam puisinya antara lain meninggalkan kata-kata puisi seperti ini:

Kau, massa pekerdja Indonesia
kau mati dilaut menangkap ikan
kau mati menebang kaju di tengah hutan
kau mati di tambang2

---

18. Cleanth Brooks, *ibid.*, p. 49
19. Dimuat dalam *Mimbar Indonesia*, no. 12, th. XVIII, (Disember 1963).
20. Lihat puisinya, "kawan separtai bekerdja" (23 Mei 1961 pada ulangtahun Partai) dalam *Partai dalam Puisi*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1962, h. 21

kau mati dipabrik digilas mesin
kau mati menjadap karet
kau mati mengangkut beban
kau mati di ladang2
kau mati dikolong djembatan
kau mati lapar di tepi pasir
dimana sadja kau mati sebagai kuli
dimana sadja kau terkapar menambah lapar
disetiap tapaktanah peluh dan darah.
kau tjurahkan sebagai pahlawan.[21]

Sitor Situmorang yang juga menanggapi soal pekerdja, dalam puisi-nya "makan roti komune" antara lain menyair:

Pergaulan, setiakawan dan harapan adalah
nasi, adalah roti serta bunga-buah
Jang mengisi kehidupan pekerdja
Djika bebas
dari kebohongan, penindasan dan penipuan
pendjadjahan, feodalisme dan banditisme.
Pergaulan, setiakawan dan harapan
kudjumpai dan kurasakan
dalam komune ini. Oleh karena itu:
Aku ingin minum dari kehangatan
harapan saudara2.
Aku ingin mendjabat tangan
saudara2 jang sibuk bekerdja.
Aku ingin makan roti ini,
roti komune, sebagai tanda
pulihnja pergaulan, setiakawan dan
harapan antara manusia,
buat selama-lamanja dalam tjinta,
tjita2 dan kenjataan dunia sosialis.[22]

Cinta kasih terhadap kaum tertindas dan terhisap mendapat tempat utama dalam puisi-puisi penyair-penyair Lekra dan simpatisan-nya. Petani-petani yang tidak punya tanah dan hidup menderita, kisah-kisah tragis mengenai kaum tani seringkali diungkapkan dalam puisi-puisi mereka. Dua buah kumpulan puisi masing-masing berjudul *Jang Ber-*

---

21. Hr. Bandaharo dalam puisinya "Bangkit dan berjanjilah," dalam *Dari Bumi Merah*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1963, h. 49
22. Sitor Situmorang, *Zaman Baru*. Djakarta: Penerbitan Zaman Baru, 1961, h. 18

tanahair tapi Tidak Bertanah dan *Matinja Seorang Petani* bisa dijadikan contoh tentang tema-tema kaum tani yang kami sebutkan itu. Di antara puisi yang dicipta S. Anantaguna, penyair kumpulan *Jang Bertanahair tapi Tidak Bertanah* yang sangat menarik adalah seperti di bawah ini:

Suatu kali aku akan datang dalam mimpi
aku bukan petani tak bertanah lagi
Mimpi tanah itu indah
djuga kau Suminah.

Suminah, o, Suminah—sama tjinta
bagi bapamu miskin hanja dosa
aku diusir lari kekota.

Bila malam Suminah, hitungkan bintang
djumlah kerdjaku di tanah bapamu tidak terbilang
sebanjak tjinta kuutjapkan dikebun pisang.
Bila bulan bulat Suminah
peluklah tanah dari lembah
pernah kugarap, njenjaklah tidur tanpa resah...[23]

Sebuah kisah kematian seorang petani, L. Darman Tambunan, karena ditembak oleh pihak berwadjib akibat tanah garapan, memberi dorongan kepada penyair-penyair Lekra untuk menghasilkan puisi-puisi protes sebagai pembelaan terhadap kematian petani tersebut. Sebanyak sebelas orang penyair Lekra mengumpulkan puisi-puisi mereka dalam sebuah kumpulan yang diberi nama *Matinja Seorang Petani*. Oleh karena kumpulan puisi ini dianggap berbahaya kepada masarakat, maka pihak pemerintah melarang penyibarannya pada tahun 1962. Di sini kami turunkan petikan dari puisi Agam Wispi yang berjudul "Matinja seorang Petani":

depan kantor tuan bupati
tersungkur seorang petani
karena tanah
karena tanah
dalam kantor barisan tani
silapar marah
karena darah
karena darah
tanah dan darah

23. Lihat puisi S. Anantaguna "Tjinta dan Tanah" dalam kumpulan puisinja *Jang Bertanahair tapi Tidak Bertanah*. Djakarta: Lekra, (1962), h. 34

memutar sedjarah
dari sini njala api
dari sini damai abadi...[24]

Di samping tema-tema pokok yang berkisar dalam daerah tani dan buruh penyair-penyair Lekra juga mengungkapkan puisi-puisi perjuangan seperti puisi-puisi melawan neo-kolonialisme, feodalisme dan imperialisme, dan juga mencipta puisi-puisi yang mendewa-dewakan revolusi. Sebagai taktik politik komunisme pihak Lekra juga menghasilkan kumpulan puisi-puisi yang bertemakan perdamaian. Tidak jarang pula pihak penyair Lekra menyerang pihak lawan politik yang lain, misalnya memburuk-burukkan Darul Islam.

Suatu hal yang menarik perhatian kita bila membaca kumpulan puisi penyair-penyair Lekra ialah perasaan kekaguman para penyair terhadap pembangunan dan lain-lain aspek kehidupan bangsa-bangsa di negara-negara komunis seolah-olah meninggalkan kesan-kesan "seni" yang mendalam hingga mereka bisa mencipta puisi tentang lawatan-lawatan mereka itu. Kumpulan-kumpulan puisi itu adalah sumbangan konkrit penyair-penyair tersebut terhadap PKI/Lekra sebagai pernyataan rasa "terimakasih" mereka terhadap bantuan yang diberikan PKI/Lekra dari segi materi dan posisi sosial mereka sebagai seniman. Sebagai pernyataan "terimakasih" para penyair menyumbangkan puisi-puisi yang bisa diterima oleh Partai, dan yang dikehendaki oleh Partai.

Oleh sebab negara-negara yang dilawati mereka adalah negara-negara komunis, maka nyanyian-nyanyian sang penyair haruslah bernadakan optimisme, rasa kekaguman dan pemujaan terhadap kemenangan-kemenangan tersebut. Antara kumpulan puisi yang mempunyai latarbelakang negara-negara komunis di luar Indonesia termasuklah kumpulan Hr. Bandaharo *Dari Bumi Merah; Sahabat* kumpulan Agam Wispi; *Bukit 1211* kumpulan bersama Rumambi, Sudisman, F.L. Risakotta (Lekra, 1959), *Dinasti 650 Djuta* kumpulan bersama Klara Akustia, Agam Wispi, S. Anantaguna, F.L. Risakotta, Njoto, Boejoeng Saleh, Hr. Bandaharo, Sobron Aidit, T. Iskandar A.S., Subronto K. Atmodjo, Asmara Hadi dan Sjarifuddin Tandjung (Lekra, 1961). Di samping itu Sitor Situmorang menghasilkan pula kumpulan puisi *Zaman Baru* yang melukiskan kekagumannya tentang pembangunan di Republik Rakyat Tiongkok.

---

24. Kumpulan puisi ini diterbitkan oleh Lekra, 1961. Penyair-penyair yang termasuk dalam kumpulan ini ialah Agam Wispi, Amarsan Ismail Hamid, Benny Tjung, Chalik Hamid, F.L. Risakotta, Hr. Bandaharo, Klara Akustia, Ratini, Rumambi, Sobron Aidit, S. Anantaguna dan T. Iskandar A.S.

Sudah pasti kita tidak bisa mengatakan bahwa semua puisi yang dihasilkan penyair-penyair Lekra bersipat propaganda, dan tidak bernilai seni. Oleh karena penyair-penyair itu menjadi anggota-anggota Lekra tidak bermakna seluruh ciptaan mereka dihancurkan oleh propaganda komunis. Masih terdapat puisi-puisi yang baik dari pena Agam Wispi, S. Anantaguna dan Hr. Bandaharo. Tapi puisi-puisi yang bernilai itu memang kurang sekali dihasilkan mereka lantaran jiwa mereka sudah dibelenggui oleh godokan ajaran-ajaran komunisme. Tema-tema puisi Lekra adalah populer bukan saja di kalangan mereka tapi juga di kalangan penyair-penyair lain yang non-Lekra. Penyair-penyair dan pengarang-pengarang yang non-Lekra juga banyak mencurahkan pikiran dan menghasilkan karya-karya tentang manusia-manusia yang melarat, kaum tani, kaum buruh yang miskin dan seribu macam kemelaratan yang lain lagi.

Yang menjadi persoalan dalam ciptaan-ciptaan sastrawan-sastrawan yang menganut realisme sosialis ialah penyerahan diri dan jiwa sastrawan kepada tuntutan Partai Komunis, yang memperjuangkan "Politik adalah Panglima". Bilamana tujuan politik mengatasi segala-segalanya maka kita merasakan sipat individualisme sang sastrawan atau seniman menjadi semakin kabur. Oleh karena realisme sosialis yang tunduk kepada kehendak-kehandak Partai itu terlalu mengongkong, maka pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* menolak realisme sosialis yang demikian, karena "djiwa objektif jang berpangkal pada budi-nurani universil tidak selaras dengan realisme sosialis".[25] Acapkali para penyair dan sastrawan digerakan oleh hal-hal yang di luar dari dirinya hingga persoalan-persoalan yang hendak dikemukakan itu kurang mendapat "kematangan" dalam jiwa penyair dan sastrawan itu sendiri. Oleh karena cita-cita Partai yang hendak diketengahkan maka dalam bidang puisi Lekra kita bersua pula puisi-puisi ciptaan D.N. Aidit, Njoto dan Sudisman yang peranan mereka lebih terkenal dalam dunia politik PKI dari dunia penyair.

Puisi protes seperti yang banyak dihasilkan oleh penyair-penyair Lekra seringkali membawa nada pengucapan yang sama hingga menjadikan bacaan puisi-puisi demikian sangat "monotonous". Penyair seolah-olah dipaksa menyempitkan segala temanya kepada peristiwa yang menitikberatkan penderitaan rakyat tertindas dan hubungan peristiwa itu dengan revolusi serta cita cita Partai. Bagi pihak Lekra konsep bahwa suatu pengalaman puisi adalah bersipat individuil yang

25. Lihat lampiran tentang *Manifes Kebudayaan* pada bagian akhir tulisan ini.

diwarnai oleh "mood" (suasana) dan persediaan seseorang seperti misalnya pendidikan seseorang, personalitet pembaca dan suasana kulturil pada waktu itu, pengaruh-pengaruh agama dan lain-lain aliran filsafat,[26] tidak bisa diterimanya. Di sinilah kelihatan bentrukan pendapat dan sikap antara penikmat-penikmat puisi dari mereka yang non-komunis dengan orang-orang komunis.

Sebuah puisi atau hasil seni yang baik akan memberikan perasaan yang tidak bercerai antara dunia objektif dengan objektif, dan kita merasakan bukan hidup dalam dunia yang konkrit, atau hidup dalam kebulatan individu kita, tapi lahir dari dua pertembungan subjektif dan objektif itu, suatu perasaan atau dunia baru yang sangat-sangat puitis dan indah, demikian pendapat Ernst Cassirer.[27] Kontek sebuah puisi tidak bisa dipisahkan dari bentuknya—persajakannya, melodinya dan ritmenya. Anasir-anasir formil ini adalah bagian daripada intuisi kesenian itu sendiri.[28] R.G. Collingwood menganggap sebuah ciptaseni itu imitatif bila ia dihubungkan dengan sebuah ciptaseni yang dianggap sebagai contoh yang memenuhi syarat keunggulan sipat seninya; ianya dianggap representatif bila ia dihubungkan dengan sesuatu dalam "nature", iaitu sesuatu yang bukan karya seni.[29]

Hal ini, kami berpendapat, ada kebenarannya bila diteliti lebih mendalam karya-karya sastra yang ditinjau dari kacamata realisme sosialis. Konsep realisme sosialis atau Marxisme hanya melihat dua golongan masyarakat yang sering berkonflik, masyarakat tertindas di satu pihak dan masyarakat menindas dipihak yang lain. Justru itu kemanusiaan yang bertendensi sosial sering mengemukakan imitasi realitet dalam "nature", atau masyarakat yang terdapat dalam realitet itu sendiri. Tendensi politik komunisme ditonjolkan dalam pelukisan karya sastra realisme sosialis, dan atas dasar politik inilah sebuah karya itu dinilai mutu keseniannya. Dengan demikian sebuah karya sastra seperti *Dr. Zivago* karangan Boris Pasternak tidak mendapat kritikan yang baik dari kritikus-kritikus realisme sosialis di Uni-Soviet, karena karya itu dianggap bertentangan dengan cita-cita politik komunisme dan cita-cita revolusi Uni-Soviet. Karya Sholokov yang memenangi Hadiah Nobel terpaksa dirobah empat kali untuk *And Quiet Flows The Don* mendapat

26. Rene Wellek dan Austin Warren, *op. cit.*, h. 146
27. Lihat Ernst Cassirer, *An Essay on Man*, 12th print. New Haven: Yale University Press, 1964, p. 145
28. Ernst Cassirer, *ibid.*, p. 155.
29. Lihat R.G. Collingwood, *The Principles of Art*. London: Oxford University Press, 1963, p. 42

"restu" dari partai komunis dan kritikus-kritikus sastra Uni-Soviet.

Kita mengakui pendapat Marxisme bahwa kesusastraan ialah "social enterprise". Tapi kita tidak membicarakan kesusastraan itu sebagai refleksi yang berdasarkan sosio-ekonomis, tapi sebaliknya kita menyatakan bahwa kesusastraan itu ditujukan kepada suatu grup sosial, dan pada peringkat itu ia mempunyai pengertian sosial apakah disedari atau tidak disedari oleh pengarangnya. Tidak perlu kita mendifinisikan grup itu sebagai kelas dalam pengertian Marxisme—"a functional economic class". Memang kesusastraan itu ditujukan untuk sesuatu grup sosial atau kelas dalam pengertian Marxisme itu, tapi dalam grup yang besar itu masih ada grup-grup yang lebih kecil yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tertentu pula. Grup-grup yang lebih kecil inilah seringkali mendapat perhatian kesusastraan.[30]

Beberapa buah karya sastra yang dihasilkan sastrawan-sastrawan Lekra bukan memancarkan grup-grup kecil yang dimaksudkan di atas, tapi sebagai dua kelas manusia yang bertentangan. Utuy Tatang Sontani dalam sebuah karyanya yang kernama *Si Kampeng*[31] memperlihatkan realisme sosialis seperti mana yang dikehendaki PKI/Lekra. Si Kampeng dilukiskan sebagai anak haram seorang haji yang bernama Haji Gopur. Karena didesak oleh sang anak yang hendak mengetahui siapakah ayahnya, sang ibu menceritakan rahsia yang terpendam itu. Terjadi pertengkaran antara Si Kampeng dengan ibunya. Haji Gopur mencampuri perkelahian itu, tapi dia dinasihati oleh seorang dukun supaya memberi tanahnya yang lebih kepada Si Kampeng, dan anggaplah Si Kampeng sebagai anaknya sendiri. Tapi kedua-dua orang itu, tidak mau mengakui sebagai anak dan ayah antara keduanya. Terjadi pergaduhan dan dalam pergaduhan ini Haji Gopur terbunuh.

Di sini jelas kelihatan pentrapan realisme sosialis di dalam sastra. Persoalan besar antara Si Kampeng dan Haji Gopur ialah soal "perdamaian" antara kedua yang tidak bisa dilaksanakan. Bukankah Haji Gopur itu seorang haji dan tuantanah? Musuh besar PKI ialah tuantanah (salah satu setan desa menurut istilah PKI), di samping imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme. Si Kampeng dalam lukisan Utuy merupakan seorang manusia dari golongan tertindas dan teriniaya, dan ia merupakan sebagai mangsa dari kebuasan tuantanah itu. Tuantanah dalam *Si Kampeng* ialah seorang haji, dan haji pada interpretasi PKI/ Lekra adalah golongan agama yang harus dibasmi. Utuy paling kon-

30. Lihat Graham Hough, *An Essay on Criticism*. London: Gerald Duckworth & Co., 1966, p. 33
31. Diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sedar, 1964, 36 halaman

sekwen mengemukakan tiori pertentangan kelas dalam karyanya ini. Haji Gopur, tuantanah, tewas di tangan Si Kampeng, lambang golongan tertindas di Indonesia.

Sobron Aidit juga mengungkapkan karangan-karangan yang bertemakan cita-cita politik PKI dalam sebuah kumpulan novelet dan ceritapendeknya yang diberi nama *Derap Revolusi.*[32] Dalam sebuah noveletnya yang bernama "Kisah Pak Kapten", Sobron melukiskan bagaimana seorang perwira tentera pada mulanya sangat doyan memainkan plat-plat luar negeri di sebuah hotel tempat ia dan keluarganya tinggal hingga mengganggu ketenteraman orang lain. Bila ia berpindah pada sebuah rumah yang lain pak Kapten mengganggu lagi ketenteraman orang sekitar rumahnya dengan memutarkan film di tempat lalulintas orang ramai, dan mengadakan pula acara dansa a la barat dengan lagu-lagu dari plat-plat luar negeri. Bila Presiden Soekarno mengistiharkan Manipol Usdek dan seluruh rakyat Indonesia dipaksa mengunyahnya, pak kapten juga turut mempelajari Manipol. Lama kelamaan ia menjadi sedar dan menjadi manipolis yang baik. Pada mulanya pak kapten menentang anak lelakinya yang hendak belajar pada universitas di Uni-Soviet, tapi selepas menjadi manipolis yang baik ia membangga-banggakan kemajuan anaknya di negara komunis itu.

Dalam perkembangan watak pak kapten, Sobron mencuba memperlihatkan "kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewangan" yang dilakukan oleh pak kapten, karena ia masih belum mengetahui ajaran-ajaran Manipol-Usdek Soekarno yang dianggap revolusioner itu. Bukankah Soekarno dalam Manipolnya mengecam kebudayaan barat, tarian-tarian dan musik-musikan barat? Bukankah Soekarno yang menyuruh bangsa Indonesia kembali kepada kepribadian kebudayaan nasional? Bukankah Manipol-Usdek itu sebagai ajaran resmi negara untuk ditrapkan dan dicamkan oleh bangsa Indonesia? Kesimpulan dari moral yang hendak ditonjolkan Sobron Aidit dalam ceritanya ialah seorang warganegara Indonesia yang baik adalah seorang manipolis yang baik, dan konsep Manipol, kepada orang-orang PKI/Lekra, adalah sebagian dari pancaran ideoloji komunisme juga. Di sinilah letaknya "nilai" karya Sobron dari aspek politik PKI/Lekra dalam kesusastraan

Pramoedya menganggap karyanya *Perburuan* memenuhi syarat realisme sosialis karena "sipedjuang itu achirnja menang, jang ragu2 disadarkan dan simusuh dikalahkan."[33] Bila dibandingkan *Perburuan*

32. Diterbitkan oleh Lekra, 1963, 188 halaman.
33. Pramoedya, "Realisme sosialis...", h. 52

yang memenangi hadiah pertama Balai Pustaka pada tahun 1949,[34] dengan karya-karya Sobron Aidit *Derap Revolusi* dan Utuy Tatang Sontani *Si Kampeng*, sudah pasti kita melihat jarak perpisahan estetis yang besar antara karya-karya itu. Unsur-unsur propaganda dalam *Perburuan* tidak begitu ketara kalau dibandingkan dengan *Si Kampeng* atau *Derap Revolusi*. Ini tidak mengherankan kita sebab *Perburuan* dicipta sebelum Pramoedya menjadi aktivis Lekra. Tapi kalau kita bandingkan *Perburuan* dengan karyanya *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* yang diciptanya setelah ia menjadi anggota Lekra, maka kita dapati mutu seninya menjadi sangat merosot.

Sungguhpun Lekra menjadikan salah satu metode kerjanya "meluas dan meninggi", iaitu meluas dengan arti mencakupi massa rakyat dan meninggi diartikan menghasilkan mutu karya yang baik,[35] maka di sini sebenarnya sudah ada perpaduan yang baik antara bentuk dan isi dalam penciptaan realisme sosialis. Tapi yang sering terjadi ialah mutu artistik itu sering di kebelakangkan, hingga kebanyakan karangan-karangan yang terbit lebih banyak memuatkan nada-nada perlawanan, dan pertentangan yang bersipat propaganda sosilisme dan komunisme murah. Sebagai contoh kami kemukakan sebuah puisi ciptaan S. Anantaguna yang berjudul "tjerita tja tje tung".

Tja Tje Tung
kebenaran ditembaki
bagaimana bisa mati

Pendjara penuh darah
tidak bisa kalah
dihati Tentera Merah.

Api api, bakarlah!
setapak tanah menjala
aku djadi bara.

Api, api, bakarlah!
tidak bisa mati
dunia dalam hati.

---

34. Lihat H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Moden dalam Kritik dan Esei* (*II*). Cetakan ke 2. Djakarta: Gunung Agung, 1967, h. 109
35. Lihat *Lapuran Kebudajaan Rakjat* (I) h. 37-43

Tja Tje Tung
kembang pahlawan
sekar didaratan.

Dalam pendjara penuh abu
dalam hati tanda seru!
bakarlah, bakarlah
kebenaran tak bisa kalah![36]

Simplifikasi pengalaman manusia yang dituangkan dalam karya sastra inilah yang sukar diterima oleh orang yang ingin melihat karyasastra sebagai paduan isi dan bentuk yang indah dan menarik. Ciri-ciri estetis adalah satu keharusan dalam karyasastra dan seni lainnya, dan ini tidak bisa ditolak dengan gampang. Walaupun sikap seniman dan sastrawan itu "committed" terhadap sesuatu filsafat hidup, namun kesedaran bahwa ia adalah seorang pencipta seni, mutlak tidak bisa diabaikan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Wiratmo Sukito:

> "Sesuatu karja seni atau sastra jang ditjiptakan dengan kesungguhan maka karja tadi dengan sendirinja akan mengandung engagement, karena manusia adalah a priori machluk bermasjarakat...Di dalam karjanja sudah terkandung nilai-nilai, jaitu nilai-nilai sosial, atau nilai-nilai patriotik, dsb., akan tetapi nilai demi nilai itu telah impliceren didalamnja. Dirumuskan dengan sederhana, tudjuan sang seniman ialah kebenaran."[37]

bab V. 1. teori marxisme yg. jadi realisme-sosial dl sastera (49)
2. fungsi sastera pd Marxis (50)
3. pendapat Rene Wellek ttg 'real-sos-' (50)
4. yg. hrs. dicapai oleh seniman real-sos
5. akibat konsep tsb. (51)
6. sifat sastera sos (52 + 58)
7. akibat sifat tsb. (52)
8. metode penelaahan (52)
9. sastera yg. baik dan akibatnya (53)

36. Lihat kumpulan puisi *Dinasti 650 Djuta*. Djakarta Lekra, 1961, h. 20
37. Lihat Wiratmo Sukito, "Manusia, Sastra dan Politik," dalam *Antologi Esei tentang Persoalan2 Sastra.* Dipilih dan disusun oleh Satyagraha Hoerip. Djakarta: PT Sinar Kasih, 1969, h. 37

10. 'Dr. Zhivago' tak baik
11. nilai 'Perburuan' Pram (61)
12. sastera yg benar (63)

BAB KEENAM

REALISME SOSIALIS SEBAGAI SIKAP SASTRA LEKRA

Setelah kita meninjau latar belakang perkembangan dan sikap ofensif Lekra di bidang kebudayaan, pendidikan dan politik secara umum, dan mengetahui pula aliran realisme sosialis yang bermula dalam kesusastra-an Uni-Soviet, maka sekarang kita meninjau pula kegiatannya yang khas yaitu dalam bidang kesusastraan. Dari "Mukaddimah" Lekra, pidato-pidato D.N. Aidit dan Njoto, dan lapuran-lapuran umum yang dike-mukakan dalam kongres, sidang pleno Lekra, dan juga dari karangan-karangan yang pernah disiarkan dalam majalah *Zaman Baru* ataupun dalam tulisan orang-orang Lekra yang terkemuka, sikap sastra mereka adalah jelas. Lekra adalah sebuah organisasi kebudayaan yang revolusio-ner yang berpandukan pada hukum-hukum Revolusi dan ajaran-ajaran Marxisme Leninisme. Konsep sastra dan budaya Lekra "Politik adalah Panglima" mendorong semangat anggota-anggotanya untuk melawan, menghancur musuh-musuh rakyat iaitu imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, dan menghidupkan cita-cita sosialisme yang akhir nanti menuju kepada masyarakat komunis tanpa kelas.

Menurut PKI/Lekra Revolusi Indonesia masih belum selesai karena kemenangan-kemenangan yang kelihatan adalah kemenangan kaum kapitalis dan feodalis yang tidak menguntungkan golongan terbesar di Indonesia—tani dan buruh. Sistim demokrasi liberal yang dianuti pe-merintah sebelum 1959, sebelum lahirnya Manipol-Usdek, lebih ba-nyak membawa kehancuran cita-cita untuk mensosialiskan Indonesia.

Soekarno sendiri menganggap Revolusi Indonesia belum selesai,[1] dan dalam suasana demokrasi terpimpin PKI mengambil kesempatan untuk memperkembang dan meluaskan pengaruhnya di kalangan rakyat untuk tujuan politiknya sendiri.

Penonjolan konsep realisme sosialis sebagai kritirium penilaian kesusastraan pada Lekra bukan suatu hal yang mengherankan sekiranya orang memahami cita-cita komunis. Ajaran komunis berkehendakan kesatuan aksi dengan daya pemikiran. Setiap anggota komunis yang tulen diajar atau membentuk diri sendiri dan juga orang-orang lain untuk mempercayai bahwa fraksi-fraksi dan pertentangan dalam Partai adalah kesalahan yang paling besar, karena dengan perpecahan demikian sukarlah bagi komunis untuk berkuasa.[2] Justru itu realisme sosialis sebagai konsep sastra Lekra adalah sealiran dengan cita-cita komunis, di mana terlahir dalam acuan konsep tersebut "kesatuan aksi dengan dayapikir" komunisme sejati.

Dalam hal ini Lekra mendapat seorang "panglima" sastra yang terkemuka untuk menjadi jurubicaranya dalam kesusastraan. Tokoh tersebut ialah Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan Indonesia yang menghasilkan novel-novel bermutu seperti *Keluarga Gerilja*, *Perburuan* dan *Bukan Pasar Malam*. Sejarah hidup dan kreativitet Pramoedya sejak ia terkenal sebagai sastrawan sangat menarik hati. Ia pernah melawat ke negeri Belanda atas pengongkosan Sticusa bersama keluarganya selama satu tahun (Jun 1953 hingga Januari 1954), dan pada bulan Oktober 1956 ia mendapat undangan dari Lembaga Sastrawan Tiongkok Pusat untuk melawat Republik Rakyat Tiongkok bagi menghadhiri hari peringatan ke 20 meninggalnya Lu Shun.[3] Menurut Drs Baharum Rangkuti yang didapatinya dari Pramoedya sendiri, "Di Tiongkoklah diperolehnja pengertian jang agak meluas tentang pentingnja faktor rakjat djelata dalam pembinaan bangsa jang kuat padu bersama dengan pembangunan menjeluruh".[4]

Sekembalinya dari menghadiri Konferensi Pengarang Asia-Afrika di Tashkent, Uni-Soviet dan melawat Republik Rakyat Tiongkok kali keduanya, Pramoedya telah dilantik menjadi anggota pimpinan Lekra

---

1. Baca pidato-pidato Presiden Soekarno sejak 1959 hingga 1964.
2. Lihat Milovan Djilas, *The New Class, An Analysis of the Communist System*. 6 th. printing. New York: Frederick A. Praeger, 1962, p. 157
3. Lihat B. Rangkuti, *Pramoedya Ananta Toer*. Djakarta: Gunung Agung, 1963, h. 20.
4. B. Rangkuti, *ibid.*, h. 21.

dalam Kongres Nasional (I) Lekra di Solo.[5] Dalam pidato sambutannya di Kongres tersebut Pramoedya antara lain mendedahkan sikapnya bahwa:

> "Lekra telah banjak membantu saja dalam membangunkan alam pikiran jang berpihak kepada rakjat. Sampai tahun 1951 saja masih beranggapan bahwa hasil seni hanja mungkin ditjiptakan oleh individu bahkan beranggapan, bahwa hasil seni modern djustru tjiri daripada individualisme kreatif. Pada waktu itu saja belum mengerti bahwa individu hanja satu produk atau hasil sadja dari keseluruhan kehidupan jang ada".[6]

Konfesi yang dibuat oleh Pramoedya jelas menunjukkan betapa "betulnya" sikap budaya dan sastra Lekra itu, dan betapa besar "hutang budi"nya terhadap organisasi tersebut. Mungkin Pramoedya merasakan bahwa dalam organisasi Lekralah yang sebenarnya mendapat sanjungan dan penghormatan dari tokoh-tokoh politik dan kebudayaan, dan Lekralah yang dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang baik padanya, baik dari segi posisi sosialnya, ekonomi maupun kesempatan melawat keluar negeri sebagai anggota delegasi dari Indonesia. Sebelum itu Pramoedya telah juga mendedahkan isi hatinya bila ia dengan bangga menyambut baik Konsepsi Bunga Karno. Dalam sebuah tulisannya di *Harian Rakjat* Pramoedya pernah berkata:

> "Manakah Partai di Indonesia ini jang tidak pernah berchianat? Semua. Tetapi soalnja adalah apakah pengchianatan itu dilakukan karena kehilapan ataukah karena sengadja. Bagiku sendiri hanja ada satu Partai jang selama ini tidak berchianat. Dan partai ini adalah PKI. Memang, utjapan ini pasti akan menjebabkan orang mengatakan karena aku orang PKI. Kawan, aku bukan anggauta PKI. Bagiku, kalau PKI pernah bersalah, mungkin kesalahannja adalah karena adanja affair Madiun. Tetapi djuga affair ini, hingga sekarang tidak ada perumusan resmi, jang dilahirkan atas dasar penjelidikan hukum revolusi sehingga sebenarnja orang belum lagi punja hak untuk mengatakan itu sebagai pengchianatan".[7]

Dalam tulisannya yang sama Pramoedya juga pernah menyentuh soal kepercayaan agama yang menurutnya adalah demikian:

> "Mereka (orang2 agama) lebih suka terdjadinja kekatjauan daripada

---

5. Kongres ini diadakan dari 22 hingga dengan 28 Januari 1959.
6. Pramoedya Ananta Toer, "Korps pengarang dikuras sampai tandas". *Waspada*, no. XIII/3386, tgl. 6 Februari 1959.
7. Lihat Pramoedya Ananta Toer, "Djembatan Gantung dan Konsepsi Presiden", *Harian Rakjat*, th. VII/1684, tgl. 28 Februari 1957.

perdamaian nasional. Ah, kawan, agama adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk agama. Pada suatu masa tertentu dia merupakan hukum jang mengatur kehidupan kemasjarakatan. Sekarang tugasnja digantikan oleh hukum2 jang lahir dari alasan2 jang lebih riil. Ini bukan berarti bahwa agama lantas ditinggalkan mentah2, tetapi dia mendapat tempatnja sendiri dalam hidup manusia. Kawan, sungguh berbahaja mendakwa bahwa tiada beragama adalah memusuhi Tuhan. Tidak ada seorangpun jang djadi atheis, sekalipun dalam dunia jang ultra-modern, karena bagi setiap orang menilai pengertiannja tentang Tuhan berlain-lainan, lebih banjak tergantung pada alasan2 individuil. Tidak semuanja orang mendapat Tuhannja melalui adjaran dari luar. Dalam hal jang chusus individuil ini penemuan sendiri djauh lebih berharga."[8]

Bukankah tulisan demikian membela PKI? Bukankah dengan jalan demikian Pramoedya dengan sendirinya melibatkan diri dalam kancah politik PKI? Problim yang dihadapi PKI/Lekra ialah problim mencari sastrawan-sastrawan dan intelektuil-intelektuil yang bisa menjadi propagandis PKI. Pada Pramoedya PKI/Lekra menemui syarat-syarat yang dikehendaki, iaitu seorang sastrawan terkemuka dan seorang propagandis Partai yang baik.

Dari segi keyakinan agama Pramoedya masih "kabur". Malah menurut Drs Baharum Rangkuti haji bagi Pram "adalah lambang feodalisme di Indonesia".[9] Dunia baru yang didapatinya dari kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok, dan mengingatkan pula latarbelakang yang penuh dengan penderitaan di daerah gersang Blora, menyebabkan Pramoedya menjadi jurubicara yang gigih memenangkan konsep Lekra "Politik adalah Panglima" dalam lapangan kebudayaan dan kesusastraan. Blora, kota kelahirannya, adalah daerah yang tandus dan miskin. Kegemaran penduduk-penduduk di sana ialah menonton wayang purwa, wayang kerucil dan wayang golek. Di samping itu orang juga gemar pada joget dan gamelan "jang menerbitkan perselisihan dengan kaum ulama".[10] Tapi sayang tidak dijelaskan oleh Baharum Rangkuti apakah Pramoedya dididik dalam keluarga *abangan* atau *santri.* Hanya dari karangan-karangan Pramoedya saja kita dapat membuat dugaan bahwa dia tidak memandang berat tentang hal agama Islam. Rupa-rupanya Republik Rakyat Tiongkok memberikan banyak ilham kepada Pramoed-

8. Pramoedya, *ibid.*
9. B. Rangkuti, *op. cit.*, h. 9
10. B. Rangkuti, *ibid.*, h. 11

ya dalam sejarah hidupnya setelah lawatannya ke negara komunis itu. Ia menterjemahkan karya Ting Ling yang berjudul *Masyarakat dan Penulisan Kreatif* di mana pengarang Ting Ling menekankan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Marxisme-Leninisme, dan hidup dengan pekerja-pekerja supaya bisa merasakan seluruh aspirasi dan cita-cita mereka.[11]

Apa yang menarik perhatian Pramoedya dalam masyarakat Indonesia dewasa itu ialah semangat revolusioner dan kegiatan PKI memperjuangkan nasib rakyat jelata yang rata-rata miskin. Undang-undang tanah dan agraria yang didesakkan oleh PKI pada rejim diwaktu itu memungkinkan petani-petani yang tidak bertanah mendapat tanah walaupun dalam hal ini orang-orang PKI atau BTI yang diutamakan. Dalam bidang kulturil Lekra menampakkan kesungguhan untuk menampung cita-cita para seniman dan sastrawan dan memberi kesempatan yang sebaik-baiknya kepada para pengarang yang bergabung dalam organisasi tersebut. Penghormatan yang seperti itu sudah pasti tidak bisa diperoleh Pramoedya di luar Lekra. PKI/Lekra melihat pada ketokohan Pramoedya sebagai seniman Indonesia yang terkenal dan memperalatkannya untuk kepentingan Partai walaupun Pramoedya dalam beberapa buah cerita-pendeknya dalam *Tjerita Dari Blora* menampakkan bahwa ia anti-merah, tapi PKI/Lekra seolah-olah melupakan saja peristiwa itu lantaran penulisannya dilakukan sebelum Pramoedya bergiat secara aktif dalam Lekra.

Demikianlah kita lihat Pramoedya banyak sekali menulis dan sering memberikan pidato-pidato politik dan kebudayaan diberbagai tempat di Sumatera, Jawa dan Bali. Ia juga membuat serangan-serangan terhadap orang-orang yang menentang PKI/Lekra dalam *Zaman Baru.* Ia menempatkan dirinya sebagai algojo yang "membunuh" segala suara dan bisikan orang-orang lain yang tidak sealiran dengan perjuangan revolusioner PKI/Lekra. Dalam kedudukannya sebagai sastrawan yang juga menjadi jurubicara PKI/Lekra, beliau terpaksa melakukan "blackmail" politik, memfitnah, menyerang peribadi orang-orang yang menentang PKI/Lekra, dan dengan gampang memberi gelaran *anti-manipol, kontra-revolusi, antek imperialis* dan sebagainya, hingga nilai-nilai kesusastraan dalam rencana kesusastraan menjadi kabur.

Bagaimanakah pentrapan realisme sosialis yang dikemukakan oleh

11. Lihat Prof. A.H. Johns, "Pramoedya Ananta Toer, The Writer as Outsider —an Indonesian Example", *Meanjin* (Melbourne), Maret–April 1963.

Pramoedya? Seperti juga dengan pendapat-pendapat tentang fungsi kesusastraan yang pernah ditimbulkan oleh pengarang-pengarang di Uni-Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan perjuangan proletar, maka Pramoedya antara lain berkata, "Pertama-tama kondisi2 politik sipengarang mendjadi sjarat terutama, karena kondisi politik jang busuk sudah pasti tidak akan melahirkan karya sastra jang tidak busuk".[12] Demikianlah ia menulis sebuah prasarannya tentang soal-soal kesusastraan dalam suatu seminar di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia yang berjudul *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, sebuah tinjauan sosial*, yang mencerminkan perjuangan politik kulturil Pramoedya secara peribadi dan juga sebagai propagandis PKI/Lekra di bidang kebudayaan.[13]

Lebih lanjut lagi Pram menjelaskan bahwa realisme sosialis menitikberatkan perjuangan kaum yang tertindas, dan dalam konteks Indonesia sokogurunya terdiri dari kaum tani dan buruh.

> "Persoalan2 jang sangat peribadi dalam kritik realisme sosialis tidaklah perlu diadpertensikan lewat karyasastra jang djustru harus mendukung perdjuangan sebahagian besar umat manusia. Dengan demikian ukuran moral adalah pada nilai sosialnja, pada nilai objektifnja, pada keuntungan bagi sebahagian besar umat manusia."[14]

Jelas sudah bahwa tema-tema dan watak-watak yang dianggap heroik harus datangnya dari golongan terbesar rakyat yang tertindas. Kaum imperialis, kaum kapitalis dan feodalis diwarnakan sebagai agen yang busuk dan dianggap sebagai golongan penghisap. Menurut konsep realisme sosialis kemenangan akhir terletak pada perjuangan kaum proletar jua.

Pram pernah berkata, "Revolusi tidak bisa dipisahkan dari sedjarah sastra Indonesia moden", yang dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan dasar sosialisme di Indonesia secara konsekwen serta perkembangan sosialisme kaerah komunisme. Istilah "revolusi" kepada kaum komunis merupakan sebagai suatu azimat yang dapat merangsang mereka untuk bertindak lebih keras terhadap segala penghalang-penghalang cita-cita komunisme, dan juga sebagai azimat yang membuka jalan bagi keteguhan cita-cita komunisme itu. Pengertian dan pentrapan revolusi itu bukan

---

12. Lihat Pramoedya Ananta Toer, "Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Sebuah tinjauan sosial", (stensilan), h. 55
13. Prasaran ini diberikan pada tanggal 26 Januari 1962.
14. Pramoedya, *ibid.*, h. 56

saja di bidang politik, tapi juga dalam bidang kulturil oleh orang-orang komunis.[15] Dengan mengulang-ngulangi bahwa "Revolusi Indonesia belum selesai", PKI/Lekra meningkatkan aksi-aksinya dengan lebih hebat lagi guna mendapatkan sokongan dari rakyat yang nantinya akan menghasilkan kemenangan-kemenangan gemilang bagi PKI sendiri. Revolusi belum selesai mengingatkan PKI bahwa masih ada benteng-benteng dan problim-problim yang harus didobrak untuk mencapai kegemilangan bagi PKI.

Kita juga harus mengingatkan bahwa Revolusi 45 di Indonesia sudah menjadi satu metos kepada rakyat Indonesia karena revolusi itu mengenangkan pertumpahan darah dan pengorbanan dari putera puteri Indonesia dalam merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai metos ia mempunyai dayatarik dari segi psychologis, karena revolusi itu melukiskan semangat menentang, berkorban dari putera puterinya dalam menghadapi penjajahan Belanda untuk mencapai cita-cita nasional yang suci. Bertolak dari keyakinan inilah maka PKI/Lekra sering mengembalikan kenangan massa rakyat kepada perjuangan yang heroik tersebut. Propaganda metos ini bukan saja dikemukakan oleh tokoh-tokoh PKI tapi juga oleh Pramoedya, Bakri Siregar dan lain-lain sastrawan dan intelektuil Lekra.

Dalam sebuah prasarannya yang lain, berjudul "Ide, Garis dan Aparat dalam Hubungan dengan Generasi Muda", Pramoedya menampakan kesalannya bahwa "Generasi sekarang di lapangan sastra kurang memahami persoalan politik, bahkan adakalanja menjerah dengan mudah pada mitos, bahwa seni harus membebaskan diri dari politik"[16] Mungkin Pram menyatakan pendapat demikian sebagai sorotannya terhadap sikap sastrawan-sastrawan yang non-Lekra yang menentang untuk mengabdi kepada Partai dalam sikap kulturil mereka. Realisme sosialis menurut Pramoedya harus memadukan cita-cita Partai dengan karya seni, dan memegang dengan megah konsep "Politik adalah Panglima". Kalau Pramoedya mengemukakan ide-ide dari konsep realisme sosialis dalam prasaran-prasarannya, Bakri Siregar pula mentrapkan realisme sosialis itu dalam studi sejarah sastra Indonesia moden dalam bukunya

---

15. Keterangan lanjut tentang cita-cita komunisme dan sastra bacalah Herbert McClosky dan John E. Turner, *The Communist Dictatorship*. New York: McGraw-Hill, 1960, p. 560. Juga lihat Klaus Mehnert, *Peking and Moscow*. New York: A Mentor Book, 1964, p. 189–234

16. Prasaran ini diberikan dalam Simposium Generasi Muda, di Balai Budaya, Djakarta, pada tanggal 29 April 1960.

yang berjudul *Sedjarah Sastra Indonesia Modern* (I).[17]

Titiktolak dari konsep realisme sosialis itu digunakan oleh Bakri Siregar dalam pembicaraannya tentang sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia moden. Tentang kapankah dimulai sastra Indonesia moden itu, Bakri menulis:

> "Persoalan, bila dimulai sastra Indonesia modern, tidak bisa dipisahkan dari masalah masjarakat dan bangsa Indonesia dalam perkembangan sedjarahnja dan dengan alat sastranja: *kesadaran sosial dan politik nasion Indonesia* dan *bahasa Indonesia* (*modern*) *sebagai hasil produk kesadaran nasional.* Dengan demikian sastra Indonesia moden bermula dengan lahirnja kesadaran nasional tersebut, jang tertjermin dalam hasil2 sastrawan dalam tingkatan dan tarap jang berbeda sesuai dengan masa dan lingkungannja sebagai ternjata dalam kritik sosial dan tjita2 politik jang dikemukakannja, serta alat bahasa jang dipergunakan."[18]

Bertolak dari konsep realisme sosialis inilah maka Bakri Siregar berpendapat bahwa:

> "Tidak benar djadinja untuk memulai sastra Indonesia moden baru pada PUDJANGGA BARU, dengan alasan, bahwa PUDJANGGA BARU mengadakan pembaruan dalam sastra Indonesia. Kesadaran nasional dalam hasil2 sastra Indonesia bukan baru pada PUDJANGGA BARU, sekitar 1920, malah sebelumnja, seperti ternjata dalam hasil2 Mas Marco Kartodikromo, jang baik dalam bahasa daerah Djawa maupun dalam bahasa persatuan Indonesia setjara tegas pertama kali melemparkan kritik terhadap pemerintah djadjahan serta kalangan feodalisme."[19]

Secara tegas kita melihat bahwa tokoh Lekra, Bakri Siregar, mendasarkan penilaian sastranya menurut konsep realisme sosialis di mana ukuran-ukuran ekstrinsik sastra menurut garis perjuangan revolusioner yang anti-kolonialisme, anti-kapitalisme dan anti-feodalisme ditrapkan. Dengan lain perkataan bentuk yang indah tapi tidak mengandungi isi yang revolusioner menurut pahaman Marxisme tidak dinilai sebagai hasil sastra yang baik. Berdasarkan kritik sosial terhadap kolonial Belanda dan feodalisme, maka kedua tokoh Lekra, Pramoedya Ananta Toer dan Bakri Siregar memulakan sejarah kesusastraan Indonesia moden

---

17. Bakri Siregar, *Sedjarah Sastra Indonesia Moden.* Jilid (I). Djakarta: Akademi Sastra dan Bahasa "Multatuli", 1964.
18. Bakri Siregar, *ibid.*, h. 10
19. Bakri Siregar, *loc. cit.*

dari Mas Marco Kartodikromo yang menghasilkan ***Student Hidjo*** (1919) dan ***Rasa Merdeka*** (1924) dan Semaun yang menghasilkan ***Hikajat Kadirun*** (1924), dan tidak ketinggalan disebut juga nama sastrawan Rustam Effendi yang menerbitkan *Bebasari* (1926).[20] Dan sebagai tambahannya Bakri berkata, "Baik Semaun, maupun Rustam Effendi, pada waktu itu adalah komunis, dan buku2 mereka, sebagai djuga buku Marco dilarang."[21]

bab VI. 1. bukti belum selesainya revolusi
2. pendapat ttg seni sebelum dan sesudah masuk Lekra
3. latar blk. perpindahannya ke Lekra
4. pendapat Pram. ttg. agama
5. mulainya sastera modern menurut Bakri

20. Bakri Siregar, *op. cit.*, h. 25–27
21. Bakri Siregar, *ibid.*, h. 28

BAB KETUJUH

SITOR SITUMORANG, LKN DAN MANIPOL

Walaupun Sitor Situmorang bukan anggota Lekra, tetapi peranannya dalam bidang kulturil dibicarakan secara kusus dalam tulisan ini karena konsep dan aksi-aksi kulturil dari LKN, yang mana ia menjadi ketuanya, mempunyai jiwa dan arah perkembangan yang sama dengan konsep kulturil Lekra.

Sebagai sastrawan dan penyair Sitor Situmorang mempunyai kedudukan yang terhormat dalam sejarah keusastraan Indonesia moden. Penyair kelahiran Sibolga, Tanah Batak, pada tanggal 2 Oktober 1923, telah menghasilkan tiga buah kumpulan puisi dan sebuah kumpulan cerita pendek yang diberi judul *Pertemuan dan Saldju di Paris*. Sumbangan karya sastra ini dihasilkannya sebelum ia turut aktif dalam bidang politik nasional. Juga ia terkenal sebagai kritikus film, seorang eseis yang baik, penulis drama dan penterjemah.[1] Ia pernah ke Holland atas ongkos Sticusa dan tinggal beberapa lama di Eropah, khasnya di Paris, dan pernah pula ke Amerika Syarikat atas biayai Rockefeller Foundation. Pada tahun 1956 ia menceburkan diri dalam PNI, dan meletakkan dasar bagi kebudayaan marhaenis. Pada tahun 1958 ia diangkat menjadi anggota Dewan Nasional mewakili golongan seniman.[2]

Prof. A.H. Johns berpendapat bahwa Sitor Situmorang "seorang

---

1. Lihat J.U. Nasution, *Sitor Situmorang sebagai Penjair dan Pengarang Tjerita pendek*. Djakarta: Gunung Agung, 1963.
2. Lihat Pramoedya Ananta Toer, "Mas Sitor Situmorang: Panglima Kebudajaan Marhaenisme," *Republik*, no. 1050, th. IV, tgl. 15 Juli 1959.

manusia yang berkonflik antara dua dunia" dalam karya-karyanya, di mana ciptaan-ciptaannya itu memperlihatkan dunia peribadinya yang tragis yang berkonfrontir dengan suasana alam Indonesia yang masih kacau, hingga akhirnya secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi sejarah perkembangannya sebagai sastrawan dan sebagai politikus.[3] Menurut setengah kalangan sastrawan dan intelektuil yang mengenali Sitor, ia adalah seorang seniman yang baik, tetapi situasi politik dan ekonomi Indonesia menyebabkan ia terjerumus untuk menjadi seorang politikus.

Sejarah "politik" penciptaan Sitor nampak jelas sekembali-nya dari menghadari konferensi tergempar Pengarang-pengarang Asia-Afrika di Tokyo selepas melawat Republik Rakyat Tiongkok. Dalam delegasi pengarang-pengarang Indonesia yang bersama Sitor itu termasuklah Joebaar Ajoeb, Dodong Djiwapradja, Rivai Apin dan Utuy Tatang Sontani, kesemuannya ada-lah anggota-anggota Lekra yang penting. Rupa-rupanya lawatan Sitor ke Republik Rakyat Tiongkok berkesan sekali pada jiwanya hingga ia dapat menghasilkan seberkas puisi yang temanya memuja dan memuji Cina Komunis. Kumpulan puisinya, *Zaman Baru* diterbitkan oleh penerbitan majalah *Zaman Baru* kepunyaan PKI/Lekra pada tahun 1961. Keistimewaan yang diberikan oleh penerbitan majalah Lekra *Zaman Baru* terhadap kumpulan puisi Sitor Situmorang ini adalah bersipat politik karena tema-tema puisi-puisinya adalah seirama dengan nyanyian-nyanyian puisi pemujaan seperti dalam *Dinasti 650 juta*, kumpulan bersama penyair-penyair Lekra.

Pada kata pengantarnya untuk *Zaman Baru*, Sitor berkata:

> "Saja bersimpati dengan kebangunan nasional Repablik Rakjat Tiongkok. Penerimaan saja atas segala hal jang dapat saja lihat dan alami dalam kundjungan singkat, tersimpul dalam sadjak-sadjak yang dimuat dalam buku ketjil ini. Nilai sastranya terserah pada pertimbangan zaman. Sebagai dokumen ketjil tentang perkembangan kerohanian, buku ketjil ini mengandung hal-hal jang bagi saja sendiri sebagai penjair, menggugah konsep-konsep tertentu endapan pengalaman lama."[4]

Di sini kelihatan ada persamaan antara watak penyair Sitor Situmorang dengan Pramoedya Ananta Toer yang sama-sama mengalami per-

3. Lihat Prof. A.H. Johns, "A Poet between two Worlds: The Works of Sitor Situmorang", *Westerly* (Australia), Nobember 1966.
4. Lihat Sitor Situmorang, *Zaman Baru*. Djakarta: Penerbitan Zaman Baru, 1961, 35 halaman.

ubahan sikap setelah melawat ke Repablik Rakyat Tiongkok. Kedua-duanya telah melawat ke Barat, dan kedua-duanya menolak liberalisme barat dan berpihak pada perjuangan sosialis kiri. Secara kebetulan pula kedua-duanya adalah sastrawan-sastrawan terkemuka dalam dunia kesusastraan Indonesia.

Kalau Pramoedya lebih banyak menimba inspirasi politik dari tokoh-tokoh komunis Uni-Soviet, Cina Komunis dan Ho Chin Minh, Sitor lebih banyak mereguk inspirasi dari ajaran-ajaran Bung Karno sendiri. Baik dari inspirasi komunis ataupun dari ajaran-ajaran Soekarno arus pemikiran kedua orang sastrawan itu adalah sama sekiranya ditinjau dari aspek ideoloji. Mungkin karena sipatnya sebagai ketua LKN dari PNI, maka ia harus berjiwa nasionalis dan harus patuh kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang mendirikan PNI pada tahun 1927 dulu.[5]

Sebagai menanggapi ajaran Bung Karno dengan pentrapan Manipol Usdeknya, Sitor antara lain menjelaskan posisi yang diambil LKN. Ia berkata:

> "...bahwa posisi nasionalis (berdasarkan Marhaenisme) dalam alam persatuan Manipol menghormati tiap teori sastra jang kerakjatan, djadi jang lahir dari djiwa Revolusi Nasional kita sendiri, dan jang berguna buat pendjelasaiannja, apakah itu dinamakan Pantjasila, realisme sosial atau 'memuliakan agama'. Nasionalis djuga menolak sastra dan seni jang walaupun 'baik' setjara artistik, kalau berupa pengrongrongan terhadap djalannja Revolusi. Ini berarti sikap nasionalis, seperti mestinja setiap Manipolis di mana perlu dapat membelakangkan 'nilai artistik' apalagi jang berasal dari alam kontra-revolusi. Keperluan sosial politik didulukan."[6]

Menurut Sitor lagi "sikap politik pengarang adalah penting karena langsung berpengaruh kepada golongan antara kekuatan pro dan anti secara politik."[7] Sikap politik yang betul, menurut Sitor, ialah pengabdian kepada kerakyatan dan Revolusi. Dalam pengertian ini sudah pasti

sikap seni Sitor

---

5. Suatu musyawarah tentang "Kebudayaan Nasional" telah dianjurkan oleh PNI di Salatiga, Jawa Tengah dari 15 s/d 16 Agustus 1960. Antara resolusi yang diterima ialah menyokong konsep Soekarno Manipol-Usdek. Keterangan lanjut sila baca *Kepribadian Nasional*. Djogdjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1961.
6. Lihat Sitor Situmorang, "Posisi Nasionalis di tengah-tengah Matjam Phobia Kebudajaan," *Suluh Indonesia*, th. 10, no. 187, tgl. 16 Mei 1963.
7. "Diperlukan selfkritik oleh sastrawan: Hasil wawancara dengan Ketua LKN Sitor Situmorang", *Suluh Indonesia*, th. X, no. 136, tgl. 13 Maret, 1963.

tidak ada perbedaan pokok antara konsep LKN dan Lekra tentang soal kulturil dan kesusastraan khasnya.

Dalam satu ceramahnya di hadapan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Sitor menerangkan:

> "Bahwa sedjarah itu menundjukkan kemadjuan jang diperdjuangkan, iaitu kemadjuan jang makin meningkat setjara obdjektif. Itulah kejakinan revolusi Indonesia dan semua pendukungnja. Atas dasar kejakinan itulah dan dengan katjamata kejakinan itulah dia djuga menilai dan harus mengembangkan kesusastraan dan sedjarah kesusastraan. Itulah jang mendasari Manipol-Usdek, sebagai prinsip dinamis Pantjasila, prinsip sosialis dalam pandangan sedjarah, dan dengan sendirinja pandangan sedjarah kesusastraan Indonesia. Itulah prinsip Marxis jang telah ditrapkan dalam adjaran-adjaran dan aksi-aksi Bung Karno, jang sekarang ini mendjiwai keseluruh gerak sedjarah Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa...... Manipol Usdek sebagai garis merahnja dinamika sedjarah jang anti-statika, iaitu statika feodalisme dan kontra-dinamikanja nekolim.... Kaum dan pandangan feodal, kaum dan pandangan imperialis, adalah statika dan kontra-dinamika, adalah kontra-revolusi."[8]

Hubungan intim yang padu antara konsep kulturil LKN dan Lekra yang sama-sama bersandar pada Marxisme itu dijelaskan oleh Sitor seperti di atas. Di sini Sitor lebih banyak bermain dengan klise-klise politik yang bombastis. Sedikit demi sedikit persoalan kesusastraan mendapat bajunya yang baru, yaitu baju bersalut sloganisme politik Marxis. Secara tidak langsung sikap sastra yang dikemukakan Sitor sudah menjelajah ke dalam dunia indoktrinasi politik Marxisme seperti mana yang dilakukan oleh partai-partai komunis internasional.

Apakah pengertian sastra revolusioner bagi Sitor? Sastra revolusioner harus memperjuangkan kaum melarat dan terhisap—tani dan buruh. Lebih lanjut ia berkata:

> "Dizaman memperdjuangkan sosialisme sastra diminta ikut memperdjuangkannja, dengan mengabdi kepada politik perdjuangan itu. Dizaman pembangunan nanti, kalau kekuasaan Sosialisme sudah berdiri, maka sastra revolusioner meneruskan pengabdiannja dalam bentuk pengabdian kepada pembangunan sosialis."[9]

---

8. Sitor Situmorang, "Situasi Kesusastraan Indonesia", dalam *Sastra Revolusioner*. LKN, Jawa Barat, 1965, h. 7–8.
9. Sitor Situmorang, "Sastra Revolusioner" dalam *Sastra Revolusioner*, h. 15

Inilah cara yang dilakukan oleh partai-partai komunis Uni-Soviet dan Repablik Rakyat Tiongkok dan lain-lain partai komunis internasional, yaitu menjadikan kesusastraan sebagai satu bagian integral dengan partai.

Sebagai suatu penyelarasan dengan konsep politik PNI yang ekstrim kiri diwaktu itu, maka Sitor sebagai ketua LKN menggerakkan konsep politik Manipol dengan sebaik-baiknya dalam bidang kebudayaan dan kesusastraan. Memang ia tidak pernah menghasilkan sebuah studi sastra seperti Bakri Siregar ataupun suatu penelitian yang mendalam tentang konsep sastra seperti Pramoedya Ananta Toer, namun demikian sumbangannya dalam bidang kritik sastra dan konsep sastra memang ada. Karena Manipol menjadi "jiwa dan tubuh" PNI dan LKN, maka Sitor memulakan titiktolak penilaian sastra dari konsep Manipol. Demikianlah ia membuat suatu 'studi' tentang Chairil Anwar yang berdasarkan konsep Manipol. Karena pada anggapan Sitor, Chairil tidak cocok dengan konsep Manipol, maka ia mengecam Chairil sebagai "individualis tak bertanahair, kosmopolitan, versi Indonesia," yang tidak punya arti buat revolusi. Oleh karena Chairil menetap di Djakarta diwaktu revolusi fisik 1945–1949, maka ia harus menerima "segala konsekwensinja, termasuk segala pertimbangan politik dan artistiknja."[10]

Pertimbangan Sitor terhadap Chairil Anwar adalah pertimbangan dari aspek ekstrinsik sastra juga. Ia menggunakan kritirium konsep politik Manipol ciptaan Soekarno untuk meletakan karya-karya Chairil dalam wadah revolusi Indonesia. Di sinilah letaknya kekaburan dalam penilaian sastra dari Sitor. Manipol hanya ujud pada tahun 1959 setelah sepuluh tahun wafatnya Chairil Anwar. Bagaimanakah ia bisa menggunakan konsep Manipol untuk menilai puisi-puisi Chairil? Penilaiannya berbeda sekali dengan metode kritik yang dilakukan oleh H.B. Jassin yang menyorot puisi-puisi Chairil Anwar lebih banyak dari segi instrinsiknya.[11]

Esei-esei Sitor selepas tahun 1959 menampakan pengaruh politik yang amat tebal. Manipol menjadi pegangan tokoh-tokoh kebudayaan LKN dan juga sastrawan-sastrawan lain yang berlindung di bawah panji-panji partai politik. Konsep Marhaenisme yang dicetuskan Soekarno pada tahun 1933 dulu dikembangkan Soekarno hingga terlaksana Manipol-Usdek pada tahun 1959, yang sebagai haluan negara, diterima oleh

---

10. Sitor Situmorang, "Chairil Anwar dalam Alam Manipol," dalam *Sastra Revolusioner*, h. 28–31.
11. Lihat H.B. Jassin, *Chairil Anwar Pelopor Angkatan '45*. cetakan ke 3. Djakarta: Gunung Agung, 1968.

partai-partai politik dewasa itu seperti PKI, PNI, NU dan lain-lain. Konsep *Marhaenisme*[12] yang berdasarkan pada Marxisme menggodok rakyat Indonesia untuk membenci kebudayaan barat yang diasosiasikan dengan imperialisme, kolonialisme dan feodalisme. Rakyat Indonesia dibius mata hati mereka untuk melupai bahwa rejim Soekarno diwaktu itu sudah ditunggangi oleh PKI dan dasar politik agresif Repablik Rakyat Tiongkok. Seperti juga dengan Mao Tze-tung, ajaran-ajaran Manipol-Usdek ditrapkan pada seluruh lapisan rakyat, diajar diperguruan tinggi dan universitas sebagai indoktrinasi nasional. Berbagai organisasi tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan dan meluaskan ajaran-ajaran itu. *Soekarnoisme* adalah suatu konsep politik yang pelaksanaannya mirip dengan programa Lenin dalam taktik untuk menyesuaikan ideologi parti atau ajaran-ajaran tokoh bagi menimbulkan kesadaran rakyat yang nantinya akan memenangkan revolusi.[13]

Ditinjau dari konsep sastra, kritiksastra Sitor yang bertolak dari Manipol itu tidak ada bedanya dengan konsep realisme sosialis yang menjadi metode kritiksastra Lekra. Hanya dalam penggunaan istilah-istilah terdapat perbedaan, yang satu bersumber pada ajaran-ajaran Soekarno, dan yang lagi satu bersumber pada ideologi komunisme, tetapi keduaduanya bersumber dari satu mataair—Marxisme.

12. Lihat Ir. Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*. Jil (I). Cetakan ke 2, Djakarta: Panitya Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1963, h. 253.
13. Alfred G. Meyer, *op. cit.*, h. 52.

BAB KEDELAPAN

LAHIRNYA MANIFES KEBUDAYAAN

Udara politik Indonesia antara 1963–1965 sebelum meletusnya Gerakan September 30 diseliputi oleh sloganisme-sloganisme Soekarno dan PKI. Setiap kehidupan rakyat seolah-olah diarah, dibentuk oleh iklim politik yang tegang pada waktu itu hingga kebebasan untuk mencari dasar-dasar kehidupan yang terkeluar dari Manipol-Usdek Soekarno dan sloganisme-sloganisme PKI berasa sukar dan paling berbahaya. Di dalam suasana politik yang ditunggangi PKI itulah lahirnya sebuah pernyataan kebudayaan dari suatu golongan cendekiawan, pengarang-pengarang dan seniman-seniman Indonesia yang secara berani dan mendadak menyuarakan hasrat "budi nurani manusia".

Pernyataan tersebut dikenali sebagai *Manifes Kebudayaan* di-lahirkan disebuah tempat di Jalan Raden Saleh, 19, dan pertama kali disiarkan untuk pengetahuan umum dalam harian *Berita Republik* dalam ruangan "Forum Sastra/Budaya" (no. I, th. I, tanggal 19 Oktober 1963) di bawah redaksi Drs H.B. Jassin. *Manifes Kebudayaan* mendapat siaran keduanya dalam majalah *Sastra* (no. 9/10, th, III, 1963).[1] Selepas itu *Manifes Kebudayaan* dikutip oleh harian-harian, radio, dan organisasi-organisasi kebudayaan yang lain, hingga akhirnya ia menjadi suatu pernyataan kulturil yang mendapat perhatian ramai. Sebelum *Manifes Kebudayaan* disiarkan dalam harian, risalah-risalah *Manifes Kebudayaan* telah pun dikirim kepada sastrawan-sastrawan, organisasi-organisasi

Manikebu lahir yg pertama di 'Berita Republik'

1. Keterangan lanjut sila baca D.S. Moeljanto, "Lahirnja Manifes Kebudajaan", dan Arief Budiman, "Tjatatan Harian Manikebuis," dalam *Horison* no. 5, th. II (Mei 1967).

kebudayaan di seluruh tanahair guna mendapatkan sokongan dan dukungan mereka.[2]

Naskah *Manifes Kebudayaan* itu disusun oleh seorang budayawan intelektuil yang terkenal yaitu Wiratmo Sukito. Tambahan-tambahan serta diskusi-diskusi selanjutnya telah diadakan di antara para peserta yang lain untuk membicarakan *Manifes Kebudayaan* tersebut hingga akhirnya mendapat rumusan yang diterima baik oleh 20 orang penandatangani *Manifes Kebudayaan* tersebut. (Naskah *Manifes Kebudayaan* yang lengkap lihat lampiran B). Tokoh-tokoh cendekiawan, sastrawan dan seniman yang terkemuka yang menandatangani *Manifes Kebudayaan* itu termasuklah H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, dan almarhum Trisno Sumardjo, seorang sastrawan, pelukis dan juga penterjemah. Tenaga penggerak yang lain termasuklah Zaini (pelukis), Goenawan Mohamad (penyair dan eseis), Bur Rasuanto (sastrawan), Soe Hok Djin kini bernama Arief Budiman (budayawan dan eseis), Bokor Hutasuhut (novelis), Taufiq A.G. Ismail (doktor haiwan dan penyair) dan D.S. Moeljanto (wartawan dan sastrawan). Satu-satunya penandatangan dari golongan wanita ialah Dra. Boen S. Oemarjati (dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia).

Manifes Kebudayaan bukanlah sebenarnya tidak berbau politik. Wiratmo Sukito menganggap *Manifes* berbau "politik pragmatise jang dapat diibaratkan seperti domba berbadan lemah jang tidak berdosa, tetapi jang dengan segala naivitasnja menjuarakan tatangannja ditengah-tengah algodjo-algodjo politik jang zalim serta tidak mengenal hati-nurani."[3] Satu pernyataan sikap kulturil tanpa menyangkut sikap politik adalah tidak wajar dan tidak mungkin diwaktu itu. Dengan demikian pendukung-pendukung *Manifes* terpaksa mengunyah landasan-landasan pikiran Bung Karno dari pidato-pidatonya berkenaan dengan kebudayaan dan politik supaya *Manifes Kebudayaan* dan pendukung-pendukungnya tidak dianggap oleh rakyat mencoba "menyisihkan" diri dari pergolakan dan aspirasi-aspirasi politik dewasa itu. Mereka menggunakan falsafah Pancasila sebagai titiktolak dari penghidupan kebudayaan Indonesia dan mereka mencoba menjernihkan falsafah Pancasila itu yang telah diselewengkan oleh PKI/Lekra, LKN, dan golongan PNI Ali/Surahman demi kepentingan partai-partai politik dan organisasi-organisasi kulturil tersebut. Dalam suasana politik yang hitam itu, *Manifes Kebudayaan* mencoba menegakkan "hati nurani manu-

2. Wawancara dengan H.B. Jassin, tgl. 13 Januari 1968.
3. Lihat Wiratmo Sukito, "Manifes dan Masalah-Masalah Sekarang," *Horison*, no. 5, th. II (Mei 1967), h. 132–133.

sia'' yang murni dan mengungkapkan konsep *humanisme universil* sebagai wadah dari kebebasan manusia serta kebebasan berkarya. Karena yang diperlihatkan oleh golongan-golongan berkuasa diwaktu itu ialah politik kulturil PKI/Lekra dan LKN yang bersikap "tudjuan menghalalkan tjara" dan "Politik adalah Panglima", maka *Manifes Kebudayaan* menentang pendapat demikian dengan mengemukakan bahwa unsur estetis dalam seni tidak bisa diabaikan, karena kreativitet seni tidak bisa mengesampingkan ciri estetis tersebut. Realisme sosialis yang dianuti Lekra ditentang oleh pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* karena konsep tersebut "dehumanise" manusia untuk mengabdi kepada politik, dan justru itu melahirkan karya-karya yang bersifat propaganda semata-mata.

Dukungan-dukungan dari masyarakat dan organisasi-organisasi sangat banyak. *Manifes Kebudayaan* disiarkan kembali oleh berbagai harian seperti *Semesta* dan *Duta Masjarakat* (keduanya dari Djakarta), mingguan *Gelora* (Surabaja), *Pos Minggu* (Semarang), *Mingguan Surakarta* (Solo,) majalah *Basis* (Djogdjakarta), mingguan *Waspada Teruna* dan harian *Indonesia Baru* (kedua-duanya dari Medan). Disamping itu organisasi-organisasi yang mula-mula sekali menyokong *Manifes Kebudayaan* termasuklah Ikatan Sarjana Pancasila, Badan Pembina Teater Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Lesbumi, Teater Muslimin Wilayah Palembang dan Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia.[4] Majalah *Sastra* pula sering memuatkan penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* di dalam keluarannya hingga ia merupakan sebagai satu wadah bagi mereka yang anti-PKI, dan dengan demikain membuktikan bahwa masih ada golongan tertentu yang tidak mau menerima perkosaan pribadi, juga indoktrinasi Manipol dari rejim yang condong kepada komunisme.

Pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* merupakan sebagai hero diwaktu itu. Keberanian dan kejujuran intelektualisme yang meledak di tengah-tengah pusaran indoktrinasi Manipol dan kejayaan PKI adalah keberanian dan kejujuran intelektualisme yang sungguh-sungguh mengkagumkan. Para pendukung dan pencetus *Manifes Kebudayaan* mungkin menyedari bahwa mereka berhadapan dengan gergasi-gergasi politik PKI dan Soekarno yang sangat besar pengaruhnya terhadap rakyat. Mereka menyedari risiko berat yang mereka ambil. Memang ada orang-orang perorangan yang berani menentang rejim Soekarno seperti Prof. Mochtar dari Bandung dan sebagainya, tapi suara penen-

4. Lihat *Sastra*, no. 9/10, th. III, 1963. Juga lihat Lentera (*Bintang Timur*), no. 12, th. III, tgl. 7 Juni 1964.

tangan itu adalah suara individu tanpa diabadikan dalam suatu pernyataan protes dan keyakinan seperti *Manifes Kebudayaan.* Inilah sebilangan kecil kaum seniman, sastrawan dan cendekiawan Indonesia yang tidak mau menjadi "clique dan cliquers" dari rejim Soekarno (memakai istilah S. Tasrif).[5]

Sungguhpun pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* mengambil sikap bahwa *"Manifes Kebudajaan* a priori melahirkan organisasi kebudajaan"[6] namun ia tetap menjadi pendorong yang kuat dalam pelaksanaan pentrapan serta penyibaran konsep *Manifes Kebudayaan* di kalangan masyarakat umum. Suatu konsep yang dicetus oleh tigabelas orang cendekiawan dan seniman tidak mencukupi untuk melancarkan ide-ide mereka ke dalam masyarakat yang berpulau-pulau seperti Indonesia. Justru itu suatu konferensi besar-besaran perlu di-adakan guna membahas persoalan-persoalan kulturil dan peranan karyawan-karyawan kreatif diwaktu itu.

Karena pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* seperti H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, Zaini, Goenawan Mohamad dan lain-lain adalah orang-orang yang dekat dengan *Sastra* maka *Sastra* menjadi sponsor yang terkuat dalam penyelenggaraan KKPI, karena ia (*Sastra*) merupakan "konsekwensi dari kelahiran *Manifes Kebudajaan*".[7]

Bila KKPI diadakan dari 1 sampai dengan 7 Maret 1964 digedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta, sponsor-sponsornya adalah terdiri dari BMKN, OPI, HSBI dan Lekkrindo. Tema konferensi tersebut ialah "Peranan Pengarang Indonesia". Tema konferensi ini pun jelas membuktikan bahwa bukan soal kulturil saja yang dipentingkan, tetapi juga tujuan-tujuan politik untuk mengekang ataupun menolak gagasan-gagasan politik kiri diwaktu itu.

Oleh sebab pendukung-pendukung KKPI terdiri dari golongan yang kebanyakannya non-partai, maka undangan-undangan KKPI dikirim kepada organisasi-organisasi dan orang-orang perorangan tanpa mengira paham politik mereka.[8] Para undangan yang hadir datangnya dari ber-

5. Harian *Indonesia Raya* sekitar bulan April 1969 menyiarkan beberapa tulisan dari Wira yang menyorot peranan beberapa orang intelektuil Indonesia yang bersekongkong dengan rejim Soekarno. Artikel-artikel itu diberi judul yang sama iaitu "Contoh-contoh Pelatjuran Intelektuil Dizaman Rejim Soekarno".
6. Lihat D.S. Moeljanto, *op. cit.*, h. 159
7. Lihat *Sastra*, no. I, th. IV, 1964, h. 3
8. H.B. Jassin menjelaskan bahwa ia pribadi mau semua pengarang dari berbagai partai politik dan organisasi kebudayaan dijemput termasuk Lekra dan LKN (Ali/Surachman). Tapi pihak panitia jemputan tidak meneruskan undangan KKPI kepada pengarang-pengarang Lekra. Dengan demikian daftar peserta tidak termasuk seorang pun dari Lekra.

bagai daerah kepulauan Indonesia, dari Aceh hingga Irian Barat. Melihat dari jumlah delegasi-delegasi yang datang dari jauh orang akan bertanya-tanya bagaimanakah peserta-peserta dari Irian Barat, Aceh, Sulawesi dan sebagainya bisa menghadiri KKPI, karena ongkos perjalanan sangat besar, dan situasi ekonomi negara pincang. Ini tidak mengherankan karena Angkata Darat Republik Indonesia adalah di belakang KKPI. Se-bagai suatu wadah dari mereka yang non-komunis, maka kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihak Angkatan Darat Republik Indonesia untuk menunjukkan kekuatan politik diwatktu itu. Setiap kegiatan dari KKPI mendapat perhatian istimewa dari Jeneral Abdul Haris Nasution, dan lapuran-lapuran kegiatan dikirimkan kepadanya dari penyelenggara konferensi tersebut. Karena ada-nya kerjasama dengan Angkatan Darat Republik Indonesia, maka berbagai fasilitas diberikan kepada KKPI dan peserta-pesertanya.[9]

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khasnya Angkatan Darat, tidak bisa secara terang-terangan menjadi sponsor KKPI. Pada waktu itu pihak PKI dan ormas-ormasnya sering mengecam sikap yang diambil oleh pihak Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat. Cita-cita PKI untuk mempersenjatai Pemuda Rakyat mendapat tentangan hebat dari Angkatan Darat, dan dengan demikian PKI menganggap Angkatan Darat yang diketuai Jeneral Ahmad Yahi/Nasution merupakan penghalang besar bagi pelaksanaan cita-cita PKI untuk mendominasi politik nasional seluruhnya. PKI menyedari bahwa pengaruhnya di kalangan Angkatan Darat terutama sekali masih belum mencukupi untuk melaksanakan cita-cita politiknya. Pihak tentera juga curiga untuk melaksanakan sesuatu tindakan drastis terhadap PKI, karena Presiden Soekarno masih menjadi tokoh politik yang berpengaruh dan kini sudah condong pada politik kiri a la PKI. Dengan demikian Angkatan Darat harus berhati-hati, supaya tidak timbul reaksi yang berbahaya bagi panglima-panglima Angkatan Darat yang anti-komunis. Justru itu harus ada golongan-golongan lain yang tampil kemuka untuk mensponsori sesuatu konferensi yang bertujuan anti-komunis. Tugas yang berat ini dipikul oleh kaum cendekiawan, pengarang-pengarang dan seniman-seniman Indonesia dari golongan anti-komunis dan agama. Pihak sastrawan dan cendekiawan berani karena mengetahui bahwa mereka juga punya

9. Wawancara dengan H.B. Jassin dalam bulan Februari 1968. Juga surat-surat yang dikirimkan novelis Bokor Hutasuhut, salah seorang pencetus *Manifes Kebudayaan*, kepada Jeneral Abdul Haris Nasution menunjukkan kerjasama antara kedua belah pihak. Salinan surat-surat itu ada dalam simpanan H.B. Jassin.

"backing" yaitu Angkatan Darat Republik Indonesia.

Kalau dalam *Mukaddimah* Lekra dinyatakan kaum tani dan buruh sebagai massa rakyat yang harus diperjuangkan hingga timbulnya konsep kulturil "Politik adalah Panglima", maka golongan cendekiawan dan seniman yang non-komunis dalam KKPI juga menerbitkan semacam "mukaddimah". Mukaddimah KKPI membawa kesimpulan bahwa kaum karyawan pengarang Indonesia:

> "Dalam revolusi Indonesia jang sedang memperdjuangkan setjara prinsipil budi nurani sosial manusia sekarang ini, mempunjai rasa tanggungdjawab jang penuh, karena tidak ada suatu revolusi jang berhasil apabila tidak mendjamin kelangsungan hidup sesuatu bangsa".

Lebih lanjut lagi Mukaddimah KKPI menjelaskan:

> "Konferensi Karyawan Pengarang se Indonesia itu akan merupakan djawaban blak-blakan terhadap semua tantangan jang telah dan sedang diarah kepada keinsafan jang sedalam-dalamnja, dengan pikiran jang sesirius-siriusnja, dan dengan analisa yang seteliti-telitinja, karyawan pengarang Indonesia itu merupakan mutlaknja proporsi kepengarangan Indonesia dalam konstelasi masjarakat jang bersusun dan sebagai projek besar Revolusi Indonesia, sehingga dalam perdjuangan menjusun Dunia Baru jang berlandaskan pada kekuatan Asia-Afrika, maka karyawan pengarang Indonesia memperdjuangkan semilitan-militannja Pantjasila sebagai landasan idiilnja, dan terhadap setiap tendensi jang tidak sesuai dengan Pantjasila haruslah dilakukan pengaman dengan djalan apapun dibenarkan oleh Revolusi Indonesia jang bersumber pada prinsip-prinsip jang universil itu."[10]

Mengapakah Mukaddimah KKPI sangat menyanjung tinggi filsafat Pancasila? Mengapakah filsafat Pancasila menjadi konsep *Manifes Kebudayaan*? Jawabannya sangat jelas. Filsafat Pancasila merupakan suatu filsafat universil di mana segala aspek kehidupan manusia diabadikan. Dan yang paling penting 'sila' pertamanya yang mengakui keesaan Tuhan. PKI juga pada luarnya mengakui Pancasila, tetapi perkembangan PKI sejak 1959 menampakkan kecenderungan yang bisa menghanyutkan filsafat Pancasila tersebut. Boleh di-katakan PKI/Lekra sangat jarang sekali membicarakan konsep Pancasila, tetapi sebaliknya lebih banyak menonjol-nonjolkan Manipol-Usdek dan Revolusi Indo-

10. Lihat "Mukaddimah: Konferensi Karyawan Pengarang-pengarang se Indonesia," *Sastra*, no. 1, th. IV, 1964.

nesia yang masih belum selesai itu. Menggunakan nama Pancasila dalam dukungan dan perjuangan dewasa itu lebih selamat daripada mengemukakan ide-ide lain. Pancasila sudah menjadi filsafat negara Republik Indonesia. Oleh yang demikian Pancasila adalah sakral bagi bangsa Indonesia.

Karyawan pengarang Indonesia menyeru, "...setiap jang tidak sesuai dengan Pantjasila haruslah dilakukan pengamanan dengan djalan apa pun jang dibenarkan oleh Revolusi Indonesia...", sebenarnya suatu pernyataan yang tidak berterus terang untuk menentang konsep politik PKI yang anti-Pantjasila. Mereka berharap dengan jalan ini pihak rakyat akan menyokong perjuangan KKPI dan membantunya dengan apa jalan sekalipun guna menumpaskan pengaruh PKI yang sangat ditakuti dewasa itu.

Kepada kaum pengarang dan cendekiawan, Pancasila yang dicetuskan dalam perjuangan politik kulturil merupakan pengambalian konsep *humanisme universil* Angkatan '45 seperti mana yang termaktub dalam *Surat Kepercayaan Seniman Gelanggang* pada tahun 1950. H.B. Jassin, Wiratmo Sukito dan lain-lain mau membuktikan bahwa kemanusiaan dan manusia yang diperjuangkan Angkatan '45 itu masih laku dan berjalan terus, dan bahwa konsep tersebut adalah idiil dan sesuai bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia. Dalam *Surat Kepercayaan Seniman Gelanggang* dinyatakan bahwa Revolusi Indonesia masih belum selesai karena mengingatkan situasi politik dewasa itu. Sebab itu Wiratmo Sukito, dalam menanggapi "sastra revolusioner" antara lain menjelaskan:

> "Dan sastra jang ditjipta dengan disertai oleh kedjudjuran jang sesungguhnja adalah kreatif, dan karena itu adalah revolusioner. Hanja sastra jang tertjipta dengan *tidak* disertai oleh kedjudjuran jang sesungguhnja jang non-revolusioner atau kontral-revolusioner. Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa seorang revolusioner jang menulis dan berpretensi bahwa tulisannja itu adalah "sastra" tidak bisa revolusioner. Iapun bisa revolusioner, hanja sadja tulisannja itu bukanlah sastra, dan biasanja ia tidak bertolak dari kenjataan sastra, melainkan dari kenjataan politik semata-mata."[11]

Lebih jauh lagi Wiratmo Sukito menjelaskan nilai-nilai Revolusi bagi sastrawan-sastrawan Indonesia adalah:

(1) Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

---

11. Lihat Wiratmo Sukito, "Sastra Revolusioner", *Sastra*, no. 9/10, th. III, 1963, h. 1

(2) Pembentukan Masjarakat Sosialis Pantjasila, di mana tiada pemerasan atas manusia oleh manusia. Dan

(3) Pembentukan Dunia Baru, di mana tiada pemerasan atas bangsa oleh bangsa.[12]

Kalau diteliti tulisan "otak" (master-mind) *Manifes Kebudayaan* ini, akan terlihat sikap *humanisme universil* itu. walaupun ada "engagement" dengan pengertian politik. Nilai kejujuran dan estetik dalam karyaseni masih dipertahankan, disamping memberi penjelasan kepada filsafat Pancasila.

Salah seorang pencetus *Manifes Kebudayaan* yang banyak menulis esei ialah Soe Hok Djin alias Arief Budiman. Dalam menanggapi suasana kulturil dan kesusastraan diwaktu itu yang ditunggangi oleh konsep PKI/Lekra "Politik adalah Panglima", ia menulis demikian:

> "Tudjuan politik, dalam program djangka pendeknja ialah *kekuasaan*, di mana dengan kekuasaan itu selandjutnja dia memperbaiki masjarakat. Tudjuan seni dalam program djangka pendeknja ialah *keindahan/estetika*, di mana selandjutnja dia menjempurnakan eksistensi manusia. Tampak di sini perbedaan daerah perdjuangan. Seni dapat dipakai sebagai alat politik, tapi seni tersebut sudah bukan seni lagi, karena sudah bermotifkan kekuasaan. Politik dapat djadi objek seni, politik itu sudah bukan politik lagi karena motifnja bukan kekuasaan".[13]

Memang benar musuh besar golongan-golongan yang non-komunis di Indonesia itu ialah kekuatan-kekuatan yang mengembang dan berpengaruh dari PKI dan ormas-ormasnya. Memang benar juga pihak sponsor KKPI juga bermain politik dan lebih banyak menyuarakan hasrat "budi nurani manusia" dari segi politiknya. Hal ini tidak bisa dielakkan oleh mana-mana golongan sekalipun. Timbulnya organisasi-organisasi kulturil diwaktu itu seperti Lesbumi dan LKN sebagai wadah dari partai-partai politik Nahdatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia, adalah untuk mengimbangi kekuatan PKI tersebut. Dalam hal ini LKN yang dipimpin Sitor Situmorang lebih banyak mengambil garis politik PNI Ali/Surachman yang pro-PKI, hingga akhirnya LKN merupakan suatu front kebudayaan yang sama dengan Lekra dalam cita-cita kebudayaan dan politiknya. Pihak Lesbumi dan masyarakat Islam merasakan PKI lewat Lekra menghina umat Islam dengan mementaskan

---

12. Wiratmo Sukito, *ibid.*, h. 2

13. Lihat Soe Hok Djin, "Manusia dan Seni; Suatu renungan tentang fungsi dan pengertian seni", *Sastra*, no. 6, th. III, 1963, h. 31

drama-drama anti-Islam di Pekalongan dan ditempat-tempat lain hingga menyebabkan Lesbumi melancarkan pula aktivitas-aktivitas budaya yang bercorak menentang kaum komunis.[14] Massa dalam ormas-ormas partai politik itulah yang sesungguhnya menggerakan partai untuk menjalankan aksi lebih lanjut, baik dibidang politik, ekonomi maupun kebudayaan.

Mengapakah kira-kira empat bulan setelah diterbitnya *Manifes Kebudayaan* PKI/Lekra tidak melancarkan kecaman-kecaman mereka? Mengapakah PKI/Lekra melancarkan kecaman habis-habisan terhadap *Manifes Kebudayaan* bila selesai saja KKPI pada bulan Maret 1964 itu? Mungkin pada mulanya pihak PKI/Lekra menganggap bahwa *Manifes Kebudayaan* tidak akan didukung oleh masyarakat yang sudah diindoktrinir dengan konsep Manipol-Usdek, dan menganggap *Manifes Kebudayaan* tidak bisa menarik perhatian masyarakat ramai di Indonesia. Oleh karena pihak yang mencetuskan *Manifes Kebudayaan* kesemuanya terdiri dari orang-orang yang non-partai, maka pengaruhnya dalam masyarakat mungkin kurang, dan dengan sendirinya *Manifes Kebudayaan* akan "mati". Orang-orang yang mencetuskan konsep tersebut tidak punya massa rakyat untuk melancarkan aktivitasnya di luar Djakarta seperti mana yang dilakukan oleh Lekra diberbagai kota dalam Indonesia. Dengan demikian *Manifes Kebudayaan* akan mati dalam *Sastra*, *Basis* dan lain-lain harian/mingguan yang memuatkan pernyataan itu sahaja. Mungkin juga pihak PKI/Lekra terlalu "over-confident" bahwa mass-media yang dipengaruhi diwaktu itu bisa menghancurkan gerakan anti-Manipol dan anti-PKI apalagi mengingatkan kantor berita Antara dan PWI telahpun dikuasai oleh orang-orang komunis ataupun simpatisan-simpatisannya.

Tetapi bila melihat bahwa pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* berhasil mengadakan KKPI dan mempengaruhi KKPI di mana turut hadir 1455 orang peserta perorangan dan 41 organisasi yang tersebar di seluruh tanahair,[15] maka PKI/Lekra melihat bahwa KKPI adalah suatu bahaya yang menkonfrontir cita-cita Partai. Tambahan pula pihak PKI/Lekra sudah pasti mendapat rahasia bahwa pihak Angkatan Darat Republik Indonesia adalah pendalang KKPI, dan dengan demi-

---

14. Wawancara dengan Drs. Asrul Sani, penyair, eseis, sutradara film yang juga menjadi tokoh Lesbumi. Wawancara dibuat pada 24 Januari 1968.

15. Menurut surat H.B. Jassin pada Menteri P.D. dan K., Prof. Dr. Prijono, tanggal 6 Mei 1964 jumlah para peserta adalah seperti di atas. Menurut surat Bokor Hutasuhut kepada Jeneral A.H. Nasution tanggal 23 April 1964 jumlah peserta ialah 2005 orang perorangan dan 67 organisasi kebudayaan/kesenian yang menyokong *Manifes Kebudayaan*.

kian PKI/Lekra serta ormas-ormas PKI lainnya mengintensifkan aktivitas-aktivitas mereka untuk menghancurkan KKPI dan menindaskan pengaruhnya pada masyarakat. Sebagai tindakan pertama PKI/Lekra memberikan konotasi politis yang buruk terhadap KKPI yang diberi "pengertian politis" sebagai "KK–PSI". Dengan menyebut "PSI" orang bisa mendapat pengertian bahwa PSI yang dilarang oleh Presiden Soekarno itulah yang mendalangi KKPI. Sekiranya rakyat termakan racun fitnahan politik PKI itu, maka dengan gampang PKI bisa menunjukkan kepada Presiden Soekarno dan mendesaknya supaya melarang KKPI dan segala pernyataan-pernyataannya karena KKPI dianggap berbahaya atau mencoba merongrong Manipol. Untuk mengiatkan aksi-aksi penganyangannya dalam bidang perang psychologis ini dengan pihak *Manifes Kebudayaan*, pihak PKI/Lekra menggunakan penerbitan-penerbitannya seperti *Bintang Timur*, *Harian Rakjat*, *Warta Bhakti*, *Zaman Baru* dan lain-lain lagi untuk meracuni pikiran rakyat untuk memusuhi *Manifes Kebudayaan*.

Mengingatkan bahwa KKPI didalangi oleh Angkatan Darat yang mengongkosi konferensi tersebut, dan mengingatkan bahwa kaum intelektuil, sastrawan dan seniman yang mencetuskan *Manifes Kebudayaan* juga mendapat simpati dari organisasi-organisasi kebudayaan dan orang-orang perorangan, maka kecaman terhadap KKPI sudah dimulakan siang-siang lagi. Sejak bulan Januari 1964 tokoh-tokoh Lekra/PKI dan LKN melancarkan aksi-aksi pengganyangan terhadap KKPI dan *Manifes Kebudayaan*. Pihak PKI/Lekra mengetahui bahwa pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* mencoba mempengaruhi KKPI untuk meminta sokongan moril dan kulturil agar menerima konsep yang ditrapkan dalam *Manifes Kebudayaan* itu. Pramoedya Ananta Toer dalam menanggapi KKPI antara lain berkata bahwa *Manifes Kebudayaan* "adalah berwatak kontra-revolusi dan patut sekali disinjalemenkan sebagai sesuatu jang berwatak kontra-revolusi daripada gerakan ini (KKPI-penulis)."[16] Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa KKPI ditunggangi oleh orang-orang *Manikebu*, dan oleh sipatnya yang kontra-revolusi, maka ia tidak dapat memasukan golongan komunis di dalamnya.[17]

Istilah *manikebu* dicipta oleh orang-orang PKI/Lekra dan LKN untuk memberi "gelaran" kepada penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan*. Manikebu dianggap sebagai suatu yang kurang baik, ber-

16. Lihat *Pos Minggu*, th. V, no. 245, tgl. 12 Januari 1964.
17. Lihat *Bintang Timur*, th. ke–38, no. 4, tgl. 5 Januari 1964.

sipat kontra-revolusi menurut konotasi politik PKI/Lekra dan LKN. Sungguhpun pada mulanya *Manikebu* dimaksudkan pencetus-pencetus dan penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan*, lama kelamaan istilah tersebut mencakupi juga bagi mereka yang menentang gagasan-gagasan pikiran dan aktivitas-aktivitas PKI dalam bidang politik, kulturil dan sebagainya.

Jelas sudah Pramoedya mencoba membuat garis pemisahan dan kelainan antara watak KKPI dengan watak golongan komunis. Oleh karena KKPI dianggap sebagai "kontra-revolusi", maka ia tidak bisa diikutsertakan oleh golongan komunis yang dianggapnya revolusioner. Dalam alam Manipol setiap aktivitas yang kontra-revolusioner harus dibasmikan.

Tajuk rencana *Trompet Masjarakat* (Surabaja) dalam ruangan 'Tanahair' juga mengecam KKPI dan menganggap "hanya pengarang2 jang pandangan kulturilnja sama dengan perantjang-perantjangnja itu sadja jang diundang ..." dan "...tidak ada kehendak...untuk setia kepada prinsip-prinsip manipolis," dan akhirnya membuat kesimpulan KKPI diilhamkan dari "para penandatangan Manifes Kebudajaan".[18] Slogan-slogan yang sering dikeluarkan oleh PKI/Lekra dan penyokong-penyokongnya ialah KKPI itu "anti Nasakom", "kontra revolusi" dan "antek imperialis". Sitor Situmorang dalam kecamannya terhadap KKPI menumpukan perhatian khusus pada H.B. Jassin dan Wiratmo Sukito yang dianggapnya, "Mereka mewakili grup 'akademis' jang perhatiannja kepada kebudajaan dan sastra dari sudut teori sadja...bersikap 'text book thinking', menentang golongan progresif dan manipolis..."[19]

Sitor sebagai ketua LKN dari PNI Ali/Surachman memainkan klise-klise Soekarno seperti "text book thinking", "manipolis" dan sebagainya. Menganggap H.B. Jassin dan Wiratmo Sukito sebagai "text book thinkers" akan memberikan suatu tuduhan yang sama nada dengan tuduhan Soekarno terhadap para sarjana Indonesia yang sangat patuh pada pengetahuan yang terdapat dalam buku-buku ilmiah semata-mata. Dengan demikian ilmu pengetahuan mereka itu tidak penting karena mereka tidak menghayati cita-cita revolusioner dari perjuangan bangsa Indonesia dewasa itu.

Seperti yang telah dikemukakan lebih dulu dalam tulisan ini, KKPI juga bermain politik. Pihak sponsor KKPI yang terdiri dari BMKN, OPI, HSBI, Lekkrindo, pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan*

---

18. Lihat terbitannya pada tanggal 8 Januari 1964.
19. Lihat *Bintang Timur*, th. ke 37, no. 313, tgl. 14 Disember 1963.

yang terdiri 450 orang perseorangan dan 35 organisasi kebudayaan, BMKI yang terdiri dari HSBI, Lesbumi, Leski (badan kebudayaan partai PSII), MASBI, tokoh-tokoh dan cendekiawan Islam dan Pusat Research Islam Indonesia,[20] mencoba membawa suatu iklim kulturil yang segar dan sehat dari suasana kulturil dan politik yang ditunggangi oleh PKI dan partai-partai politik serta ormas-ormas yang sealiran dengannya. Mereka mencoba untuk bicara soal kulturil yang sehat, tetapi persoalan-persoalan kulturil yang "murni" itu disapu bersih oleh suasana konferensi yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari berbagai organisasi kebudayaan di tanahair dan juga orang-orang perseorangan yang diundang. Nampaknya para peserta yang hadir dalam konferensi itu tidak bisa melepaskan pembicaraan kulturil tanpa menyangkut persoalan politik yang dominan dewasa itu.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam konferensi tersebut dengan jelas menunjukan betapa kuatnya desakan politik populer pada waktu itu, hingga persoalan kulturil yang sehat sudah menjadi "tidak penting" lagi. Ikrar para delegasi yang berbunyi antara lain, "berdjuang beserta seluruh Rakjat untuk mentjapai tudjuan Revolusi Indonesia dengan berlandaskan Pantjasila dan berhaluan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Ogos 1959," dan berikrar untuk "taat kepada garis Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno",[21] dengan sendirinya menyebabkan KKPI melibatkan diri kepada persoalan politik yang dominan dewasa itu. Dengan membuat satu keputusan yaitu "Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia menempatkan diri langsung di bawah komando dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno"[22] menimbulkan sikap politik-budaya ala komunis.

Kalau di negara-negara komunis dan sosialis kaum cendekiawan, sastrawan dan rakyat harus tunduk kepada kehendak-kehendak parti, dan di Repablik Rakyat Tiongkok harus selaras pula dengan ajaran-ajaran Mao Tze-tung, di Indonesia pula, di mana posisi Soekarno adalah sebagai diktator, maka ajaran-ajaran Soekarno dan pidato-pidatonya menjadi sumber ilham dan pedoman untuk seluruh rakyat guna ditrapkan dalam penghidupan budaya dan politik. Oleh karena terdapat anggapan umum bahwa "Revolusi Indonesia belum selesai", baik oleh Presiden Soekarno maupun oleh partai-partai politik, maka setiap warganegara Indonesia harus bekerja keras untuk menyelesaikan revo-

---

20. Lihat makalah acara KKPI.
21. Lihat "Ikrar Karyawan Pengarang Indonesia" pada acara KKPI.
22. Lihat keputusan sidang paripurna KKPI.

lusi, tidak kecuali kaum cendekiawan, sastrawan dan juga seniman. Justru itu aksi-aksi serta pikiran-pikiran yang berlawanan dengan cita-cita Manipol-Usdek Soekarno adalah dianggap kontra-revolusi satu "dosa" yang tidak bisa diampunkan.

Secara psychologis kita dapat memahami bahwa para delegasi KKPI berasa jiwa mereka tertekan oleh suasana politik Indonesia yang gawat dewasa itu, dan risiko yang berat bisa terjadi sekiranya mereka mengambil suatu sikap kulturil yang bertentangan 100% dari Manipol-Usdek Soekarno. Mereka terpaksa melakukan tindakan secara diplomatis dan hati-hati agar keputusan-keputusan yang diambil tidak bersipat menentang ajaran-ajaran Bung Karno. Di mana perlu mereka mengutip ajaran-ajaran Bung Karno untuk menyesuaikan cita-cita politik-kulturil mereka.[23] Kalau PKI/Lekra juga menipulasikan ajaran-ajaran Bung Karno untuk disesuaikan dengan garis politik-kulturil mereka, maka pihak-pihak lain pun turut manipulasikan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Walaupun dalam Mukaddimah KKPI dinyatakan "djawaban blak-blakan terhadap semua tantangan", namun dalam konferensi tersebut para peserta lebih banyak di "bentuk" oleh suasana politik pada waktu itu. Mungkin tidak 100% dari hasil konferensi itu memuaskan pihak pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan*, tetapi mereka bisa berterima kasih karena cita-cita idiil Pancasila dipertahankan dalam konferensi tersebut. Apabila dalam salah satu resolusi KKPI dijelaskan "bahwa Agama adalah unsur pokok dalam nation dan character building", maka ini merupakan suatu jawaban yang berani dalam mengkonfrontir aksi-aksi PKI/Lekra yang sering menghinakan agama. Dengan memasukkan peranan agama sebagai keputusan KKPI, para peserta merasai bahwa "sila" pertama dalam filsafat Pancasila itu diberi kedudukan yang mulia sekali lagi.

Para delegasi juga menyedari bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam pers Indonesia diwaktu itu bersipat destruktif dan subjektif. Ini disebabkan pers Indonesia pada sebagian besarnya dikontrol oleh PKI, termasuk juga kantor berita Antara dan PWI. Oleh karena Presiden Soekarno sendiri pernah menegur tentang pemberitaan yang diputar-belitkan itu, maka KKPI menghasilkan satu resolusi lagi, yaitu "mendukung sepenuhnja andjuran Presiden Soekarno supaja pers Indonesia menuliskan berita-berita setjara objektif dan konstruktif."

---

23. Misalnya Wiratmo Sukito dalam membuat "Pendjelasan Manifes Kebudajaan" banyak mengutip literatur Pancasila antara lain tulisan-tulisan Bung Karno dan Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Pada waktu ini banyak harian-harian yang menentang gagasan pikiran PKI. Atau dituduh oleh Presiden Soekarno menentang cita-cita politiknya ataupun dikatakan punya asosiasi dengan partai-partai politik yang terlarang yaitu PSI dan Masjumi. Dengan demikian harian-harian tersebut seperti *Abadi*, *Pedoman* dan *Indonesia Raya* dilarang terbit. Bahwa ada golongan pers yang tidak senang terhadap dominasi PKI dalam bidang politik-kulturil itu dapat dibuktikan dari polemik-polemik yang terjadi diwaktu itu antara *Harian Rakjat*, harian PKI dengan *Merdeka* dan *Api*. Kedua harian yang akhir ini dilarang terbit.[24] Antara harian-harian yang dilarang oleh Soekarno termasuklah *Angkatan Baru* yang dilarang oleh Soekarno pada tahun 1961 (karena pro-Masjumi), *Berita Indonesia* dilarang oleh rejim lama pada bulan Januari 1965 karena kegiatan BPS, *Indonesian Observer* yang dipimpin oleh Herawati Diah, isteri B.M. Diah, dilarang pada bulan Februari 1965 bersama-sama dengan *Merdeka* di bawah pimpinan B.M. Diah.[25] Oleh karena harian-harian yang berani mengecam PKI dan politik Soekarno dilarang terbit, maka mass-media dan pers Indonesia merupakan pers yang bersipat "monologue". Rupa-rupanya pihak Soekarno sendiri menyedari bahwa pers Indonesia juga tidak memberikan pemberitaan-pemberitaan yang konstruktif bagi kepentingan dirinya, hingga ia terpaksa menegur pers diwaktu itu.

Melihat dari keputusan yang diambil dalam KKPI dapat meninggalkan kesan kepada kita bahwa seolah-olah KKPI hanya diadakan untuk membuktikan solidaritet golongan-golongan yang anti-PKI dan simpatisan-simpatisannya yang lain. KKPI lahir sebagai satu "show of force" yang masih belum tentu akan keutuhan dan kekuatannya. Bagaimanapun, dengan adanya sokongan materi dan moril dari Angkatan Darat, dan tambahan pula terdapat beberapa orang perwira tinggi Angkatan Darat yang mengambil bagian yang aktif dalam KKPI, pihak sponsor KKPI berasa kuat dan optimistis terhadap kemenangan perjuangan mereka untuk menegakan iklim kulturil yang sehat, bebas dari fitnahan dan cemuhan PKI dan ormas-ormasnya yang lain. Bagaimanapun masih bergayut rasa kecemasan dan tekananjiwa dari para cendekiawan,

---

24. Polemik antara *Merdeka* dan *Harian Rakjat* diterbitkan dalam bentuk buku. Yang diterbitkan *Merdeka* diberi judul *Polemik H.R. dan Merdeka* (Merdeka Press, 1965). Yang diterbitkan *Harian Rakjat* diberi judul *Polemik Merdeka Harian Rakjat* (*Harian Rakjat*, 1964).

25. Bacalah Roger K. Paget, "Indonesian Newspapers 1965–1967" dan "Djakarta Newspapers, 1965–1967: Preliminary Comments", *Indonesia*, Modern Indonesian Project, Cornell University, Ithaca, no. 4 (Oktober 1967), pp. 170–226.

sastrawan dan seniman dalam KKPI terhadap tindakan-tindakan yang bisa berlaku, baik dari pemerintah maupun dari golongan-golongan revolusioner diwaktu itu, sekiranya mereka menyimpang dari Manipol-Usdek Soekarno. Di sinilah kelihatan kaum cendekiawan Indonesia terpaksa tunduk kepada iklim kulturil yang suram dewasa itu, hingga pencarian unsur-unsur kulturil yang murni bisa di-tenggelamkan oleh persoalan-persoalan politik yang menyimpang jauh dari problim-problim kulturil dan kesusastraan umumnya.

Untuk menyelaraskan konsep kulturil dengan milieu politik dikala itu, pihak sponsor KKPI menggunakan tema konferensi "Peranan Pengarang Indonesia dalam perdjuangan mentjapai tudjuan Revolusi Indonesia", yang mana memungkinkan para delegasi KKPI untuk lebih banyak menggali dan menyorot daerah dan konsepsi politik Soekarno dari membicarakan problim kulturil secara sirius, sistimatis dan berkesan. Wiratmo Sukito yang merumuskan konsepsi *Manifes Kebudayaan* dalam prasarannya masih belum berani mengemukakan pendapat-pendapat yang non-politis hingga ia secara bijaksana menyatakan:

> "Tidak ada persoalan tentang 'commitment' dengan sesuatu golongan, bahkan seorang karyawan pengarang tidak melakukan 'commitment' dengan golongannja sendiri, golongan karyawan pengarang, melainkan djiwa toh ada 'commitment' itu maka seorang karyawan pengarang hanya melakukan 'commitment' dengan tudjuan Revolusi, bersama-sama dengan golongan2 karyawan lainnja jang djuga harus mengadakan 'commitment' dengan tudjuan Revolusi".[26]

Konferensi yang telah diadakan itu menelurkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Dalam Anggaran Dasar PKPI inipun kelihatan pengaruh politik yang kuat. Pada fasal tiga dijelaskan bahwa "PKPI berasaskan Pantjasila dan berhaluan Manipol-Usdek," dan "bertudjuan menggalang persatuan pengarang Indonesia bagi perdjuangan mentjapai tiga kerangka tudjuan Revolusi Indonesia."[27]

Bukankah ini jalan tengah yang paling selamat untuk PKPI, yaitu dalam suatu nada memuja Pancasila dan dalam nada yang sama menyokong pula konsep Manipol-Usdek yang menjadi haluan negara Republik Indonesia diwaktu jayanya Soekarno dan PKI? Inilah konflik spirituil yang dihadapi oleh seniman-seniman dan cendekiawan Indonesia.

26. Lihat Wiratmo Sukito, "Prinsip Kepengarangan Kita", prasaran pada KKPI (stensilan saja).
27. Lihat "Anggaran Dasar Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia" pada fasal tiga dan empat.

Secara sedar mereka mengetahui bahwa Manipol-Usdek itu adalah ide-ide yang berbau komunisme, dan konsep itu diperalatkan oleh PKI/Lekra semau-maunya guna mensukseskan program Partai. Manipol-Usdek sejak tahun 1959 telah menjadi haluan negara yang akhirnya menelurkan gagasan politik "the new emerging forces" Djakarta-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Bagi golongan seniman, sastrawan dan cendekiawan yang non-komunis, mereka terjerat antara kejujuran dan prinsip intelektualisme yang dimiliki mereka dengan problim-problim politik yang menjurus kepada "dictatorship". Dengan demikian dapat dikatakan KKPI yang menelurkan PKPI adalah refleksi dari dunia kulturil Indonesia yang ditunggangi politik. KKPI dan PKPI juga merupakan satu konsesi intelektuil-kulturil terhadap tuntutan-tuntutan politis dewasa itu. kerelaan

bab VIII 1. Kelahiran Manikebu di pers yg. pertama kali
2. Penandatangan M.
3. Fungsi M.
4. M dan Angk. 45
5. Yg. tak disetujui M
6. Yg. dibelakang M (h. 83)
7. Mukadimah KKPI = M
8. Cita-cita KKPI (h. 85)
9. Wiratmo Mg. humanisme universil
10. Arief: tujuan politik ≠ seni (dlm. jangka pendek)
11. 1964 Lekra/LKN mulai melancarkan aksi (lewat Pram, Sitor)
12. pengikut KKPI (h. 90)
13. sikap diplomatis KKPI (h. 90)
14. hakekat KKPI (92)
15. adanya konflik spirituil dr. pengarang (93)

BAB KESEMBILAN

DEKRIT PRESIDEN: 8 MEI 1964 DAN KESANNYA DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

Seperti yang telah dikemukakan dulu dalam tulisan ini, serangan-serangan terhadap *Manifes Kebudayaan* dan KKPI di-lancarkan hebat-hebatan oleh tokoh-tokoh PKI/Lekra. Di-samping itu Sitor Situmorang dan lain-lain anggota LKN Ali/Surachman tidak ketinggalan menyemarakan kecaman-kecaman terhadap penentang-penentang konsep kulturil mereka. Oleh karena pers dikuasai oleh PKI, dan kalaupun ada yang dianggap "bebas" masih juga menyuarakan sikap politik Soekarno, maka kecaman-kecaman terhadap penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* dan KKPI bertambah nyaring dalam *Harian Rakjat*, *Zaman Baru* dan *Bintang Timur*. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam harian-harian dan majalah PKI/Lekra bukan hanya mengecam *Manifes Kebudayaan* dan KKPI, tetapi juga membuat serangan-serangan pribadi serta ancaman. Lukiskan-lukisan potret disiar dalam harian-harian untuk menunjukan kepada pembaca-pembaca kususnya orang-orang PKI/ Lekra siapa-siapakah pendukung-pendukung *Manikebu* itu. Antara potret-potret yang dilukiskan termasuklah wajah J.U. Nasution, seorang dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Boen Sri Oemarjati dan Bur Rasuanto, kedua-duanya penandatangan *Manifes Kebudayaan*.

Sesuai dengan pengaruh PKI yang kuat terhadap rejim Soekarno yang akhirnya melahirkan kabinet Nasakom serta garis-garis politik nasional dan internasional yang bersesuaian dengan cita-cita PKI, maka PKI lewat Lekra mengintensifkan pengindoktrinasian jiwa Nasakom dan Manipol-Usdek dalam bidang kulturil. Kemunculan *Manifes Ke-*

PKI/Lekra harus menghancurkan *Manifes Kebudayaan* karena ia menolak "The end justifies the means" atau "Tudjuan menghalalkan tjara" yang menjadi metode kerja kulturil PKI/Lekra. Apa saja metode bisa digunakan asalkan cita-cita akhir menjadikan Indonesia dan rakyatnya sebagai negera dan rakyat komunis berhasil. Justru itu PKI/Lekra melancarkan pula konsep "Politik adalah Panglima" sebagai konsep politik-kulturilnya. Disamping itu pendukung *Manifes Kebudayaan* menganggap filsafat demokrasi Pantjasila sebagai *humanisme kulturil* yang diassosiasikan dengan konsep kulturil Angkatan 45 dulu — *humanisme universal*. Pihak Lekra melihat bahwa *humanisme kulturil* itu adalah lanjutan dari konsep kulturil *humanisme universil* yang pernah ditentangnya dulu.[2] Oleh karena itu PKI/Lekra sekali lagi melancarkan aksi-aksi mereka. Tetapi kali ini mereka lebih seru dan militan karena PKI mempunyai posisi yang penting dan terkuat dalam politik nasional Indonesia. Seperti juga dengan serangan-serangan Lekra yang dibuat oleh Klara Akustia alias Jogaswara alias A.S. Dharta terhadap konsep Angkatan 45 yang dianggapnya "Angkatan 45 sudah mampus",[3] maka kali ini lemperan-lemparan kecaman oleh Lekra lebih hebat dan agresif lagi. Kali ini seluruh kekuatan Lekra ditambah dengan kekuatan PKI digunakan untuk menghancurkan gagasan pikiran *Manifes Kebudayaan*. Kalau dulu H.B. Jassin yang mengemukakan konsep *humanisme universil* hanya menerima tentangan dari Klara Akustia dan Boejoeng Saleh saja, kini H.B. Jassin dan kawan-kawannya harus menghadapi suatu partai politik yang ekstrim dengan ormas-ormasnya sekaligus.

Sebagai serangan kulturil yang bersandar pada politik pihak PKI/Lekra menuduh *Manifes Kebudayaan* bersipat "kontra-revolusi", "anti-rakyat", "borjuis", "kosmopolitan" dan lain-lain tuduhan yang berbau politis. Lewat jurubicara Lekra, Pramoedya Ananta Toer, serangan-serangan terhadap pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* menjadi lebih ekstrim. Disamping Pram, Bakri Siregar dan Sitor Situmorang juga membuat kecaman–kecaman yang seru terhadap pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan*. Prof. Dr. Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang condong pada Marxisme, dalam kata sambutannya pada KKPI mengatakan *Manifes Kebudayaan* tidak menyebut langsung Manipol, tetapi hanya menyebut Pantjasila. Prijono menjelaskan:

"Andaikata diantara Pantjasila dan Manipol itu jang disebut salah

2. Pada awal tahun 50an pihak Lekra lewat Klara Akustia membuat kritik yang tajam terhadap konsep *humanisme universil*. Lihat H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei* (II), h. 24–29.

3. H.B. Jassin, *ibid.*, h. 27.

budayaan pada waktu itu dianggap sebagai suatu penghalang besar dalam pentrapan indoktrinasi rakyat. Tambahan pula mereka melihat *Manifes Kebudayaan* didukung pula oleh KKPI walaupun tidak 100%. Apa yang membimbangkan PKI dan Lekra ialah sikap bantahan atau oposisi yang masih timbul dikalangan intelektuil, sastrawan dan seniman Indonesia terhadap gagasan politik-kulturil Soekarno yang dipengaruhi PKI itu. Sekiranya sikap oposisi dari para intelektuil dibiar begitu saja, besar kemungkinan cita-cita untuk menggembelingkan pikiran rakyat pada suatu ideoloji politik cap PKI tidak bisa dilaksanakan.

Simpati rakyat terhadap perjuangan PKI/Lekra dalam bidang kulturil harus dicari. Pikiran-pikiran Soekarno tentang "kebudayaan yang berkepribadian nasional" dicatut oleh PKI/Lekra untuk membuktikan bahwa PKI/Lekra sungguh-sungguh "mencintai" rakyat dan sungguh-sungguh konsekwen dalam pentrapan ajaran-ajaran Soekarno. "Kebudayaan yang berkepribadian nasional" yang dimaksudkan Soekarno diberi tambahan oleh PKI/Lekra bahwa konsep kulturil itu harus mendasari sokoguru Indonesia yang terkuat dan banyak, yaitu kaum buruh, tani dan kemudiannya ditambah dengan prajurit. Sikap ini dengan jelas dikemukakan dalam keputusan KSSR yang antara lain berpendapat:

> "Disamping harus menjempurnakan pengabdian kita terhadap buruh dan tani dengan lebih menanamkan pendirian dan sikap klas jang tepat, Konfernas menggarisbawahi didjadikan djuga pradjurit sebagai objek karya sastra dan seni repolusioner, sebab ditindjau dari kelahirannja, asal-usul dan vitalitetnja, pradjurit-pradjurit kita pada hakikatnja adalah Rakjat pekerdja jang memanggul senapan jang setjara politik sudah lama tidak mendjadi soal bagi kita".[1]

Dengan adanya *Manifes Kebudayaan* yang berlandaskan "hati nurani manusia" dianggap oleh PKI/Lekra sebagai penyelewengan dari Revolusi Indonesia yang berporoskan sokoguru tani, buruh dan prajurit itu. Pengertian "hati nurani manusia" tidak menjelaskan pertentangan klas seperti mana yang dimaksudkan PKI/Lekra. Kepada PKI/Lekra manusia-manusia dari klas penghisap dan penindas seperti kaum feodal, kolonial, kapitalis dan imperialis adalah tetap jahat dan harus dihapuskan. Manusia-manusia dari klas tertindas seperti kaum tani, buruh dan prajurit inilah yang harus diperjuangkan, dipuja dan diberi pembalasan yang sesungguh-sungguhnya. Konsep "hati nurani manusia" kepada PKI/Lekra terlalu umum dan tidak revolusioner.

1. Lihat resolusi KSSR (stensilan). Disimpan dalam arsip H.B. Jassin.

karena dalam ide-ide itu terdapat persesuaian sikap politik-kulturil dalam perjuangan komunisme. Justru itu agumentasi Prijono merupakan sebagai suatu helah politis semata-mata.

Sikap politis Prijono lebih ketara lagi bila ia menyatakan keraguannya tentang pernyataan sikap dalam *Manifes Kebudayaan* yang antara lain mengatakan, "sedjahat-djahat manusia ia tetap memantjarkan tjahaja Ilahi...", yang oleh Prijono dikaitkan dengan persoalan kekejaman imperialisme Inggeris dan Belanda terhadap anak-anak negeri di bawah penjajahan mereka.[7] Kelihatan sekali Prof. Prijono menilai kebaikan dan kejahatan manusia itu dari aspek politik Marxisme yang menganggap bahwa manusia tertindas dan terhisap itu adalah mangsa dari kebuasan imperialisme, kolonialisme dan golongan-golongan penindas yang lain. Dengan lain perkataan Prijono tidak menganggap kaum penindas mempunyai cita-cita yang murni langsung.

Serangan terhadap pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* dan KKPI dilancarkan dengan sengitnya oleh redaktur *Bintang Timur* yang menuduh *Manifes Kebudayaan* hendak memisahkan politik dan kebudayaan. Mereka menganggap "mendjadikan Manikebu pegangan dan pedoman berarti mengesampingkan Manipol. Dan inilah tudjuan para konseptor Manikebu jang hakiki."[8] Sitor dalam serangannya berkata *Manifes Kebudayaan* hendak "memetjahbelah persatuan Nasakom."[9] Tajuk rencara *Warta Bhakti*, sebuah harian yang dipengaruhi PKI, berkata:

> "Gagasan 'Manikebu' lahir dari siasatnja orang-orang jang partainja sudah dilarang dengan mentjoba berfilsafat bahwa kemanusiaan tanpa pandang bulu harus mendjadi mahkota hidup kita. Manipol jang tidak bertoleransi terhadap kaum kontra-revolusi. Manipol jang tidak memberi ampun kepada imperialisme agaknja dianggap oleh kaum Manikebuis sebagai suatu jang tidak berperikemanusiaan ... Manikebuisme, meskipun sekedar bermerk 'kebudajaan' tetapi hakikatnja adalah suatu paham yang ditjiptakan setjara masak untuk membela liberalisme..."[10]

Sikap PKI/Lekra sangat jelas dalam mengisolasikan para penyokong dan pendukung *Manifes Kebudayaan* dan KKPI dari rakyat banyak. Secara licik PKI/Lekra menuduh bahwa *Manifes Kebudayaan* dan

---

7. Lihat *Dunia Radio Televisi*, th. 10, no. 21, tgl. 8 Maret 1964. Juga lihat *Berita Indonesia*, th. XII, no. 2284, tgl. 5 Maret 1964.
8. Lihat *Bintang Timur*, th. XXXVI, no. 35, tgl. 5 Februari 1964.
9. Lihat *Warta Bhakti*, th. LIV, no. 1398, tgl. 6 Maret 1964.
10. Lihat *Warta Bhakti*, tgl. 11 Mei 1964.

KKPI didalangi oleh tokoh-tokoh politik PSI dan Masjumi yaitu dari partai-partai politik yang telah dipaksa untuk membubarkan dirinya oleh Presiden Soekarno. Dengan taktik demikian PKI dan ormas-ormasnya mencoba untuk memancing simpati dari rakyat untuk mengganyang pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* dan KKPI. Pihak Lekra dan LKN serta PKI memberatkan tuduhan mereka terhadap pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* dengan menuduh mereka anti-Manipol. Ini berarti pendukung-pendukung itu adalah anti-pemerintah dewasa itu. Prof. Prijono secara tidak langsung menuduh *Manifes Kebudayaan* dan KKPI dengan sengaja tidak memasukkan Manipol ke dalamnya, dan ia menganggap pendukung-pendukung *Manifes* mendalangi KKPI. Bagian, sekretaris-jeneral LKN, memberi instruksi kepada seluruh anggota LKN untuk "tidak duduk dan tidak ikut serta dalam KK-PSI", karena LKN berpendapat "bahwa KK-PSI adalah saluran bagi penuangan apa jang disebut ''Manifes Kebudajaan''.[11] Gajus Siagian, seorang anggota LKN dan budayawan tidak menghiraukan instruksi ini, dan tetap mengikuti KKPI. Dia dipecat dari LKN.

Saperti yang dinyatakan dalam "Lentera", ruangan kebudayaan *Bintang Timur*, ia telah "berhasil menjodorkan adanja gerakan anti, bahkan kontra-revolusi, dibidang kebudajaan...",[12] dan ia menyiarkan nama-nama peserta yang mengikuti KKPI serta penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* lainnya. Inilah taktik PKI/Lekra yang sangat ditakuti oleh pendukung-pendukung *Manifes* dan KKPI, dan juga orang-orang yang non-partai, ataupun yang mempunyai hubungan kepartaian yang lain dari PKI. Nama-nama itu dimuat dalam harian-harian PKI dan penyokong-penyokongnya sebagai suatu jalan untuk memberi instruksi dan isyarat kepada anggota-anggota PKI/Lekra dan ormas-ormas PKI yang lain untuk menjalankan aksi-aksi selanjutnya terhadap mereka yang namanya disiarkan itu. Akibatnya beberapa orang peserta KKPI dan penyokong *Manifes Kebudayaan* di daerah-daerah luar Djakarta diberhentikan oleh pihak majikan atau kantor yang dikuasai orang-orang PKI.[13]

Propaganda PKI yang hebat itu mempengaruhi massa bukan sedikit. Serangan-serangan terhadap penyokong-penyokong *Manifes Kebudaya-*

---

11. Lihat *Rakjat*, th. IV, no. 3686, tgl. 3 Maret 1964.
12. Lihat tajuk rencana "Lentera" (*Bintang Timur*), th. XXXVIII, no. 75, tgl. 22 Maret 1964.
13. Dari surat-surat yang disimpan H.B. Jassin diketahui bahwa ada peserta-peserta dan penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* dan KKPI yang diberhentikan kerja di Medan.

an serta KKPI tidak berhenti-henti dalam harian-harian, pidato-pidato tokoh-tokoh PKI/Lekra dan juga dalam tindakan aksi politik. Polemik yang seru antara *Merdeka* dan *Harian Rakjat* yang berlangsung dalam tahun 1964 menunjukan betapa gairahnya pihak komunis untuk menghancurkan segala penentangan terhadap cita-cita PKI dalam segala bidang kehidupan di Indonesia. D.N. Aidit, sebagai Menteri Ko-ordinator merangkap Wakil Ketua MPRS, antara lain mengecam kaum Manikebu yang menentang Nasakom, dan menyeru rakyat untuk "mengungkapkan kemunafikan mereka".[14]

Istilah *Manikebu* bukan lagi diartikan bagi penyokong-penyokong dan pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* sahaja. *Manikebu*, menurut pengertian PKI/Lekra, termasuklah penentang-penentang dari segala bidang kulturil, ekonomi maupun politik yang tidak sehaluan dengan cita-cita PKI.

Bukan saja PKI gesit dalam serangan-serangannya lewat mass-media, tetapi juga penyokong-penyokong PKI/Lekra turun ke jalan-jalan raya berdemonstrasi. Demonstrasi-demonstrasi serta aksi-aksi PKI dan ormas-ormasnya rupa-rupanya mempengaruhi Presiden Soekarno hingga pada akhirnya Soekarno membuat pidato menyerang dunia perguruan tinggi Indonesia. Dalam pidato menyambut ulang-tahun ketiga PTIP, Soekarno mendesak mahasiswa-mahasiswa yang revolusioner dan militan supaya menggeser gurubesar-gurubesar dan sarjana-sarjana yang anti-Manipol.[15] Api yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno disambut dengan gembira oleh gerakan-gerakan mahasiswa kiri dari PKI, PNI dan sebagainya. Tujuh buah gerakan mahasiswa kiri yang militan di Djakarta mengadakan demonstrasi dan aksi-aksi lainnya mendesak diritul sarjana-sarjana dan gurubesar-gurubesar yang dianggap anti-Nasakom dan anti-Manipol. Tujuh buah organisasi mahasiswa kiri itu ialah CGMI, GMNI, GMM, GMD, Germindo, Perhimi dan Gema 45. Antara organisasi mahasiswa ini CGMI di bawah sayap PKI, GMNI di bawah PNI, GMM di bawah Partai Murba, Germindo di bawah Partindo, dan Perhimi di bawah naungan Baperki, sebuah parti politik bagi orang-orang keturunan Cina.[16]

Lain-lain organisasi yang menentang *Manifes Kebudayaan* dan KKPI termasuklah Actor's Studio, Sumatera Utara, BAKOKSI, HIMPI Pusat, Djakarta, Comite Central KPAA, Djakarta di bawah Pramoedya

---

14. *Bintang Timur*, th. 38, no. 75, tgl. 23 Maret 1964.
15. *Bintang Timur*, th. 38, no. 98, tgl. 15 April 1964.
16. *Bintang Timur*, (edisi minggu), th. III, no. 4, tgl. 12 April 1964.

Ananta Toer, Dewan Pimpinan Pusat LKN, Djakarta, Lekra, Front Nasional Sumatera Utara, HSBI, Surabaja, IKAT, Solo, Fakultas Sastra Universitas Res Publica, di Djakarta (sebuah universitas yang ditubuhkan oleh PKI), Lesbumi Sumatera Utara dan lain-lain lagi. Menurut "Lentera" terdapat 88 organisasi yang menolak *Manifes Kebudayaan* dan KKPI.[17]

Kebanyakan organisasi yang menentang *Manifes Kebudayaan* dan KKPI itu sudahpun dipengaruhi oleh kader-kader PKI/Lekra ataupun dipimpin langsung oleh orang-orang yang berhaluan kiri ataupun menjadi penyokong-penyokong dan simpatisan-simpatisan PKI/Lekra. Untuk menunjukan bahwa "seluruh" rakyat menentang *Manifes Kebudayaan* dan KKPI pihak PKI/Lekra tidak segan-segan memasukkan nama-nama organisasi yang bukan organisasi kulturil agar supaya dapat memperlihatkan jumlah penyokong-penyokongnya. Dengan berbuat demikian PKI/Lekra berharap pemerintah akan mengambil perhatian yang sungguh-sungguh berat atas soal konflik kebudayaan yang berlaku, dan mengambil tindakan yang tegas terhadap "penyeleweng-penyeleweng" Manipol dan Nasakom. Aksi-aksi PKI/Lekra memberi indikasi bahwa kebudayaan bukan hanya monopoli kaum cendekiawan, sastrawan dan budayawan, tetapi menjadi perhatian serta tanggungjawab seluruh rakyat.

Sejak lahirnya *Manifes Kebudayaan* pada tahun 1963, PKI/Lekra serta ormas-ormasnya yang lain menjadikan tahun-tahun berikutnya sebagai periode pengganyangan terhadap golongan-golongan "kontra-revolusi", "anti-Manipol" dari penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* dan KKPI. Pembicara-pembicara kulturil dan dunia kesenimanan bukan hanya Trisno Sumardjo, H.B. Jassin atau Wiratmo Sukito, tetapi tokoh-tokoh PKI seperti D.N. Aidit, Njoto juga menaruh perhatian istimewa hingga akhirnya tercetus garis-garis politik-kulturil yang ditrapkan oleh pengikut-pengikut PKI/Lekra dalam bidang kebudayaan dan kesusastraan.

Tidak seorang pun bisa mungkiri bahwa kekuatan politik PKI setelah tahun 1963 sangat kuat dan berpengaruh sekali. Program PKI yang sistimatis dan aktivitas-aktivitasnya yang menyeluruh, menyebabkan banyak kader-kader PKI atau orang-orang yang bersimpati dengan PKI menyusup ke dalam organisasi massa, instansi-instansi pemerintah,

---

17. Dalam *Bintang Timur* (edisi minggu), tgl. 8 Maret 1964, di-siarkan 36 organisasi-organisasi yang menentang *Manifes Kebudajaan* dan KKPI. Dalam "Lentera" (*Bintang Timur*), tgl. 7 Mei 1964 angka penentang menjadi 88 buah.

departemen-departemen, perguruan tinggi dan sebagainya, hingga dengan mudah Comite Central PKI menyalurkan segala instruksi-instruksinya lewat saluran-saluran yang telah dibina itu. PKI dapat mobilisir orang-orangnya dengan gampang untuk mengadakan rapat atau demonstrasi di mana-mana saja dipikirkan perlu. Inilah cara kerja PKI yang tidak bisa ditandingi oleh partai-partai politik lain di Indonesia pada waktu itu.

Oleh karena PKI demikian kuat hingga terdapat tokoh-tokoh-nya masuk dan keluar dari Istana Merdeka. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 8 Mei 1964 melarang *Manifes Kebudayaan*, kira-kira dua bulan setelah selesainya KKPI. Pernyataan larangan terhadap *Manifes Kebudayaan* itu berbunyi:

> "Sebab-sebab larangan itu ialah karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pantjaran Pantjasila telah mendjadi garis besar haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan Manifesto lain, apalagi kalau Manifesto lain itu menundjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan berdiri disampingnja, padahal demi suksesnja Revolusi maka segala usaha kita, djuga dalam lapangan kebudajaan, harus kita djalankan di atas rel Revolusi menurut petundjuk-petundjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lainnja."[18]

Pernyataan larangan Presiden Soekarno itu membawa kehancuran pada cita-cita untuk membebaskan alam kulturil Indonesia dari cengkaman regimentasi mental PKI. Pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menganggap pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan* "ragu-ragu terhadap Revolusi", dan menganggap *Manifes Kebudaayan* bertentangan dengan Manipol adalah "tuduhan-tuduhan" yang sangat berbahaya diwaktu itu. Majalah *Sastra* yang menjadi wadah aktivitas-aktivitas *Manifes Kebudayaan* tidak sampai dilarang tetapi kehabisan darah karena disabot di mana-mana: dipercetakan, di kantur pos dan di agen-agen. Karena larangan terhadap *Manifes Kebudayaan* orang ketakutan membeli dan membacanya.[19]

Pihak PKI/Lekra menyambut larangan tersebut dengan senang hati. Kini sampailah masanya bagi PKI/Lekra dan ormas-ormasnya meningkatkan lagi aksi-aksi terhadap pencetus-pencetus dan penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* yang masih bekerja pada instansi-instansi dan departemen-departemen pemerintah. Mereka mendesak

---

18. Pernyataan larangan Presiden ini disiarkan sepenuhnya dalam *Warta Bhakti*, th. 54, no. 1459, tgl. 10 Mei 1964.
19. Wawancara dengan H.B. Jassin, Disember 1969.

supaya pihak yang berkuasa meritul penyokong-penyokong *Manifes Kebudayaan* di mana saja mereka berada.

Pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* yang terkemuka seperti H.B. Jassin, Wiratmo Sukito dan Trisno Sumardjo merasai bahwa mereka harus membuat sesuatu pernyataan berkenaan dengan larangan Presiden itu untuk menjelaskan posisi *Manifes Kebudayaan* yang sebenar, dan juga membersihkan diri mereka dan lain-lain penyokong *Manifes Kebudayaan* dari aksi-aksi massa yang sudah dipengaruhi PKI. Pada tanggal 11 Mei 1964 ketiga orang tokoh *Manifes Kebudayaan* itu membuat pernyataan menanggapi larangan Presiden tersebut demikian:

> "...tidak ada maksud lain selain daripada membangkitkan swadaja massa untuk merealisasikan Manipol-Usdek dan ketetapan MPRS dibidang kebudajaan.
>
> Dan berhubung sesuai dengan larangan PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, BUNG KARNO, terhadap Manifes Kebudajaan jang tersebut demi keutuhan dan kelurusan djalannja Revolusi dan demi kesempurnaan ketahanan Bangsa, maka kami, para pendukung Manifes Kebudajaan di Djakarta mengandjurkan kepada saudara-saudara agar mematuhi/memenuhi maksud daripada larangan tersebut.
>
> Dengan demikian kita tetap setia di bawah pimpinan dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi, BUNG KARNO, djustru untuk kepentingan Nasional kita sebagai salah satu golongan jang tetap setia pada Revolusi harus menempatkan kepentingan Nasional di atas kepentingan lainnja."[20]

Pernyataan ini dibuat supaya jangan banyak korban jatuh akibat dukungan mereka terhadap *Manifes Kebudayaan*. Pernyataan "minta maaf" dalam kawat yang dikirimkan oleh H.B. Jassin/Trisno Sumardjo kepada Presiden Soekarno menimbulkan reaksi kurang senang disetengah kalangan orang yang menyokong *Manifes Kebudayaan*.[21] Memang kalau ditinjau dari aspek kebebasan memilih sikap hidup dan kulturil pernyataan "minta maaf" H.B. Jassin dan kawan-kawan lainnya adalah pernyataan sikap yang "kurang berani". Tetapi mengingatkan

---

20. Pernyataan ini disebarkan kepada seluruh pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan*, dan diberi tanggal 8 Mei 1964.

21. Ajip Rosidi dalam artikelnya, "Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Sastra Indonesia", *Budaja Djaja*, no. 5, th. 1 (Oktober 1968) menulis: "Jang memperslogan 'Manipol' misalnja, bukan hanja orang-orang jang berkumpul dalam kubu LKN dan Lekra & Co. sadja, tetapi djuga lawan-lawannja termasuk para tokoh Manifes Kebudajaan. (Misalnja telegram Jassin, Trisno Sumardjo dan Wiratmo...)", h. 310

situasi politik Indonsia dewasa itu yang sudah tidak memungkinkan dialog kulturil yang bebas, maka mau tidak mau orang harus mencari jalan lain yang lebih selamat. Setiap kegiatan yang dianggap menyeleweng dari Manipol dan rejim Soekarno dengan gampang mendapat gelaran "kontra-revolusi", "antek imperialis" dan sebagainya, hingga bisa mengakibatkan seseorang dijebloskan ke dalam tahanan tanpa banyak usul periksa. Yang diutamakan dewasa itu ialah kemenangan Revolusi Indonesia yang berporoskan Nasakom, dan hukum-hukum Revolusi tidak mengenal cara-cara yang demokratis dan humanistis.

Pada pendapat kami orang yang banyak sekali mendapat sorotan dan kecaman dari PKI/Lekra dan LKN dalam bidang kebudayaan, ialah H.B. Jassin dan Wiratmo Sukito. Pihak Lekra sudah lama ingin menjatuhkan H.B. Jassin sebagai kritikus dan tokoh kebudayaan Indonesia yang dianggap terlalu konsekwen dalam keyakinan kulturilnya. Inilah waktu yang ampuk buat PKI/Lekra melancarkan serangan-serangan terhadap H.B. Jassin, agar ia roboh dan berpihak kepada gagasan ide-ide komunisme ataupun menghilangkan saja ketokohannya sebagai sarjana dan kritikus sastra. Melenyapkan posisi H. B. Jassin sebagai tokoh kesusastraan merupakan juga suatu kemenangan PKI/Lekra dalam melawan golongan-golongan yang anti-PKI/Lekra. Dengan menggunakan aksi-aksi mahasiswa dari golongan kiri yang militan kedudukan H.B. Jassin sebagai dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, tidak bisa dipertahankan lagi akibat agitasi yang terus-menerus yang dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa kiri tersebut. Walaupun para dosen di Jurusan Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia mencoba mempertahankan kedudukan H.B. Jassin dan Boen Sri Oemarjati seorang dosen yang juga menandatangani *Manifes Kebudayaan*, namun akhirnya kedua sarjana sastra tersebut di-paksa melepaskan kedudukan mereka.

Apakah PKI dan ormas-ormasnya berpuas hati dengan pernyataan larangan Presiden 8 Mei 1964 itu? Mereka masih belum puas hati. *Manikebu*, menurut interpretasi PKI, masih bercokol dalam instansi-instansi, departemen-departemen pemerintah yang terdiri dari para pegawai yang masih melindungi orang-orang *Manifes Kebudayaan*, atau secara pasif bersimpati dengan golongan *Manifes Kebudayaan*. Karena *Manifes Kebudayaan* dicap sebagai anti-Manipol, maka para pegawai yang benci pada partisipasi komunis dalam kebinet Nasakom juga dianggap pendukung *Manifes Kebudayaan* atau *Manikebu*. Sebab itulah D.N. Aidit dalam pidatonya menyambut 44 tahun PKI mendesak rakjat dan mahasiswa-mahasiswa yang progresif menghancurkan kaum *Mani-*

kebu. Ia juga mengatakan masih ada pegawai-pegawai instansi pemerintah yang melindungi kaum *Manikedu* itu.[22]

Aksi-aksi ofensif makin memuncak bila Presiden Soekarno secara langsung memberi angin yang baik bagi peningkatan aksi-aksi massa dari mahasiswa kiri, buruh dan lain-lain ormas yang militan. Banyak sarjana-sarjana, gurubesar-gurubesar yang menentang PKI secara terbuka ataupun secara tidak langsung, diberhentikan. Pertengangan-pertentangan terjadi di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, antara penyokong-penyokong H.B. Jassin dengan T.W. Kamil, seorang sarjana linguistik yang berhaluan kiri dan menjadi tokoh HSI.

Sesuai dengan peningkatan aksi-aksi PKI dibidang politik dan Lekra dibidang kulturil, maka BTI pun mencari mangsa-mangsanya dalam bidangnya pula. A.S. Alatas, seorang lektor kepala bahasa Arab di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, dikaitkan dengan "KK–PSI" karena ia menterjemahkan *Magdalena* yang pernah dihubungkan dengan "plagiarisme" Hamka, dan dituduh pula memiliki beberapa buah bangalow di Puntjak. Drs. Bahrum Rangkuti, seorang mubaligh Islam dituduh sebagai tuan-tanah dan kedua-dua sarjana tersebut diganyang oleh kaum tani di Puntjak dan di Tjiputat![23] Dengan melemparkan tuduhan-tuduhan seperti itu pihak PKI menteror orang-orang yang dianggap menjadi musuhnya.

Pihak PKI menyedari bahwa pengaruhnya sudah meluas dan mendalam dikalangan pemerintah dan juga rakyat, hingga pihak Comiti Central PKI berani mengadakan suatu Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Djakarta pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 1964, di mana garis perjuangan "sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman revolusioner" telah di-bentangkan oleh tokoh Comiti Central PKI, D.N. Aidit dalam referatnya yang berjudul, "Dengan Sastra dan Seni jang berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit". Referat D.N. Aidit inilah yang menjadi pokok dalam aksi dan amalan para sastrawan, cendekiawan, seniman dan propaganda PKI di dalam Lekra dan lain-lain ormasnya bila menaggapi soal-soal kulturil dan kesusastraan.

Mungkin juga PKI/Lekra mengadakan konfernas ini untuk menyaingi KKPI yang telah diadakan dalam bulan Maret 1964 itu juga. Mungkin juga PKI/Lekra berasa kwatir kalau ide-ide dari *Manifes Kebudayaan*

---

22. Lihat D.N. Aidit, "Manikebu bertugas lutjuti sendjata rakjat", dalam "Lentera" (*Bintang Timur*), th. III no. II, tgl. 31 Mei 1964.
23. "Lentera" (*Bintang Timur*), tgl. 31 Mei 1964.

dan KKPI itu masih diteruskan juga secara gelap untuk menghalang cita-cita politik-kulturil PKI. Sungguhpun telah terbit Dekrit Presiden 8 Mei 1964, namun PKI dan ormas-ormasnya masih belum puas dengan pelarangan tersebut. Peningkatan aksi terhadap sisa-sisa *Manifes Kebudayaan* pada instansi-instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun dalam persuratkabaran dan seni, harus berjalan lebih berkesan dan lebih keras lagi. Jadi, dengan lihai sekali PKI menggunakan pernyataan 8 Mei 1964 itu untuk mengeksploitasikan suasana politik-kulturil dewasa itu bagi kepentingan PKI.

Dengan mengadakan konfernas tersebut PKI mencoba membuktikan kepada rakyat dan golongan-golongan yang menentangnya, bahwa suasana politik-kulturil dewasa itu sebenarnya berada di bawah kuasa PKI. Garis-garis perjaungan dalam sastra dan seni yang dikemukakan D.N. Aidit dan disahkan oleh konfernas, adalah garis perjuangan komunis yang berpandukan Marxisme-Leninisme yang "memperkuat sastra dan seni jang memihak dan membela Rakjat pekerdja, terus-menerus memperkuat pimpinan proletariat dibidang sastra dan seni".[24] Dengan demikian ia menganut konsep perjuangan "tudjuan menghalalkan tjara", suatu sikap budaya yang ditentang oleh pendukung-pendukung *Manifes Kebudayaan.*

Kalau H.B. Jassin dan kawan-kawan lain mengemukakan satu Manifesto Kebudayaan yang dianggap oleh rejim pada waktu itu "menundjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi, dan memberi kesan berdiri disamping"[25] Manipol-Usdak, maka PKI tidak secara terang-terangan mengemukakan sebuah manifesto kebudayaan, tetapi secara bijaksana menunggangi Manipol-Usdek untuk kepentingan perjuangan PKI. Tambahan pula kekuatan politik yang dikuasainya memungkinkan PKI membuat "tafsiran dan garis-garis" kebudayaan yang cocok dengan susunan politik dewasa itu.

Nasib yang menimpa H.B. Jassin dan lain-lain pendukung *Manifes Kebudayaan* dan KKPI adalah nasib bagi golongan cendekiawan, seniman, sastrawan dan budayawan Indonesia yang tidak melibatkan diri serta jiwa kepada suatu organisasi politik yang revolusioner dewasa itu. Kaum cendekiawan yang bebas bukan saja menghadapi serangan dan perongrongan dari PKI/Lekra, tetapi juga harus menghadapi sebuah

---

24. Lihat resolusi KSSR. Salinan resolusi ini telah diketik dan disimpan dalam arsip H.B. Jassin.
25. Lihat pernyataan Presiden Soekarno dalam *Warta Bhakti*, th. 54, no. 1459, tgl. 10 Mei 1964.

hati nurani rakjat dan hidup pikiran yang sehat, di sanalah mereka melihat momok jang mereka sebut 'Manikebu'."[27]

Bila Orde Baru muncul sekali lagi bangsa Indonesia menyedut udara kebebasan. PKI yang mendalangi G–30–S dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 dan penyebaran ajaran komunisme dilarang selama-lamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia.[28]

bab IX 1. M — 'penyelewengan dari rev.'
2. Konsep yg. ditentang mati2an oleh PKI (96)
3. Menteri yg. terlibat melarang
4. alasan penyerangan thd M (99 – 100)
5. pengurusnya tinggi2 juga kena semprot
6. puncak pelarangan: dekrit 8–5–1964
7. jawaban M. thd dekrit (104)
8. pegawai2 juga diserang
9. pelarangan thd. M. sebenarnya pelarangan thd. hatinurani

27. Lihat H.B. Jassin, *Angkatan '66 Prosa dan Puisi*. Djakarta: Gunung Agung 1968, h. 8.

28. Jassin, *ibid.*, h. 10. Juga lihat A.Z. Abidin dan Baharuddin Lopa SH. *Bahaja Komunisme*. Djakarta: Bulan Bintang, 1968, h. 79.

BAB KESEPULUH

EPILOOG

Mungkin ada orang menganggap suatu peristiwa sejarah yang lucu bahwa Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi, dan pernah pula dilantik sebagai Presiden seumur hidup menurut keputusan M.P.R.S., yang menguasai politik Indonesia selama 22 tahun, kini dijatuhkan dari posisinya yang tinggi oleh anak-anak sekolah, para pelajar dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia sendiri. Para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI dan KAPI inilah yang menubrak sejarah politik Indonesia hingga akhirnya memancar sinar baru dalam bidang politik dan kehidupan bangsa Indonesia. Aksi-aksi demonstrasi yang dicetuskan KAMI/KAPPI pada bulan Januari 1966 itu sungguh-sungguh membawa satu fase baru dalam sejarah bangsa dan politik Indonesia.

Pada waktu pergolakan politik tersebut, dan pada waktu para demonstran muda membanjiri jalan-jalan raya, mengempiskan ban-ban mobil dan truk, pada waktu teman-teman mereka yang gugur karena mempertahankan hak yang sah dari kehidupan manusia demokratis, berkumandang diangkasa nyayian-nyanyian puisi dari penyair kenamaan, Chairil Anwar.[1] Dalam perjuangan menentukan nasib ini para penyair terlibat langsung dalam pergolakan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar. Beberapa berkas puisi perlawanan seperti *Tirani* dan *Benteng* dari penyair Nur Fadjar alias Taufiq A.G. Ismail di-terbitkan oleh Gema Psychologi, Universitas Indonesia, dalam bulan Maret

1. H.B. Jassin, *op. cit.*, h. 9.

1966. Selain dari penyair Taufiq Ismail terdapat pula berkas puisi Bur Rasuanto yang berjudul *Mereka Sudah Bangkit* (Sanggar Ibu-kota, Djakarta, Maret 1966),[2] Wahid Situmeang dengan *Pembebasan* (stensilan, Sanggar Ibukota, 1966), Mansur Samin pula dengan *Perlawanan* (Sanggar Ibukota) dan *Kebangkitan*, kumpulan puisi lima orang penyair muda dari Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

Kritikus H. B. Jassin yang menanggapi kelahiran puisi-puisi perlawanan ini, antara lian berkata:

> "Di sini para penjair setjara praktis menjumbangkan daja tjipta dalam memberikan perlawanan terhadap kezaliman dan kebatilan. Di sinilah sastra sungguh-sungguh mendjadi alat perdjuangan, seperti pamflet-pamflet jang sekian banjak beredar dan tjoretan-tjoretan di tembok-tembok seluruh kota."[3]

Pada pendapat kami "sastra sungguh-sungguh mendjadi alat perdjuangan," bukan dimulakan oleh penyair-penyair yang tergolong dalam Angkatan 66 ini.[4] Puisi-puisi protes telah dikumandangkan oleh penyair-penyair grup Lekra seperti dalam *Rangsang Detik* kumpulan Klara Akustia, *Matinja Seorang Petani*, kumpulan Agam Wispi dan kawan-kawannya, dan yang banyak mengemukakan soal tanah dalam *Jang Bertanahair tapi Tidak Bertanah*, sebuah kumpulan perseorangan dari penyair S. Anantaguna. Alasan yang diberikan oleh seorang sarjana sastra yang juga menjadi seorang penyair, Subagio Sastrowardojo, bahwa puisi-puisi Taufiq Ismail tidak ada perbedaan pengucapan dengan puisi-puisi protes Klara Akustia dapat diterima.[5] Prof. A. Teeuw pula menganggap puisi-puisi Angkatan 66 sebagai "battle poems" dan meragukan nilai estetisnya.[6]

Walaupun dalam segi penilaian sastra orang mungkin tidak sependapat, namun kelahiran puisi-puisi perlawanan ini merupakan juga suatu detik sejarah dalam perkembangan kesusastraan khususnya, dan politik-kulturil Indonesia umumnya. Pernyataan-pernyataan sikap di

---

2. Edisi kedua diterbitkan oleh BADKO-HMI Sumatera Bagian Utara, Oktober 1967.
3. H.B. Jassin, *op. cit.*, h. 11.
4. Penamaan Angkatan 66 dalam kesusastraan masih menjadi polemik hebat hingga dewasa ini. Banyak tulisan-tulisan yang menentang penamaan seperti di atas termasuk tulisan-tulisan Ajip Rosidi, Arief Budiman, Satyagraha Hoerip dan lain-lain.
5. Lihat Subagio Sastrowardojo, "Sadjak Perlawanan Taufiq Ismail dan Angkatan '66." *Budaja Djaja*, no. 13, th. kedua (Juni 1969), h. 366–382.
6. Lihat A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967, h. 225.

dalamnya, semangat yang melahirkan puisi-puisi itu merupakan juga titik-titik sejarah dalam perjuangan politik-kulturil Indonesia. Penyair-penyair tersebut membenci tirani, korupsi, kebecatan moral yang dilahirkan oleh suatu rejim yang ditunggangi PKI. Baikpun ia dianggap bersipat kontemporer ataupun abadi dari aspek penilaian sastra, berkas-berkas puisi tersebut tetap merupakan suatu dokumentasi sosial-politik-literer yang tidak bisa di-lupakan. Suatu hal yang nyata bahwa Angkatan 66 "menolak Lekraisme dan Neo-Lekraisme di dalam kebudajaan, jaitu dominasi politik atas karya-karya seni."[7]

Dominasi politik atas karya-karya seni itulah yang ditentang oleh Angkatan 66. Kehidupan kulturil bagi bangsa Indonesia harus bebas dari segala kekuasaan politik, dan memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya kepada tenaga-tenaga kreatif untuk mengembangkan bakat serta penghayatan seni dan hidup menurut kemampuan mereka sendiri-sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu simposium yang disponsor oleh Universitas Indoneisa dengan kerjasama KAMI dan KASI yang membicarakan aspek-aspek kebudayaan sangat menarik hati sekali. Kesimpulan-kesimpulan yang dirumuskan itu adalah seperti di bawah ini:

(1) "Falsafah Pantjasila harus diungkapkan dalam seni budaja...."
(2) "Dalam membina dan memperkembangkan seni budaja nasional kita haruslah ditegah penggunaan untuk kepentingan satu golongan...."
(3) "Kekuatan suatu bangsa didukung oleh massa lapisan buruh-pekerdja dan lapisan menengah, tapi kemadjuan suatu bangsa ditentukan oleh potensi kesadaran dan bertindak daripada lapisan universiter."
(4) "Angkatan 66 merindukan kemerdekaan, bukan sadja kemerdekaan politis... akan tetapi kemerdekaan sebagai nilai jang hakiki dari manusia...."
(5) "Angkatan 66 menolak Lekraisme dan Neo-Lekraisme di dalam kebudajaan, jaitu dominasi politik atas karya-karya seni...."[8]

Secara implisit dapat kita saksikan kemenangan konsep *Manifes*

---

7. Lihat *Simposium Kebangkitan Semangat '66: Mendjeladjah Tracee Baru.* (Simposium ini diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, KAMI dan KASI). Diadakan dari tanggal 6 s/d 9 Mei 1966 di Djakarta. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1966.

8. *Ibid.*, h. 8. Lihat kesimpulan umum tentang budaya yang berjudul, "Seni Budaja Indonesia dalam Kehidupan Baru".

Kebudayaan yang berdasarkan *humanisme universil* itu. Sekali lagi para cendekiawan, budayawan, sastrawan dan seniman Indonesia menyatakan "hati nurani manusia" itu sebagai inti penciptaan kreatif mereka.

Yang paling penting dalam sikap kulturil selepas peristiwa G–30–S ialah timbulnya kesegaran baru dalam dialog. Orang sekali lagi tampil ke muka untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka, baik dalam bidang politik, ekonomi dan pembangunan sosial maupun kebudayaan. Dalam bidang polemik kesusastraan orang mencoba sebisa-bisanya untuk tidak mengheret-heret soal ideoloji politik dalam menanggapi masalah-masalah kesusastraan. H.B. Jassin memberikan pertimbangan yang sangat tepat bila beberapa orang pengarang mengajukan keberatan mereka bila dalam buku *Angkatan 66 Prosa dan Puisi* Jassin masukan beberapa karangan pengarang-pengarang yang jelas mendukung Bung Karno Jassin ia berkata:

> "Saja tetap mengharagai nilai—pelarangan buku Pram *Keluarga Gerilja* bagi saja satu kekeliruan. Dari pihak saja sendiri, sekalipun terhadap jang pernah berchianat, terbuka pintu tobat dan pekarjaan adalah djalan jang paling tepat untuk membuktikan ketobatan itu."[9]

Tapi sayang sekali H.B. Jassin tidak menemui puisi-puisi dan karangan-karangan prosa yang baik dari sastrawan-sastrawan dan penyair-penyair Lekra untuk dimuatkan ke dalam bukunya. Mungkin juga karena adanya pelarangan terhadap karya-karya orang-orang Lekra oleh pemerintah, dan keengganan dari pihak penerbit, menyebabkan karya-karya yang baik dari Agam Wispi, S. Anantaguna, Hr. Bandaharo dan sebagainya tidak dimuat oleh H.B. Jassin. Sekali lagi dominasi politik terhadap karya-karya sastra dari orang-orang yang pro PKI menjadi pertimbangan kesusastraan.

Sesuai dengan cita-cita kebebasan berkarya dan falsafah Pancasila, maka sekali lagi muncul majalah-majalah kesusastraan seperti *Horison* dan *Sastra*.[10] Dalam keluargan sulung majalah *Horison* (no. 1, Juli 1966) yang dipimpin oleh wartawan-sastrawan Mochtar Lubis dinyatakan sikap *Horison*, yaitu:

> "Horison adalah sebuah madjalah bulanan sastra dalam pengertian jang seluas-luasnja. Tudjuan utamanja ialah merenggang pemikiran2 dan eksperimen-eksperimen baru dibidang kesusastraan

---

9. H.B. Jassin, *op. cit.*, h. xv
10. *Sastra* sekali lagi berhenti terbitannya sebab kesulitan keuwagan, dan nomor yang paling akhir ialah nomor sepuluh, tahun 1969.

chusunsja, kebudajaan umumnja. Itulah salah satu alasan mengapa dipilih nama HORISON bagi madjalah ini karena HORISON mengandung arti sesuatu jang njata-riel, tapi tak pernah akan kita tjapai udjungnya."

Majalah *Sastra* muncul kali keduanya pada bulan November 1967 (no. 1, th. IV). Majalah inilah yang banyak sekali dirongrong pihak PKI/ Lekra sejak tahun 1961 lagi. Ia juga merupakan sebagai wadah *Manifes Kebudayaan*. *Sastra* terbitan kali kedua inipun masih di bawah redaksi H.B. Jassin. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang tujuan majalah ini kami turunkan tulisan yang ditulis oleh H.B. Jassin di bawah ini.

> "Majalah Sastra gaya baru ini mengikuti kebijaksanaan tradisi Sastra yang lama, yaitu memberi kesempatan dan menampilkan bakat-bakat yang tersebar di seluruh tanahair, memberinya bimbingan, pengertian dan aspirasi sastra. Akan mendapat tempat pemuda-pemuda yang bergolak dalam masa Sturm und Drangnya dan mempunyai hak bersuara orang-orang tua yang inginkan kedamaian dan keimbangan batin. Majalah ini bukanlah majalah khusus bagi pemuda dan bukan pula majalah khusus bagi orang tua. Dia adalah majalah yang didukung oleh tua dan muda, masing-masing dengan alam dunianya. Kesempurnaan pengungkapan tidak menjadi syarat yang mutlak, meskipun syarat keindahan tidak dilepaskan. Yang penting ialah apa yang mau diutarakan dan dalam hal ini Sastra memberikan kebebasan seluas-luasnya."

Sebenarnya kedua buah majalah ini merupakan wadah bagi pencetus-pencetus *Manifes Kebudayaan* juga. Peranan H.B. Jassin sejak tahun 50an di dalam redaksi majalah-majalah yang terkemuka dan penting hingga kini yang dengan konsekwen meneruskan konsep ***humanisme universil*** kelihatan sekali dari posisi dan majalah sastra yang ia menjadi anggtoa redaksinya. Dalam *Horison* di samping Mochtar Lubis sebagai penanggungjawab terdapat anggota-anggota dewan redaksi seperti Mochtar Lubis sendiri, H.B. Jassin, Zaini, Taufiq Ismail, Soe Hok Djin alias Arief Budiman, D.S. Muljanto dan lain-lain lagi. Pada *Sastra* terdapat nama Darsjaf Rahman sebagai penanggungjawab dan H.B. Jassin sebagai pemimpin redaksi. Kesemua mereka itu melainkan Mochtar Lubis[11] dan Darsjaf Rahman menjadi penandatangan dan pencetus *Manifes Kebudayaan*.

11. Mochtar Lubis diwaktu lahirnya *Manifes Kebudayaan* berada dalam tahanan.

Di samping dua buah majalah di atas perlu juga dicatat di sini kemunculan sebuah majalah kebudayaan umum yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Djakarta. Dalam majalah *Budaja Djaja* (no. 1, th. I, Jun 1968) terdapat karya-karya sastra dan lain-lain artikel umum tentang politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Penanggungjawabnya ialah Ilen Surianegara dan Ajip Rosidi serta Harijadi S. Hartowardojo menjadi anggota redaksi dan dibantu oleh banyak para cendikiawan dan pengarang-pengarang lainnya. Majalah *Basis* yang tua usianya itu tetap diterbitka ndi Djokdjakarta.

Dalam bidang mass-media harian *Indonesia Raya* Mochtar Lubis diterbitkan sekali lagi, dan seperti biasa banyak kisah-kisah korupsi, penyelewengan serta kritik-kritik sosial yang pedas dimuat di dalamnya. Haji Rosihan Anwar, salah seorang editor yang kawakan, menerbitkan semula harian *Pedoman.* Para mahasiswa di Djakarta menerbitkan harian mereka sendiri dengan nama *Harian KAMI* di samping *Mingguan Mahasiswa* dan *Mahasiswa Indonesia* yang juga dikelolakan oleh mahasiswa-mahasiswa sendiri. Majalah-majalah ringan untuk memberi bacaan umum kepada pembaca-pembaca muncul satu demi satu seperti *Tjaraka*, *Moderna*, *Selecta*, *Majapada*, *Djaja*, *Keluarga* dan lain-lain.

Pada keseluruhannya memang terdapat kesegaran dan pengertian baru yang sehat dibidang kulturil dan kesusastraan. Namun demikian masih ada kecacatan dalam pelaksanaan pelarangan buku-buku yang dilarang oleh orang-orang Lekra dan lain-lain yang dianggap "berbahaya" pada rejim *Orde Baru.* Karangan-karangan Pramoedya, Utuy Tatang Sontani, Sitor Situmorang, S. Anantaguna, Agam Wispi dan sebagainya masih menjadi mangsa sensor *Orde Baru.* Memang kita akui bahwa ada karangan-karangan dari sastrawan-sastrawan PKI/Lekra yang memancarkan cita-cita dan perjuangan PKI seperti *Partai dalam Puisi*,[12] dan karangan D.N. Aidit seperti *Dengan Sastra dan Seni jang Berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit* harus dilarang. Tetapi karangan-karangan lain seperti *Keluarga Gerilja*, *Bukan Pasar Malam*, *Awal dan Mira* dan sebagainya tidak seharusnya dilarang oleh pemerintah karena karangan-karangan seperti itu tidak berbau politik komunis.[13] Kecenderungan negatif dibidang kesusastraan ini juga diper-

---

12. Diterbitkan oleh Yayasan "Pembaruan", 1962. Di dalamnya dimuat puisi-puisi D.N. Aidit, Sudisman, Sobron Aidit dan lain-lain.

13. Tentang buku-buku yang dilarang pemerintah hari ini sila baca Lukman Ali, "Buku-buku kesusastraan yang dilarang", *Bahasa dan Kesusastraan*, no. 1, th. I, 1967. Terbitan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, Djakarta. Juga baca *Sinar Harapan*, no. 1598, th. V. tgl. 16 Disember 1965.

lihatkan dalam pameran dokumentasi kesusastraan Indonesia modern yang diadakan oleh Dewan Kesenian Djakarta dengan kerjasama Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (kini dikenali sebagai Lembaga Bahasa Nasional) dan IKAPI yang diadakan di Djakarta dari 10 sampai 16 November 1968, di mana karya-karya sastrawan-sastrawan Lekra dan pro-Lekra tidak dipamirkan. Dari aspek ini rejim *Orde Baru* tidak memberi suatu pendekatan kulturil yang baik, malah sebaliknya melanjutkan lagi tradisi sebelum Gestapu.

Suatu kronik kulturil yang sangat menarik dalam kegiatan kesusastraan setelah Gestapu ialah tindakan Departemen Agama Republik Indonesia terhadap majalah *Sastra* yang memuatkan sebuah cerpen berjudul "*Langit Makin Mendung*" karangan Kipandjikusmin.[14] Pihak Departemen Agama menganggap cerpen tersebut "menghina" agama Islam, dan oleh karena itu pemimpin redaksi *Sastra*, H.B. Jassin telah dibawa kepengadilan untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Apakah benar "Langit Makin Mendung" menghina Islam? Pendapat-pendapat yang diutarakan dalam majalah-majalah dan harian-harian di-Djakarta berbagai macam. Kita tidak bisa membuat spekulasi terhadap keputusan pengadilan ini. Walau bagaimanapun persoalan *Sastra* dan H.B. Jassin, seorang tokoh yang terkemuka dalam bidang kritik sastra dan kesusastraan Indonesia modern dan yang dihormati ramai karena pendirian kulturilnya yang non-politis, akan menarik perhatian yang besar dikalangan budayawan, sastrawan dan cendekiawan Indonesia. Persoalan *Sastra* ini nanti akan merupakan suatu "test-case" dalam hukum Indonesia untuk memperlihatkan ukuran-ukuran apakah yang dipakai oleh pihak pendakwa terhadap H.B. Jassin dan *Sastra*. Peristiwa *Sastra*/H.B. Jassin merupakan suatu perkembangan baru dalam bidang kulturil Indonesia umumnya dan kesusastraan Indonesia khususnya.

Kekayaan kebudayaan Indonesia tidak bisa dinapikan. Dewasa ini kekayaan kebudayaan itu ditambah dan disuburi pula dengan eksperimen-eksperimen, baik dalam bidang kesusastraan, senilukis, drama dan lain-lain bentuk kesenian. W.S. Rendra, seorang dramawan, penyair dan sutradara, kini paling menonjol, namanya karena drama-drama eksperimennya seperti *Bib Bob*, dan puisi-puisi protes sosial seperti "Bersatulah Pelatjur-pelatjur Djakarta", "Njanjian Angsa" dan "Pesan Pentjopet pada Patjarnja". Dalam bidang penulisan novel pula Motinggo Boesje, Asbari Nurpatria Krisna, Klik Diono dan lain-lain pengarang muda banyak menggarap kisah-kisah yang berdegup ditengah-tengah

14. Lihat *Sastra*, no. 8, th. VI (Agustus 1968).

jantung kotaraya Djakarta. Mereka melihat kehancuran moral, cinta kasih, ketegangan-ketegangan mental dan kelesuan spirituil dalam anika macam peristiwa yang menghidupkan Djakarta.

Anti-imperialisme alias anti-barat alias anti-Amerika di bidang kebudayaan tidak lagi kedengaran, atau kalaupun ada, terlalu sayup-sayup kedengaran untuk menarik perhatian orang. Penyanyi-penyanyi muda baik pria maupun wanitanya sering mengalunkan lagu-lagu barat, dan radio amatir berkompetisi memperdengarkan lagu-lagu barat yang paling terbaru. Mode-mode pakaian yang paling baru kelihatan di tengah-tengah kota besar, khususnya di Djakarta dan Bandung, dan orang sudah mula mengadakan berbagai perlombaan untuk memilih ratu-ratu yang cakap, wajah yang aju dalam anika macam acara-acara kecantikan wanita. Korupsi bermaharajalela, penyelundupan menjadi-jadi, para seniman kreatif tetap mencipta dan terus mencari nilai-nilai baru dalam hasil kreasi mereka. Dalam tekanan ekonomi yang tidak pernah selesai, para sarjana dan cendekiawan tetap mengembara serupa Ahasveros mencari nilai-nilai baru dalam kehidupan dan pengetahuan. Atau setengahnya mungkin terbentur atau beku dalam pencarian nilai-nilai baru yang tidak pernah ketemu. Namun apapun risiko yang dihadapi mereka kini, tidak ada lagi Dekrit Presiden yang melarang mereka untuk mencari arti "hati nurani manusia" itu.

bab X : 1. beberapa puisi pada masa demonstrasi
2. pendapat Teeuw + Jassin ttg puisi perjuang (juga Subagyo)
3. yg. ditentang angk 66
4. muncul simposion dg kesimpulan (112) yg. senada dg manikebu
5. peranan majalah Sastra + Horison
6. buku² yg. seharusnya tak ditentang.

LAMPIRAN

LEMBAGA KEBUDAJAAN RAKJAT
MUKADDIMAH

Menjedari, bahwa rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra. Pendirian ini terdjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudajaan jang sebagai hasil keseluruhan daja-upaja manusia setjara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginja kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa madju dengan tiada putus-putusnja.

Revolusi Agustus 1945 membuktikan, bahwa pahlawan di dalam peristiwa bersedjarah ini, seperti halnja di dalam seluruh sedjarah bangsa kita, tiada lain adalah rakjat. Rakjat Indonesia dewasa ini adalah semua golongan di dalam masjarakat jang menentang pendjadjahan. Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri rakjat Indonesia dari pendjadjahan dan peperangan, pendjadjahan serta penindasan feodal. Hanja djika panggilan sedjarah Revolusi Agustus terlaksana, djika tertjipta kemerdekaan dan perdamaian serta demokrasi, kebudajaan rakjat bisa berkembang bebas. Kejakinan tentang kebenaran ini menjebabkan Lekra bekerdja membantu pergulatan untuk kemerdekaan tanahair dan untuk perdamaian diantara bangsa-bangsa, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berdjuta-djuta rakjat.

Lekra bekerdja chusus dilapangan kebudajaan, dan untuk masa ini terutama dilapangan kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sardjana-sardjana pekerdja-pekerdja kebudayaan lainnja. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masjarakat. Lekra mengadjak pekerdja-pekerdja

kebudajaan untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta, bakat serta keahlian mereka guna kemadjuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pembaruan Indonesia.

Zaman kita dilahirkan oleh sedjarah jang besar, dan sedjarah bangsa kita telah melahirkan putera-putera jang baik, dilapangan kesusastraan, senibentuk, musik, maupun dilapangan-lapangan kesenian lain dan ilmu. Kita wadjib bangga bahwa kita terdiri dari suku-suku jang masing-masingnja mempunjai kebudajaan jang bernilai. Keragaman bangsa kita ini menjediakan kemungkinan jang tiada terbatas untuk pentjiptaan jang sekaja-kajanja serta seindah-indahnja.

Lekra tidak hanja menjambut setiap sesuatu jang baru; Lekra memberikan bantuan jang aktif untuk memenangkan setiap jang baru madju. Lekra membantu aktif perombakan sisa-sisa "kebudajaan" pendjadjahan jang mewariskan kebodohan, rasarendah serta watak lemah pada bangsa kita. Lekra menerima dengan kritis peninggalan-peninggalan nenek mojang kita, mempeladjari dengan saksama segala-gala segi peninggalan-peninggalan itu, seperti halnja mempeladjari dengan saksama pula hasil-hasil tjiptaan kelasik maupun baru dari bangsa lain jang manapun, dan dengan ini berusaha meneruskan setjara kreatif tradisi jang agung dari sedjarah dan bangsa kita, menudju kepentjiptaan kebudajaan jang nasional dan ilmiah. Lekra mengandjurkan kepada anggota-anggotanja, tetapi djuga kepada seniman-seniman sardjana-sardjana dan pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja di luar Lekra, untuk setjara dalam mempeladjari kenjataan, mempeladjari kebenaran jang hakiki dari kehidupan, dan untuk bersikap setia kepada kenjataan dan kebenaran.

Lekra mengandjurkan untuk mempeladjari dan memahami pertentangan-pertentangan jang berlaku di dalam masjarakat maupun di dalam hati manusia, mempeladjari dan memahami gerak perkembangannja serta hari depannja. Lekra mengandjurkan pemahaman jang tepat atas kenjataan-kenjataan di dalam perkembangannja jang madju, dan mengandjurkan hal itu, baik untuk tjara-kerdja dilapangan ilmu, maupun untuk pentjiptaan dilapangan kesenian. Dilapangan kesenian Lekra mendorong inisatif, mendorong keberanian kreatif, dan Lekra menjetudjui setiap bentuk, gaja, dsb., selama ia setia kepada kebenaran dan selama ia mengusahakan keindahan artistik jang setinggi-tingginja.

Singkatnja, dengan menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti-sosial dari kebudajaan bukan-rakjat, dengan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan-Lekra bekerdja untuk membantu pembentukan manusia baru jang memiliki segala kemampuan

untuk memadjukan dirinja dalam perkembangan kepribadian jang bersegi banjak dan harmonis.

Di dalam kegiatan Lekra menggunakan tjara saling-bantu, saling-kritik dan diskusi-diskusi persaudaraan di dalam masalah-masalah pentjiptaan. Lekra berpendapat, bahwa setjara tegas berpihak pada rakjat dan mengabdi kepada rakjat, adalah satu-satunja djalan bagi seniman-seniman, sardjana-sardjana maupun pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja untuk mentjapai hasil jang tahanudji dan tahanwaktu. Lekra mengulurkan tangan kepada organisasi-organisasi kebudajaan jang lain dari aliran atau kejakinan apapun, untuk bekerdjasama dalam pengabdian ini.

MANIFES KEBUDAJAAN

Kami para seniman dan tjendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudajaan, jang menjatakan pendirian, tjita-tjita dan Politik Kebudajaan Nasional kami.

Bagi kami kebudajaan adalah perdjuangan untuk menjempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudajaan jang lain. Setiap sektor berdjuang bersama-sama untuk kebudajaan itu sesuai dengan kodratnja. Dalam melaksanakan kebudajaan Nasional kami berusaha mentjipta dengan kesungguhan jang sedjudjur-djudjurnja sebagai perdjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa.

PANTJASILA adalah falsafah kebudajaan kami.

Djakarta, 17 Agustus 1963
Drs. H.B. Jassin
Trisno Sumardjo
Wiratmo Sukito
Zaini
Bokor Hutasuhut
Goenawan Mohamad
A. Bastari Asnin
Bur Rasuanto
Soe Hok Djin
D. S. Muljanto
Ras Siregar
Hartojo Andangdjaja
Sjahwil
Djufri Tanissan
Binsar Sitompul
Drs. Taufiq A.G. Ismail
M. Saribi Afn
Poernawan Tjondronagoro
Dra. Boen S. Oemarjati

PENDJELASAN MANIFES KEBUDAJAAN

I. *Pantjasila sebagai Falsafah Kebudajaan*

Dengan pengertian kami jang bersumber dalam hikmah Pantjasila kebudajaan bukanlah kondisi subjektif, apalagi hasil sebagai barang mati.

Dalam pengertian kami kebudajaan adalah perdjuangan manusia sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidupnja. Kebudajaan Nasional bukanlah semata-mata ditandai oleh "watak nasional" melainkan merupakan perdjuangan Nasional dari suatu bangsa sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidup nasionalnja. Predikat kebudajaan adalah perdjuangan membawa konsekwensi-konsekwensi jang mutlak dari sektor-sektornja.

Sepenuhnja pengertian kami tentang kebudajaan seirama dengan Pantjasila karena Pantjasila adalah sumbernja, sebagai mana BUNG KARNO mengatakan:

> Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantjasila jang saja usulkan itu mendjadi suatu realitet, jakni djika kami ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nasionalitet jang merdeka, jang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera dan aman dengan ketuhanan jang luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjeleggarakannja, ialah perdjuangan, perdjuangan dan sekali lagi perdjuangan."
> (lih. Bagian III: Literatur Pantjasila).

Maka pengertian Kebudajaan Nasional adalah perdjuangan untuk memperkembangkan dan mempertahankan martabat kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masjarakat bangsa-bangsa. Djika kepribadian Nasional jang merupakan implikasi dari Kebudajaan Nasional kita

adalah apa jang oleh Presiden Soekarno dirumuskan sebagai "Freedom to be free", maka Kebudajaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jang membebaskan diri dari penguasaan (tjampur tangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masjarakat bangsa-bangsa melainkan djustru untuk menjatakan diri dengan masjarakat bangsa-bangsa itu setjara bebas dan dinamik sebagai persjaratan-persjaratan jang tidak dapat ditawar bagi perkembangan jang pesat dari Kepribadian dan Kebudajaan Nasional kita jang pandangan-dunianja bersumber pada Pantjasila.

Kami ingin membuktikan bahwa falsafah demokrasi Pantjasila menolak sembojan "The end justifies the means" (Tudjuan menghalalkan tjara), sehingga sebagai falsafah demokrasi Pantjasila adalah humanisme kulturil jang pengejawantahannja harus kami perdjuangkan dalam setiap sektor kehidupan manusia. Sembojan a-kulturil "The end justifies the means" tersebut jang tidak mengakui perbedaan antara tudjuan dengan tjara, mengakibatkan orang menudju tudjuan dengan menjisihkan pentingnja tjara mentjapai tudjuan itu,

Demikianlah umpamanja dibidang pentjiptaan kerja-kerja kesenian di mana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek keseniannja, adalah tjontoh pelaksanaan dari sembojan "The end justifies the means" sebagai satu sembojan jang bertentangan dengan Pantjasila. "The end justifies the means"—apabila orang mengemukakan apa jang bukan kesusastraan sebagai kesusastraan, apa jang bukan kesenian sebagai kesenian, apa jang bukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.

Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan kerdja mengalahkan kementahan dengan tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jang damai. Kesenian sebagai pentjiptaan kerdja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuannja adalah kemanusiaan, tetapi juga tjaranja adalah kemanusiaan, dan itulah implikasi jang paling hakiki dari Pantjasila sebagai falsafah demokrasi jang kami perdjuangkan setjara prinsipiil.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jang paling mengantjam datangnja dari wilajahnja sendiri, tetapi jang terang ialah bahwa sumber pokok dari bahiaa tersebut terletak dalam ketjenderungan-ketjenderungan fetisj * sebagai ketjenderungan non-kreatif. Adapun ketjenderungan tersebut manifestasinia tidak hanja dalam pendewaan, melainkan terdapat djuga dalam persetanan sebagai umpamanja kami kenal dalam wilajah kesenian. Sebagaimana fetisj-fetisj itu bermatjam-matjam, demikian pulalah kesenian fetisj. Sebagaimana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung di-

* inanimate object worshipped by savages for its magical powers or as being inhabited by a spirit

samping fetisjisme dari djiwa-pendendam, demikianlah terdapat kesenian jang mengabdi kepada djiwa-pelindung dengan memberikan sandjungan-sandjungan setjara berlebih-lebihan pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesenian fetisj itu mempunjai prestasi "kesenian revolusioner", tetapi dalam hal jang demikian maka kesenian fetisj itu kita namakan kesenian dengan pengabdian palsu.

Kesenian kreatif, berlawanan dengan kesenian dalam dirinja sendiri, sehingga dengan ini kami menolak fatalisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesenian kreatif jang kami perdjuangkan dengan menjokong Revolusi tidaklah bersumber dalam fetisjisme dari djiwa-pelindung, sebaliknja mengeritik penjelewengan-penjelewengan dari Revolusi tidaklah pula bersumber dalam fetisjisme dari djiwa-pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunjai pengabdian palsu, sebaliknja kamipun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunjai pengabdian palsu. Tetapi kami adalah revolusioner.

Kami tidak lebih dari manusia lainnja, direntjanakan dan merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunjai pretensi apa-apa. Kamipun tidak akan merasa takut kepada kegagalan-kegagalan kami sendiri, karena kegagalan-kegagalan itu bukanlah achir perdjuangan hidup kami.

II. *Pekepribadian dan Kebudajaan Nasional*

Dalam dunia kesenian Indonesia dikenal istilah "humanisme universil". Tafsiran kami mengenai istilah itu adalah sebagai berikut:

Apabila dengan "humanisme universil" dimaksudkan pengaburan kontradiksi antagonis, kontradikasi antara kawan dengan lawan, maka kami akan menolak "humanisme universil" itu. Misalnja, sebagaimana jang dilakukan oleh Nica dulu, di mana diulurkan kerdjasama kebudajaan disatu pihak, tetapi dilakukan aksi militer dilain pihak.

Sebaliknja kami menerima "humanisme universil" apabila di-maksudkan bahwa kebudajaan dan kesenian itu bukanlah semata-mata nasional, tetapi djuga menghajati nilai-nilai universil, bukan semata-mata temporal, tetapi djuga menghajati nilai-nilai eternal.

Apabila dengan kebudajaan universil itu dimaksudkan bukan kondisi objektif, melainkan perdjuangan manusia sebagai totalitas dalam usahanja mengachiri pertentangan antara manusia dan kemanusiaan, maka kami menjetudjui adjakan untuk meneruskan kebudajaan universil itu, karena dengan demikian kebudajaan universil itu merupakan "kekuatan jang menggerakkan sedjarah", dan itu sepenuhnja sama dengan pikiran

kami bahwa kebudajaan universil itu adalah perdjuangan dari budi-nurani universil dalam memerdekakan setiap manusia dari rantai-rantai belenggunja, perdjuangan jang memperdjuangkan tuntutan-tuntutan rakjat Indonesia, karena rakjat di mana-mana di bawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah bangsanja sendiri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnja, untuk mempertinggi kebahagian masjarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang lazimnja dinamakan demokrasi. (Lihat Bagian III: Literatur Pantjasila).

Djadi "humanisme universil" djanganlah menjebabkan orang bersikap "indifferen" (atjuh tak atjuh) terhadap semua aliran (politik) sehingga dengan "humanisme universil" orang harus toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas antara musuh-musuh dan sekutu-sekutu Revolusi, musuh-musuh dan sekutu-sekutu Kebudajaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunjai sikap sektaris dan tjauvinis, karena sikap jang demikian itu adalah djustru mengaburkan garis pemisah tersebut.

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah anak manusia. Musuh kami adalah unsur-unsur jang membelenggu manusia, dan karenanja kami ingin membebaskan manusia itu dari rantai-rantai belenggunja. Dalam perlawanan kami terhadap musuh-musuh kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjahat-djahat manusia namun ia masih tetap memantjarkan tjahaja Ilahi, sehingga konsekwensinja kami harus menjelamatkan sinar-tjahaja Ilahi tersebut.

Maka kepertjajaan jang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah machluk jang baik, dan karena itulah maka kami bertjita-tjita membangunkan suatu masjarakat jang kuat tjenderung kearah masjarakat manusia jang baik itu, sesuai dengan garis-garis sosialisme Indonesia.

Dengan begitu teranglah sudah posisi kami terhadap masalah "humanisme universil". Kami menampilkan aspirasi-aspirasi nasional, jaitu pengarahan-pengarahan kepada pembedaan dari tengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa, bagi merealisasi kehormatan, martabat (dignitas), prestasi dan pengaruh, tetapi kami ingin mendjaga agar supaja pengarahan-pengarahan tersebut tidak menudju kearah kesombongan nasional dan tjauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Adapun implikasi dari aspirasi-aspirasi nasional ini ia-lah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan ke-

pribadiannja, artinja bangsa Indonesia dapat terus-menerus menjesuaikan diri dengan perkembangan sekitarnja, tetapi tjaranja adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunjai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa harus mempunyai kesenian sebagai sektor kehidupan kebudajaan, jaitu kesenian jang sepenuhnja merupakan pantjaran kebebasan.

III. *Politisi dan Estetisi*

Dalam dunia kesenian Indonesia djuga dikenal istilah "realisme-sosialis". Menurut sedjarahnja, penafsiran tentang realisme-sosialis itu ada dua matjam:

Jang pertama: Realisme-sosialis langsung merupakan kelandjutan dari konsepsi kulturil Josef Stalin. Dalam tahun-tahun 30an dengan perkembangannja fetisjisme modern dengan Stalin sebagai suatu fetisj, barang pudjaan seakan-akan mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudajaan Rusia terantjam dengan amat mengerikan. Dengan Stalin maka metode kritik seni adalah deduktif, artinja konsepsinja telah ditetapkan lebih dulu untuk "menertibkan" kehidupan kesenian dan kebudajaan. Tjiri pokok pada kesenian jang telah "ditertibkan" itu ialah adanja konsepsi jang sama dan sektaristis mengenai seni. Itulah sebabnja maka djiwa objektif jang berpangkal pada budi-nurani universil tidak selaras dengan realisme-sosialis, sehingga kami menolak realisme-sosialis dalam pengertian itu, di mana dasarnja ialah faham politik di atas estetik.

Jang kedua: Realisme-sosialis menurut kesimpulan kami dari djalan pikiran Maxim Gorki, jang dipandang sebagai otak dari realisme-sosialis itu, yakni bahwa sedjarah jang sesungguhnja dari rakjat pekerdja tak bisa dipeladjari tanpa suatu pengetahuan tentang dongengan kerakjatan jang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan karja sastra jang bermutu tinggi seperti Faust, Petualang Baron von Munchausen, Gargantua dan Pantagruel, Thyl Eulenspiegelnja Coster dan Prometheus disiksa karja Shelly, karena dongengan kerakjatan kuno purbakala itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk-lapukjna dan dengan tjara jang chas.

Di situ sebenarnja Gorki menggariskan politik sastra jang berbeda dengan realisme-sosialis a la Stalin, karena pada hakikatnja Gorki telah menempuh politik sastra universil. Sesungguhnja politik sastranja itu bersumber dalam kebudajaan tidak sebagai suatu sektor politik, melainkan sebagai induknja kehidupan politik jang searah dengan garis Manifes ini.

Berdasarkan fenomena-fenomena sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan bahwa kebudajaan dari suatu periode adalah senantiasa

kebudajaan dari kelas jang berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjarkan bahwa djustru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa maka orang berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik, sebagai kekuatan baru jang terbentuk di tengah-tengah penindasan kekuatan lama, merupakan faktor positif jang menentukan perkembangan kebudajaan dan kesenian. Sebagaimana jang terdjadi di Perantjis sedjarah mengadjarkan bahwa kekuatan jang dibentuk oleh bordjuis revolusioner adalah kekuatan jang menentukan dalam melawan penindasan monarki mutlak. Tetapi sajang, bahwa elan kreatifitas jang menjala-njala bersama-sama kekuatan baru itu mendjadi padam setelah kekuatan bordjuis revolusioner itu mendjadi sempurna. Bahkan kekuatan politik jang sempurna itu merintangi kebudajaan dan kesenian. Penindasan baru jang dilakukan oleh kelas baru itu dibidang kesenian dan kesusastraan chususnja telah menjebabkan timbulnja suatu kekuatan baru dengan lahirnja Angkatan 1830 jang mula-mula dipelopori Victor Hugo dan kemudian dilandjutkan oleh Theopile Gautier.

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik di atas estetik jang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estetik adalah sekunder dilihat dari sudut kebudajaan dan kesenian adalah suatu utopia. Sebab faham itu djikalau dilaksanakan dengan djudjur hanja akan memupuk dan menghasilkan perasaan-perasaan keketjewaan, dan djikalau dilaksanakan dengan tidak djudjur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politisi jang imbisius.

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena menjedari bahwa dunia ini bukan sorga. Karena berpikir setjara dialektik maka kami mengakui kenjataan-kenjataan bahwa lingkungan sosial kami senantiasa mengandung masalah-masalah, dan setiap tantangan jang kami djawab akan menimbulkan tentangan-tentangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berpikir tentang suatu djaman, di mana tak ada masalah lagi, karena setiap pikiran jang demikian itu adalah terlalu "idealis" dan karenanja tidak ilmiah. Pekerdjaan seorang seniman senantiasa harus dilakukan di tengah-tengah dunia jang penuh dengan masalah-masalah, analog dengan pekerdjaan seorang dokter jang harus dilakukan di tengah-tengah dunia jang penuh dengan penjakit-penjakit. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanja seniman. Oleh karena itu faham jang merumsukan bahwa politik adalah primer dan estetik adalah sekunder tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah mendjadi sempurna maka tidak perlu lagi kesusastraan dan kesenian, tidak perlu lagi estetik. Seandainja pada suatu ketika kekuatan politik jang dibentuk itu telah mendjadi sempurna, maka

masalah apakah jang akan dibahas oleh kesenian revolusioner jang sebagai estetik murni baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah jang dibahas oleh kaum estet, jaitu mereka jang mempunjai paham estetik di atas politik, sehingga bersifat borjuis.

Tidaklah berlebih-lebihan kiranja apabila kami mengambil kesimpulan bahwa paham politik di atas estetik itu memberikan tempat pada estetik sebelum pembentukan kekuatan politik mendjadi sempurna, sehingga selama djangka waktu pembentukan kekuatan politik itu tidak ada persoalan tentang estetik, sedangkan paham estetik di atas politik hanja dapat dilaksanakan apabila mendapat sandaran kekuatan politik jang sempurna pula.

Maka kami dapat menarik kesimpulan selandjutnja, bahwa kedua paham kesenian tersebut mengandung kontradiksi-konstradiksi. Berbeda dengan itu adalah paham kami, jaitu jang tidak mengorbankan politik bagi estetik, tetapi sebaliknja, tidak pula mengorbankan estetik bagi politik, kerana pengorbanan tersebut tidak menundjukkan adanja dinamika, dan di dalam hal tidak adanja dinamika maka fungsi estetik murni adalah suatu imperialisme estetik. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusioner dari negara kapitalis kearah negara sosialis tidak akan mengubah pula setiara revolusioner kondisi-kondisi kulturilnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perobahan kondisi-kondisi kulturil itu setjara revolusioner menudju kearah masjarakat sosialis Pantjasila.

Menurut kejakinan kami maka masjarakat sosialis Pantjasila jang kami perdjuangkan setjara kulturil revolusioner itu adalah keharusan sedjarah jang tidak dapat dihindarkan oleh sesiapapun, terutama oleh kami sendiri.

Demikianlah Pendjelasan Manifes ini dirumuskan.

Djakarta, 17 Agustus 1963.

LITERATUR PANTJASILA

terdiri dari	:	
Bung Karno	:	"Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme"
Bung Karno	:	"Pidato Lahirnja Pantjasila"
Dr. H. Roeslan Abdulgani	:	"Manipol-Usdek, Pidato Radio"
Wiratmo Sukito	:	"Peranan Institusi2 dalam Memperkembangkan Sosialisme Kreatif"
Harian Semesta	:	"Rivalitas Kelas Persoalan Sosial"

SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT LEKRA

Sidang Pleno ke I Lekra tanggal 28 Januari 1959 telah memilih Sekretariat Pimpinan Pusat Lekra seperti di bawah:

1.	Joebaar Ajoeb	—	Sekretaris Umum
2.	Henk Ngantung	—	Wakil Sek. Umum I
3.	Sudharnoto	—	Wakil Sek. Umum II
4.	Njoto	—	Anggota Sekretariat
5.	Basuki Resobowo	—	sama
6.	Rivai Apin	—	sama
7.	M.S. Ashar	—	sama
8.	Samandjaja	—	sama
9.	Basuki Effendi	—	sama
10.	Bakri Siregar	—	sama
11.	S. Anantaguna	—	sama

PIMPINAN PUSAT LEKRA

Kongres Nasional ke I Lekra dalam Sidang Plenonja tanggal 28 Januari 1959 telah memilih susunan anggota seperti di bawah ini:

1. Affandi
2. Agam Wispi
3. Bachtiar Siagian
4. Bakri Siregar
5. Basuki Effendi
6. Basuki Resobowo
7. Boejoeng Saleh
8. Chrismanuputty
9. Dhalia
10. Hadi S
11. Haznam Rachman
12. Hendra Gunawan
13. Henk Ngantung
14. Hr. Bandaharo
15. Joebaar Ajoeb
16. Kotot Sukardi
17. Kurnia
18. K. Iramanto
19. Martean Sagara
20. M.D. Hadi
21. M.S. Ashar
22. Njoto
23. Nurbakti
24. Pramoedya Ananta Toer
25. Rivai Apin
26. Rumambi
27. Samandjaja
28. Sudharnoto
29. Sudjadi
30. Sugiarti Siswadi
31. Suhardjo
32. Sunardi
33. Sunito
34. S. Anantaguna
35. S. Rukiah Kertapati
36. Suromo
37. Tan Sing Huat
38. Tjak Bowo
39. Utomo Ramelan
40. Utuy Tatang Sontani
41. Z. Trisno

KEPUSTAKAAN

Abidin, A.Z. dan Baharuddin Lopa. *Bahaja Komunisme*. Djakarta: Bulan Bintang, 1968.

Aidit, D.N. *Revolusi Indonesia, Latar Belakang Sedjarah dan Hari depannja*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1964.

————. *Dengan Sastra dan Seni Jang Berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1964.

————. cs. *Partai Dalam Puisi*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1962.

Aidit, Sobron. *Derap Revolusi*. Djakarta: Lekra, 1963.

Amin, S.M. *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Djakarta: Bulan Bintang, 1967.

Anantaguna, Ṣ. *Jang Bertanahair tapi Tidak Bertanah*. Djakarta: Lekra, 1962.

Balai Pustaka. *Kebudajaan dan Pendidikan Nasional. Pola Pembangunan Nasional Berentjana*. Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Bandaharo, Hr. *Dari Bumi Merah*. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1963.

Birch, Cyril. *Chinese Communist Literature*. New York: Frederick A. Praeger, 1963.

Brackman, Arnold G. *Indonesian Communism. A. History*. 2nd print. New York: Frederick A. Praeger, 1963.

————. *South East Asia's Second Front. The Power Struggle in the Malay Archipelago*. 2nd print. New York: Frederick A. Praeger, 1966.

Brooks, Cleanth. *Modern Poetry and the Traditions.* New York: Oxford University Press, 1965.

Cassirer, Ernst. *An Essay on Man.* 12th print. New Haven: Yale University Press. 1964.

Castro, Fidel. *Revolusi dan Masalah Kebudajaan.* (Terjemahan Saini K.M. dan Toto S. Bachtiar). Bandung: Penerbit Pertiwi, 1963.

Clews, John C. *Communist Propaganda Techniques.* 'London: Methuen, 1964.

Collingwood, R.G. *The Principles of Art.* London: Oxford University Press, 1963.

Crossman, Richard. *The God that Failed.* 2nd print, New York: Bantam Books, 1954.

Decter, Moshe. *The Profile of Communism. A Fact by Fact Primer.* 2nd print. New York: Collier Books, 1966.

Departemen Penerangan R.I. *Almanak Lembaga2 Negara dan Kepartaian.* Djakarta: Departemen Penerangan, 1961.

Diah, B.M. (penulis katapengantar). *Polemik H.R. dan Merdeka.* Djakarta: Merdeka Press, 1965.

Djilas, Milovan. *The New Class. An Analysis of the Communist System.* 6th printing. New York: Frederick A. Praeger, 1962.

Faith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* New York: Cornell University Press, 1962.

Freemantle, Anne. *Mao tze-tung. An Anthology of his writings.* 2nd print. New York: A Mentor Book, 1963.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java.* London: The Free Press of Glencoe, 1964.

Hadimadja, Aoh. K. (Karlan Hadi). *Beberapa Paham Angkatan '45* Djakarta: Tintamas, 1952.

Hamzah, Junus Amir dan H.B. Jassin. *Tenggelamnja Kapal Van Der Wijck dalam Polemik.* Djakarta: Mega Book Store, 1963.

Haward, Max dan Leopold Labenz. (ed). *Literature and Revolution in Soviet Literature (1917–1962)* London: Oxford University Press, 1963.

Heiney, Donald W. *Contemporary Literature.* New York: Barron's Educational Series, Inc., 1954.

Hindley Donald. *The Communist Party of Indonesia 1951–1963.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1964.

Hough, Graham. *An Essay on Criticism.* London: Gerald Duckwood & Co., 1966.

Huges, John. *Indonesian Upheavals.* New York: David McKay Co., Inc., 1967.

Jajasan Prapantja. *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi.* Cetakan ke 2. Djakarta, 1964.

Jassin, H.B. *Gema Tanah Air. Prosa dan Puisi 1942–1948.* Cetakan ke 4. Djakarta: Balai Pustaka, 1959.

————. *Angkatan '45.* Djakarta: Jajasan Dharma, 1951.

————. *Chairil Anwar Pelopor Angkatan '45.* Cetakan ke 3. Djakarta: Gunung Agung, 1968.

————. *Kesusastraan Indonesia Moden dalam Kritik dan Esei* (I). Cetakan ke 4. Djakarta: Gunung Agung, 1967.

————. *Kesusastraan Indonesia Moden dalam Kritik dan Esei* (*II*). Cetakan ke 2. Djakarta: Gunung Agung, 1967.

————. *Kesusastraan Indonesia Moden dalam Kritik dan Esei* (*III*). Djakarta: Gunung Agung, 1967.

————. *Kesusastraan Indonesia Moden dalam Kritik dan Esei* (*IV*). Djakarta: Gunung Agung, 1967.

————. *Angkatan 66 Prosa dan Puisi.* Djakarta: Gunung Agung, 1968.

Kerstiens, Thom. *The New Elite in Asia and Africa.* 2nd print. New York: Frederick A. Praeger, 1966.

Laporan Kebudajaan Rakjat. Dokumen (*I*). Djakarta, Lekra, 1959.

Laporan Kebudajaan Rakjat. Dokumen (*II*). Djakarta, Lekra, (1962)

Lekra. *Menjambut Kongres Kebudajaan di Bandung.* (6 s/d 9 Oktober 1951), Djakarta, 1951.

Lekra. *Dinasti 650 Djuta.* Djakarta, 1961.

Lenin, V.I. *What Is To Be Done.* Translated by S.V. and Patricia Utechin. Edited with an introduction by S.V. Utechin. London: Oxford University Press, 1963.

Madjelis Luhur Taman Siswa. *Kepribadian Nasional*, Djogdjakarta, 1961.

Maryanov, Gerald S. *Politics in Indonesia: An Interpretation.* (Papers on South East Asian Subjects, no. 7). Kuala Lumpur: University of Malaya, 1966.

McClosky, Hebert and John E. Turner. *The Soviet Dictatorship* New York: McGraw-Hill, 1960.

McKie, Ronald and Beryl Bernay. *Bali.* Sydney: Angus & Robertson Ltd., 1969.

Mehnert, Klaus. *Peking and Moscow.* New York: A Mentor Book, 1964.

Meyer, Alfred G. *Leninism.* 3rd print. New York: Frederick A. Praeger, 1965.

Nasution, J.U. *Sitor Situmorang sebagai Penjair dan Pengarang Tjerita pendek.* Djakarta: Gunung Agung, 1963.

Njoto (Penulis Katapengantar). *Polemik Merdeka Harian Rakjat.* Djakarta: Harian Rakjat, (1964).

Notosusanto, Nugroho. *Bidang Sosial-Budaja dalam rangka Ketahanan Nasional.* Djakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan, Lembaga Sejarah Hankam, 1968.

Penerbitan Kedjaksaan Agung Bidang Chusus. *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam.* Djakarta: Kedjaksaan Agung, 1967.

Prijono. *Glimpses of Indonesian Education and Culture.* Djakarta: Balai Pustaka, 1964.

Rachim, A. (Penyusun). *Capita Selecta Revolusi Indonesia (I). Bahan-bahan Indoktrinasi.* Djember: Penerbit "Sumber Ilmu", 1961.

Rangkuti, B. *Pramoedya Ananta Toer.* Djakarta: Gunung Agung, 1963.

Schram, Stuart R. *The Political Thought of Mao-Tse-Tung.* 2nd print. New York: Frederick A. Praeger. (tanpa tahun).

Siregar, Bakri. *Sedjarah Sastra Indonesia Modern. Jilid (I).* Djakarta: Akademi Sastra dan Bahasa "Multatuli", 1964.

Situmorang, Sitor. *Sastra Revolusioner.* Lembaga ·Kebudayaan Nasional, Jawa Barat, 1965.

————. *Zaman Baru.* Djakarta: Penerbit Zaman Baru, 1961.

Soekarno. *Di bawah Bendera Revolusi. Jilid (I).* Djakarta: Panitya Di bawah Bendera Revolusi, 1963.

Sontani, Utuy Tatang. *Si Kampeng.* Djakarta: Yayasan Kebudayaan Sadar, 1964.

————. *Si Sapar.* Djakarta: Yayasan Kebudayaan Sadar, (1964).

————. *Selamat Djalan Anak Kufur.* Bukittinggi & Djakarta: N.V. Nusantara, 1963.

Sunardi. *Lecture on the September 30 Movement, The Indonesian Communist Party and the Elimination of the Communists in Indonesia.* (stensilan). Djakarta: Departemen Penerangan R.I., tanggal 26 April 1959.

Teeuw, A. *Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru.* Djakarta: Pembangunan, 1952.

————. *Modern Indonesian Literature.* Translation Series 10. Koninklijk Instiuut Voor Taal-, Land- en Volkenkunde. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967.

Tesis 45 Tahun PKI. Djakarta: Yayasan "Pembaruan", 1965.

Tjernisevski, N.G. *Hubungan Estetik Seni dengan Realitet.* (Terjemahan Samandjaja). Djakarta: Lekra, 1961.

Universitas Indonesia, KAMI DAN KASI. *Kebangkitan Semangat 66: Mendjeladjah Tracee Baru.* (Simposium yang diadakan di Djakarta dari 6 s/d 9 Mei 1966). Djakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1966.

Vikery, Waltek N. *The Cult of Optimism.* Introduced and edited by Stephen G. Nicholas, Jr. New Haven & London: Yale University Press, 1964.

Wellek, Rene and Austin Warren, *Theory of Literature.* 3rd edition. A Peregrine Book, 1963.

Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition.* 2nd edition. (revised). The Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1959.

Wimsatt, William K., Jr and Cleanth Brooks. *Literary Criticism A Short History.* Culcutta: Oxford and IBH Publishing Co, 1967.

Wispi, Agam, cs. *Matinja Seorang Petani.* Djakarta: Lekra, 1961.

ARTIKEL-ARTIKEL

Abdulgani, H. Roeslan. "Pendjelasan Manipol-Usdek," *Capita Selecta Revolusi Indonesia (I), Bahan-bahan Indoktrinasi.* A Rachim (penyusun), h. 135–169.

Aidit, D.N. "Kobarkan Ofensif Revolusioner dibidang Kebudajaan", *Zaman Baru*, no. 5 (Mei 1965), h. 1–3.

————. "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bina kebudajaan yang berkepribadian Nasional," *Zaman Baru* (Dec. 1964), h. 1–3.

————. "Manikebu bertugas lutjuti sendjata rakjat", *Lentera*, no. 11, th, III, (31 Mei 1964).

Ajoeb, Joebaar. "Idrus dan Surabaja", *Indonesia*, no. 8/9, th. IV. (Agustus-September 1953).

Akustia, Klara. "Kepada Seniman Universil", dalam *Beberapa Paham Angkatan 45.* Aoh. K. Hadimadja (Karlan Hadi, penyusun), h. 82–91.

Ali, Lukman. "Penelitian Kesusastraan." (kata pengantar), *Bahasa dan Kesusastraan Indonesai sebagai tjermin Manusia Indonesia Baru.* (Simposium Bahasa dan Kesusastraan 25 s/d 28 Oktober 1966 diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dengan kerjasama Lembaga Sastra Universitas Indonesia, IKIP. Djakarta dan K.A.S. I. Jaya). Djakarta: Gunung Agung, 1967, h. 108–110.

Ali, Lukman. "Buku-buku kesusastraan jang dilarang", *Bahasa dan Kesusastraan*, no. 1, th. I, 1967. Djakarta: Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, h. 24–32.

Angkatan Baru. "Waspada pada Gerpol dibidang budaja", no. 8, th. I, (1 Agustus 1965).

Budiman, Ariff. "Djatatan Harian Manikebu", *Horison*, no. 5 th. II. (Mei 1967), h. 153–157.

Dharta, A.S. "Djalan Perkembangan Kesusastraan," (preadvisnya dalam Kongres Kebudayaan Indonesia II di Bandung, 1951 yang disponsori oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia). *Indonesia* no. 1/2/3, th. III, (Januari/Februari/Maret 1952), h. 76–79.

Harrison, James P. "The Ideological Training of Intellectuals in Communist China," *Asian Survey*, vol. 10, no. 10, (Oktober 1965), pp. 491–502.

Hindley, Donald. "The October Coup in Indonesia," *The American Review*. (Oktober 1967), pp. 51–69.

Hutagalung, M.S. "Zaman Baru" (sebuah sorotan), *Mimbar Indonesia*. no. 12, th. XVIII, (Disember 1963).

Jassin, H.B. "Ketjenderungan Negatif dalam Kesusastraan Indonesia," *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei* (IV), 1967, h. 110–114.

————. "Apakah Tenggelamnja Kapal Van Der Wijck Plagiat?" *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei* (*I*), 1967, h. 64–71.

Johns, A.H. "Pramoedya Ananta Toer; The Writer as Outsider—An Indonesian Example," *Meanjin* (Melbourne), (Maret–April) 1963.

————. "A Poet between Two Worlds: The Works of Sitor Situmorang," *Westerly* (Australia), (November 1966).

Lenin, V.I. "Attitude of the Workers' Party towards Religion," *Marx, Engles, Marxism* by V.I. Lenin. 5th edition. Moscow: Foreign Publishing House, 1953, pp. 302.

Marck, Siegfried. "Dialectical Materialism," *History of Philosophical Systems*. Virgilius Ferm (ed.). New Jersey: Littlefiled, Adams, 1961, pp. 306–314.

Marx, Karl and Friedrich Engels "Social Reality as Class Struggle," *The Modern Tradition: Background of Modern Literature*. Richard Ellmann and Charles Feildelson, Jr. (ed.). New York: Oxford University Press, 1965, pp. 329–337.

Moeljanto, D.S. "Lahirnja Manifes Kebudajaan," *Horison*, no. 5, th. II, (Mei 1967), h. 158–159.

Mohamad, Goenawan. "Contemporary Indonesian Literature," *Solidarity*, Vol. III, no. 9, (September 1968). Manila: Solidaridad Publishing House, pp, 22–28.

Paget, Roger K. "Indonesian Newspapers 1965–1967," dan "Djakarta Newspapers 1965–1967: Preliminary Comments," *Indonesia*, no. 4, (Oktober 1967). Modern Indonesian Project, Cornell University, Ithaca, New York, pp. 170–226.

Peacock, James L. "Anti-Dutch, Anti-Muslim Drama among Surabaja Proletarians: A Description of Performances and Responses," *Indonesia*, no. 4, (Oktober 1967). Modern Indonesian Project, Cornell University, Ithaca, New York, pp. 44–73.

Saleh, Boejoeng. "Kaerah Seni Berisi, Sekitar soal tendens," *Indonesia*, no. 6/7, th. IV, (Juni/Juli 1953), h. 337–344.

————. "Perkembangan Kesusastraan Indonesia. Beberapa Kenjataan dan Kemungkinan," *Almanak Seni*. Djakarta: Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN), 1957, h. 7–48.

Sastrowardojo, Subagio. "Sadjak Perlawanan Taufiq Ismail dan Angkatan 66," *Budaja Djaja*, no. 13, th. kedua, (Juni 1969), h. 366–382.

Siregar, Bakri. "Pendukungan Sastra pada Revolusi Agustus," *Zaman Baru*, no. 19 (Oktober 1961).

————. "Dan Pengertian tetap Katjau." *Beberapa Paham Angkatan 45*, h. 74–78.

————. "Prof. Dr. A Teeuw tentang Lekra," *Zaman Baru*, no. 3, (Juni 1956).

Situmorang, Sitor. "Posisi Nasionalis di tengah-tengah matjam Phobia Kebudajaan." *Suluh Indonesia*, no. 187. th. 10, (16 Mei 1963).

Soe Hok Djin. "Manusia dan Seni; Suatu renungan tentang fungsi dan pengertian seni," *Sastra*, no. 6, th. III, 1963, h. 28–31.

Soe Hok Gie. "The Future of the Indonesian Communist Movement," *Solidarity*, Vol. III, no. 9, (September 1968). Manila: Solidaridad Publishing House, pp. 13–18.

Sukito, Wiratmo. "Manifes dan Masalah-masalah Sekarang," *Horison*, no. 5, th. II, (Mei 1967), h. 132–133.

————. "Sastra Revolusioner," *Sastra*, no. 9/10, th. III, 1963, h. 1–2.

————. "Manusia, Sastra dan Politik," dalam *Antologi Esei tentang persoalan2 Sastra*. Sastyagraha Hoerip (pemilih dan penyusun). Djakarta: Sinar Kasih, 1969, h. 19–39.

Rosidi, Ajip. "Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Sastra Indonesia," *Budaja Djaja*, no. 5, th. I, (Oktober 1968), h. 299–311.
Tasrif, S. "Situasi Kaum Intelektual di Indonesia," *Budaja Djaja*, no. 4, th. I (September 1968), h. 201–208.
Toer, Pramoedya Ananta. "Kesusastraan sebagai Alat." *Indoneisa*, no. 8, th. III (Agustus 1952), h. 7–12.
————. "Djembatan Gantung dan Konsepsi Presiden," *Harian Rakjat*, no. 1684, th. VII, (28 Feb. 1957).
Toer, Pramoedy Ananata. "Korps pengarang dikuras sampai tandas." *Waspada*, th. XIII, no. 3386, (6 Februari 1959).
————. "Mas Sitor Situmorang Panglima Kebudajaan Marhaenis," *Republik*, no. 1050, th. IV, (15 Juli 1959).

BAHAN-BAHAN DOKUMENTASI YANG TIDAK DICETAK

Budiman, Arief. "Kekuatan Politik dalam Kesusastraan Indonesia. Sebuah Tindjauan Sedjarah." (tulisan tangan), tgl, 26 September 1968. Disimpan dalam dokumentasi Kesusastraan Drs. H.B. Jassin.
Lekra. "Sikap dan Pendirian Lembaga Kebudajaan Raikjat terhadap keadaan Dewasa ini." (stensilan). Djakarta: Sekretarat Lekra, tgl. 28 Disember 1950.
Sukito, Wiratmo. "Prinsip Kepengarangan Kita". Prasaran pada Konferensi Karyawan Pengarang se Indonesia. (stensilan). Konferensi ini diadakan di Djakarta dari 1 s/d 7 Maret 1964.
Tjung, Benny. "Sastra Indonesia punja Tradisi Revolusioner." Suatu prasaran dalam simposium pertama Lembaga Sastra Indonesia Lekra. Diadakan pada tanggal 29 April 1960 di Balai Budaya, Djakarta.
Toer, Pramoedya Ananta. 'Realisme-sosialis dan Sastra Indonesia. Sebuah Tindjuan Sosial". Prasaran dalam Seminar Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Djakarta, yang diadakan pada 26 Januari 1962. (stensilan).
————. "Ide, Garis dan Aparat dalam Hubungan dengan Generasi Muda." Suatu prasaran dalam Simposium Generasi Muda Anjuran Lembaga Sastra Indonesia, Lekra, pada tanggal 29 April 1960 di Balai Budaya, Djakarta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan pada tanggal 30 April 1960 di Simpang Lima, Parit Buntar, Perak, Malaysia. Mula-mula mendapat pelajaran di sekolah dasar berbahasa Melayu selama empat tahun. Setelah itu melanjutkan pelajaran di sekolah berbahasa Inggeris pada Methodist School, Parit Buntar selama tujuh tahun. Penulis menyelesaikan pelajaran menengah di Methodist Boys' School, Pulau Pinang pada tahun 1958.

Pada tahun 1959 penulis menjadi guru sementara di Bandar Bharu English School, Kedah dan pada tahun 1960 meneruskan pelajaran di Maktab Perguruan Bahasa (Language Institute), Kuala Lumpur selama dua tahun hingga mendapat "Certificate in education" dalam bidang pengajaran bahasa Melayu dan Inggeris.

Setelah selesai belajar di Maktab Perguruan Bahasa penulis ditugaskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengajar di Chung Ling High School, Pulau Pinang. Pengalaman sebagai guru tidak berapa lama karena pada bulan Maret 1963 penulis pindah bekerja pada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai Pembantu Peneliti dalam bidang kesusastraan Melayu moden.

Kesempatan yang banyak untuk studi dan mendalami lagi aspek-aspek kesusastraan diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Di Kuala Lumpur penulis banyak bergaul dengan para pengarang, sarjana dan wartawan-wartawan yang banyak berkumpul di sini. Hasil dari pergaulan dan pengalaman penulis dalam penelitian kesusastraan Melayu moden memungkinkan penulis menghasilkan karangan-karangan tentang kesusastraan diberbagai majalah, harian dan juga dalam buku.

Karya-karya penulis dalam bentuk buku adalah:

(1) *Bimbingan Sastra Melayu Moden.* Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1967, 177 halaman.

(2) *Bimbingan Sastra Melayu. Lama* Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu, 1967.

(3) *Mengkaji Fiksyen.* Singapura: Pustaka Nasional, 1967, 110 halaman.

(4) *Kesusastraan Moden dalam Esei dan Kritik* (*I*). Singapura: Pustaka Nasional, 1967, 155 halaman.

(5) *Kesusastraan Moden dalam Esei dan Kritik* (*II*). Singapura: Pustaka Nasional, 1968.

(6) *Langkah Kiri* (novel). Kuala Lumpur: Syarikat Karyawan, 1967.

(7) *Penghuni Kamar 14.* (novel). Singapura: Pustaka Nasional, 1968.

Karangan-karangan penulis yang berupa kritiksastra, cerpen, puisi dan esei banyak tersibar dalam majalah-majalah seperti *Dewan Bahasa*, *Dewan Masyarakat* (kedua-duanya terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka), *Bahasa* (terbitan triwulan oleh Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya), *Tenggara* (terbitan Jurusan Inggeris Universiti Malaya), *Penulis* (terbitan Persatuan Penulis Nasional), *Mastika* (terbitan Utusan Melayu) dan *Pemimpin* (terbitan Kementarian Kebudayaan, Belia dan Sukan). Selain dari majalah-majalah di atas, karangan-karangan penulis juga dimuat dalam harian-harian dan mingguan-mingguan seperti *Berita Harian/Berita Minggu*, *Utusan Melayu/Utusan Zaman* dan *Utusan Malaysia/Mingguan Malaysia.*

PENUNJUK